BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

Daerah Istimewa Yogyakarta



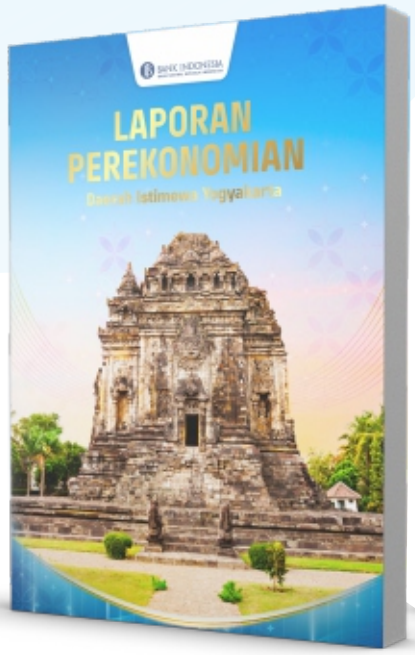
AGUSTUS 2026

LAPORAN PEREKONOMIAN

Daerah Istimewa Yogyakarta

AGUSTUS
2026





Evaluasi dan Saran terkait publikasi Laporan Perekonomian
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Agustus 2026

dapat diisi melalui QR berikut

https://tinyurl.com/LPPDIYAgustus26

Visi, Misi & Nilai Strategis Bank Indonesia

VISI

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

MISI

1. Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta pelindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Nilai – Nilai Strategis

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas *(trust and integrity)*; (ii) profesionalisme *(professionalism)*; (iii) keunggulan *(excellence)*; (iv) mengutamakan kepentingan umum *(public interest)*; dan (v) koordinasi dan kerja sama tim *(coordination and teamwork)* yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmat dan karunia-Nya, Buku Laporan Perkembangan Perekonomian (LPP) Daerah Istimewa Yogyakarta dapat hadir di tangan pembaca untuk periode Agustus 2026. LPP merupakan laporan yang menyampaikan gambaran kondisi terkini dan prospek perekonomian dalam perspektif regional DIY. Asesmen regional tersebut meliputi perkembangan makroekonomi, inflasi, stabilitas sistem keuangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sistem pembayaran, serta kesejahteraan dan kemiskinan yang dipublikasikan secara triwulanan.

Perekonomian DIY tumbuh positif pada triwulan II 2026 mencapai 5,75% (yoy), terjaga baik meskipun termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,84% (yoy). Perekonomian DIY triwulan II 2026 tersebut tumbuh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja perekonomian wilayah Jawa dan Nasional yang masing-masing tumbuh sebesar 5,65% (yoy) dan 5,29% (yoy).

Sementara itu, inflasi triwulan II 2026 . Berdasarkan rilis BPS, inflasi gabungan kota IHK DIY tercatat sebesar 2,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 4,08% (yoy), serta lebih rendah dari inflasi Nasional sebesar 3,34% (yoy) dan Jawa sebesar 2,98% (yoy). Meskipun demikian, inflasi masih terjaga dalam sasaran target inflasi 2,5±1%. Stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran di DIY tetap kuat dan angka kemiskinan semakin menurun seiring dengan terjaganya optimisme masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi DIY.

Pertumbuhan ekonomi DIY pada 2026 diprakirakan akan kuat dan bertumbuh lebih tinggi dibandingkan 2025. Dasar optimisme ini tentunya perlu kita implementasikan dalam bentuk upaya sinergi penguatan ekonomi meski dibayangi dengan ketidakpastian global. Berdasarkan hal tersebut, kami meyakini pada 2026 ekonomi DIY akan tumbuh pada kisaran proyeksi 5,7 – 6,5% (yoy).

Kami harap buku LPP ini dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, pemerhati ekonomi daerah, serta masyarakat umum. Kami menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data serta informasi yang diperlukan dalam penyusunan LPP ini. Kerjasama yang terjalin baik ini diharapkan dapat terus berlangsung dan semakin kuat. Kami terbuka atas seluruh masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kualitas laporan, agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar ke depannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mengupayakan hasil kerja yang lebih baik untuk mewujudkan ekonomi daerah yang terus bertumbuh.

Yogyakarta, Agustus 2026

Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sri Darmadi Sudibyo
Direktur

Daftar Isi

Kata Pengantar v
Daftar Isi vi
Daftar Grafik viii
Daftar Tabel xii
Ringkasan Eksekutif xiv
Tabel Indikator xx

01
Perkembangan Ekonomi Daerah

1.1 Komponen Pengeluaran (Permintaan) 2
1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga (RT) 3
1.1.2. Konsumsi Pemerintah 5
1.1.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 7
1.1.4. Ekspor Barang dan Jasa 9
1.1.5. Impor Barang dan Jasa 10
1.2 Komponen Penawaran (Lapangan Usaha) 11
1.2.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 12
1.2.2. Lapangan Usaha Industri Pengolahan 13
1.2.3. Lapangan Usaha Konstruksi 14
1.2.4. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 14
1.2.5. Lapangan Usaha Perdagangan 15
1.2.6. Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi 16

02
Perkembangan Inflasi

2.1. Perkembangan Inflasi Triwulan II 2026 20
2.2. *Tracking* Inflasi Triwulan III 2026 22
2.3. Program Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan II 2026 23
Boks 1 *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Se-DIY *Monitoring* dan Evaluasi Inflasi DIY Semester I Tahun 2026: Upaya Pengendalian Inflasi DIY di Tengah Dinamika Energi, Cuaca, dan Aktivitas Konsumsi Wisatawan 26

03

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

3.1	Kinerja Perbankan	32
3.1.1.	Kondisi Umum	32
3.1.2.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)	33
3.1.3.	Perkembangan Kredit	34
3.1.4.	Likuiditas dan Risiko Kredit Perbankan	35
3.2	Asesmen Kinerja Sektor Korporasi	36
3.2.1.	Ketahanan Sektor Korporasi	36
3.2.2.	Eksposure Perbankan pada Sektor Korporasi	36
3.3	Kinerja Sektor Rumah Tangga	38
3.3.1.	Ketahanan Rumah Tangga	38
3.3.2.	Eksposure Perbankan pada Sektor Rumah Tangga	38
3.4	Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	40
3.4.1.	Akses Keuangan kepada UMKM	40
3.4.2.	Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	41
Boks 2	Satu Dasawarsa Grebeg UMKM DIY 2026	44

04

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

4.1.	Perkembangan Transaksi Non Tunai	50
4.1.1.	Transaksi Yang Dioperasikan Oleh Bank Indonesia (SKNBI dan RTGS)	50
4.1.2.	Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Dan Uang Elektronik	51
4.2.	Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah	54
4.3.	Perkembangan Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank di DIY	54
Boks 3	*High Level Meeting* (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-DIY 2026 "Penguatan Ekosistem Digital Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah"	56

05

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

5.1.	Gambaran Umum	60
5.2.	Ketenagakerjaan	60
5.2.1.	Partisipasi Kerja	60
5.2.2.	Pengangguran	62
5.3.	Kesejahteraan Masyarakat	63
5.3.1.	Kesejahteraan Petani	63
5.4.	Kemiskinan	64

06

Prospek Perekonomian

6.1.	Prospek Perekonomian 2026	70
6.1..	Proyeksi Ekonomi Sisi Permintaan	70
6.1.2.	Proyeksi Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	71
6.1.	Prospek Inflasi 2026	73

Daftar Grafik

01

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2026 DIY, Nasional, dan Jawa	2
Grafik 1.2.	Pangsa Komponen Pengeluaran pada Pertumbuhan PDRB DIY ADHB	2
Grafik 1.3.	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	3
Grafik 1.4.	Perkembangan IKK, IKE, dan IEK DIY	3
Grafik 1.5.	Perkembangan Indeks Penghasilan Konsumen, Indeks Ekspektasi Lapangan Kerja, dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha DIY	4
Grafik 1.6.	Perkembangan Komponen Indeks Penjualan Riil di DIY	4
Grafik 1.7.	Perkembangan Kredit Konsumsi RT di DIY	4
Grafik 1.8.	Perkembangan Komponen Kredit Konsumsi RT di DIY	5
Grafik 1.9.	Perkembangan DPK RT di DIY	5
Grafik 1.10.	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) DIY	5
Grafik 1.11.	Perkembangan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) DIY	5
Grafik 1.12.	Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	6
Grafik 1.13.	Pangsa Belanja Pemerintah Daerah	7
Grafik 1.14.	Pertumbuhan Investasi	8
Grafik 1.15.	Perkembangan SBT Investasi	8
Grafik 1.16.	Perkembangan Kredit Properti	8
Grafik 1.17.	Perkembangan Investasi PMA dan PMDN	9
Grafik 1.18.	Sebaran Sektor Investasi di DIY	9
Grafik 1.19.	Pangsa Investasi PMA dan PMDN Per Spasial Triwulan II 2026	9
Grafik 1.20.	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	10
Grafik 1.21.	Perkembangan Nominal Ekspor Luar Negeri	10
Grafik 1.22.	Pangsa Ekspor Barang DIY Per Sektor	10
Grafik 1.23.	Perkembangan Ekspor Pertanian dan Industri Pengolahan DIY	10
Grafik 1.24.	Pasar Ekspor Utama DIY	10
Grafik 1.25.	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	11
Grafik 1.26.	Perkembangan Nominal Impor	11
Grafik 1.27.	Perkembangan Impor Berdasarkan Kelompok Barang	11
Grafik 1.28.	Pangsa Impor Berdasarkan Kelompok Barang	11
Grafik 1.29.	Pangsa Komponen Lapangan Usaha Utama pada Pertumbuhan PDRB DIY ADHB	12
Grafik 1.30.	Pertumbuhan LU Penyediaan Akmamin	13
Grafik 1.31.	Perkembangan Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Wisatawan Domestik	13
Grafik 1.32.	Likert Scale Penyediaan Akmamin	13
Grafik 1.33.	Pertumbuhan LU Industri Pengolahan	13
Grafik 1.34.	Perkembangan SBT Industri	13
Grafik 1.35.	Pertumbuhan LU Konstruksi	14
Grafik 1.36.	Perkembangan Kredit Konstruksi	14
Grafik 1.37.	Perkembangan Kredit Konstruksi	14
Grafik 1.38.	Perkembangan SBT Konstruksi	14
Grafik 1.39.	Pertumbuhan LU Pertanian	15
Grafik 1.40.	Perkembangan SBT Pertanian	15

Grafik 1.41. Pertumbuhan LU Perdagangan 15
Grafik 1.42. Perkembangan Likert Scale Perdagangan 15
Grafik 1.43. Perkembangan Kredit Perdagangan 15
Grafik 1.44. Pertumbuhan LU Informasi dan Komunikasi 16

02

Grafik 2.1. Inflasi DIY, Jawa dan Nasional (%yoy) 20
Grafik 2.2. Inflasi Tahun Kalender DIY (%ytd) 20
Grafik 2.3. Perkembangan Harga Emas Global (USD/oz) 21
Grafik 2.4. Perkembangan Harga CPO Global (Usd/metric ton) 21
Grafik 2.5. Perkembangan Harga BBM (Rp/L) 22
Grafik 2.6. Perkembangan Harga Avtur (Rp/L) 22

03

Grafik 3.1. Perkembangan Aset Perbankan DIY 32
Grafik 3.2. Komposisi Aset Perbankan DIY 32
Grafik 3.3. Pertumbuhan DPK Perbankan DIY 33
Grafik 3.4. Pertumbuhan DPK DIY berdasarkan Komponen 33
Grafik 3.5. Pangsa DPK Bank Umum DIY 33
Grafik 3.6. Pertumbuhan DPK DIY berdasarkan Kepemilikan 33
Grafik 3.7. Pangsa DPK DIY secara Spasial 34
Grafik 3.8. Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Lokasi 34
Grafik 3.9. Kinerja Pertumbuhan Kredit DIY 34
Grafik 3.10. Pertumbuhan Kredit DIY 34
Grafik 3.11. Komposisi Kredit DIY Berdasarkan Penggunaan 34
Grafik 3.12. Komposisi Kredit DIY Berdasarkan Kepemilikan 35
Grafik 3.13. Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek 35
Grafik 3.14. Perkembangan NPL DIY 35
Grafik 3.15. Perkembangan NPL DIY berdasarkan Komponen 36
Grafik 3.16. Perkembangan LaR DIY 36
Grafik 3.17. Perkembangan Kredit Korporasi DIY 36
Grafik 3.18. Perkembangan Kredit Korporasi berdasarkan Komponen 36

Grafik 3.19. Perkembangan Kredit Korporasi berdasarkan Sektor Ekonomi 37
Grafik 3.20. Perkembangan DPK Sektor Korporasi 37
Grafik 3.21. Perkembangan DPK Sektor Korporasi berdasarkan Komponen 37
Grafik 3.22. Komposisi DPK Korporasi 37
Grafik 3.23. Perkembangan NPL Korporasi 38
Grafik 3.24. Komponen NPL Korporasi 38
Grafik 3.25. Perkembangan IKK dan Konsumsi RT DIY 38
Grafik 3.26. Perkembangan Kredit RT DIY 38
Grafik 3.27. Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit RT 38
Grafik 3.28. Perkembangan Komponen Kredit RT 39
Grafik 3.29. Komposisi Kredit RT 39
Grafik 3.30. Perkembangan DPK dan Kredit Sektor RT 39
Grafik 3.31. Perkembangan DPK RT per Jenis Simpanan 39
Grafik 3.32. Perkembangan NPL Rumah Tangga 40
Grafik 3.33. Perkembangan NPL berdasarkan Jenis 40
Grafik 3.34. Perkembangan Kredit UMKM DIY 40
Grafik 3.35. Pangsa Kredit UMKM DIY 40
Grafik 3.36. Perkembangan Kredit UMKM DIY Berdasarkan Skala Usaha 41
Grafik 3.37. Perkembangan Kredit UMKM DIY Berdasarkan Sektor 41
Grafik 3.38. Perkembangan NPL UMKM DIY 41
Grafik 3.39. Perkembangan NPL per Jenis UMKM 41

04

Grafik 4.1. Perkembangan Transaksi SKNBI 50
Grafik 4.2. Perkembangan Transaksi RTGS 50
Grafik 4.3. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit 51
Grafik 4.4. Perkembangan Transaksi ATMD 51
Grafik 4.5. Perkembangan Transaksi Kartu ATM Debet 51
Grafik 4.6. Pangsa Transaksi Kartu ATM Debet 51
Grafik 4.7. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit 52
Grafik 4.8. Pangsa Transaksi Kartu Kredit 52
Grafik 4.9. Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik 52
Grafik 4.10. Penggunaan Transaksi Uang Elektronik 52
Grafik 4.11. Perkembangan *Merchant* dan *User* QRIS 53
Grafik 4.12. Perkembangan Transaksi QRIS 53
Grafik 4.13. Perkembangan *Inflow* dan *Outflow* Uang Kartal di DIY 54
Grafik 4.14. Perkembangan Pemusnahan Uang di DIY 54
Grafik 4.15. Perkembangan Transaksi Valuta Asing di DIY 54
Grafik 4.16. Pangsa Valuta Asing yang Ditukarkan di DIY 54

05

Grafik 5.1.	Persentase penduduk usia kerja di DIY	60
Grafik 5.2.	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DIY	60
Grafik 5.3.	Perkembangan TPT di DIY dan Nasional	62
Grafik 5.4.	Perkembangan TPT di DIY Berdasarkan Wilayah	63
Grafik 5.5.	Perkembangan TPT Menurut Pendidikan di DIY	63
Grafik 5.6.	Perkembangan NTP DIY	63
Grafik 5.7.	Perkembangan NTP Berdasarkan Subsektor	63
Grafik 5.8.	Perkembangan NTP dan Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Petani	63
Grafik 5.9.	Perkembangan Penduduk Miskin	64
Grafik 5.10.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin	64
Grafik 5.11.	Perkembangan Persentasi Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan Spasial	64
Grafik 5.12.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	65
Grafik 5.13.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	65
Grafik 5.14.	Perkembangan GK dan Inflasi	66
Grafik 5.15.	Perkembangan Garis Kemiskinan	66
Grafik 5.16.	Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKM Perkotaan	66
Grafik 5.17.	Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKM Perdesaan	66
Grafik 5.18.	Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKBM Perkotaan	67
Grafik 5.19.	Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKBM Perdesaan	67
Grafik 5.20.	Perkembangan Gini Ratio DIY	67
Grafik 5.21.	Perkembangan Gini Ratio DIY Secara Spasial	67

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jawa Triwulan II 2026	2
Tabel 1.2.	Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2026 Sisi Permintaan	3
Tabel 1.3.	Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2026 Sisi Lapangan Usaha	12
Tabel 2.1.	Perkembangan Inflasi DIY (% yoy)	20
Tabel 2.2.	Perkembangan Andil Inflasi DIY per Kelompok Pengeluaran (% yoy)	20
Tabel 2.3.	Perkembangan Inflasi DIY Triwulan III* 2026 per Kelompok Pengeluaran (% yoy)	23
Tabel 5.1.	Status Keadaan Ketenagakerjaan di DIY	61
Tabel 5.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di DIY	61
Tabel 5.3.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	62
Tabel 5.4.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY	62
Tabel 5.5.	Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di DIY	65
Tabel 6.1.	Faktor Pendorong dan Penahan Pertumbuhan Ekonomi DIY Sisi Permintaan Tahun 2026	61
Tabel 6.2.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pertumbuhan Ekonomi DIY Sisi Penawaran Tahun 2026	72
Tabel 6.3.	Faktor Pemicu dan Penahan Inflasi 2026	73



Ringkasan Eksekutif

Agustus 2026



Perkembangan Ekonomi Makro Regional

Perekonomian DIY tumbuh positif pada triwulan II 2026 mencapai 5,75% (yoy), terjaga baik meskipun termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,84% (yoy). Perekonomian DIY triwulan II 2026 tersebut tumbuh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja perekonomian wilayah Jawa dan Nasional yang masing-masing tumbuh sebesar 5,65% (yoy) dan 5,29% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, perekonomian DIY yang tumbuh positif pada triwulan II 2026 terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor. Konsumsi RT yang memiliki pangsa terbesar dibandingkan komponen lainnya yaitu sebesar 62,29%, melanjutkan pertumbuhan positif sebesar 4,80% (yoy), kendati melemah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yaitu 5,02% (yoy). Lebih lanjut, kinerja PMTB memiliki pangsa sebesar 35,80% terhadap perekonomian DIY, tumbuh sebesar 6,95% (yoy), termoderasi apabila dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 7,35% (yoy). Adapun kinerja konsumsi pemerintah juga tumbuh melambat sebesar 18,34% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 20,08% (yoy) dan memberikan kontribusi sebesar 15,14% pada perekonomian DIY. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor barang dan jasa DIY tercatat tumbuh positif pada triwulan II 2026 yaitu sebesar 4,93% (yoy) lebih tinggi dibandingkan kinerja pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,58% (yoy). Ekspor memiliki pangsa sebesar 49,95% terhadap perekonomian DIY pada triwulan II 2026. Meskipun demikian, kinerja impor juga tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,30% (yoy), meskipun melemah dibandingkan kinerja impor pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,62% (yoy) pada triwulan II 2026, dengan kontribusi sebesar 66,32% terhadap perekonomian DIY pada periode laporan.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perekonomian DIY yang tetap tumbuh positif, meskipun termoderasi pada triwulan II 2026 ditopang oleh kinerja sejumlah LU utama, terutama LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, LU Informasi dan Komunikasi, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki pangsa sebesar 11,48% terhadap PDRB DIY pada triwulan II 2026 dan tumbuh sebesar 10,56% (yoy), meskipun termoderasi dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 11,59% (yoy). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas masyarakat pasca *festive season* Ramadan dan periode HBKN Idulfitri serta Iduladha yang terjadi pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, LU Industri Pengolahan yang memiliki pangsa sebesar 11,78% tumbuh 5,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,86% (yoy). Adapun LU Informasi dan Komunikasi memiliki pangsa sebesar 9,55% terhadap PDRB DIY dan tumbuh relatif stabil sebesar 4,59% (yoy), dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 4,63% (yoy).

Perkembangan Inflasi

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul sebagai kota IHK yang mewakili DIY mencatat inflasi yang terkendali pada triwulan II 2026. Berdasarkan rilis BPS, inflasi gabungan kota IHK DIY tercatat sebesar 2,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 4,08% (yoy), serta lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy) dan Jawa sebesar 2,98% (yoy). Secara umum, capaian tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% pada 2026.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi terutama dipengaruhi oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mencatat inflasi sebesar 14,71% (yoy), melandai dari 21,19% (yoy) pada triwulan I 2026, dengan andil sebesar 0,98% (yoy) pada triwulan II 2026. Kontributor utamanya adalah kenaikan harga emas perhiasan dengan andil 0,95% (yoy), sejalan dengan kenaikan harga emas global di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan permintaan emas sebagai aset *safe-haven.* Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga memberikan andil sebesar 0,72% (yoy), meskipun inflasinya melandai dari 2,76% menjadi 2,54% (yoy). Inflasi kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga beras, minyak goreng, dan cabai rawit. Kenaikan harga beras dipengaruhi meningkatnya biaya produksi dan harga gabah di tingkat petani, sementara harga minyak goreng terdorong keterbatasan pasokan di tengah permintaan yang tetap tinggi. Adapun kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi peningkatan biaya logistik. Sementara itu, Kelompok Transportasi mencatat inflasi sebesar 3,87% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 0,35% (yoy), dengan andil meningkat dari 0,05% (yoy) menjadi 0,50% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga bensin yang memberikan andil sebesar 0,27% (yoy).

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kinerja perbankan umum di DIY pada triwulan II 2026 tetap solid, tecermin dari pertumbuhan intermediasi yang meningkat dan risiko kredit yang terjaga. Kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan umum di DIY tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni sebesar 4,74% (yoy), dari 4,04% (yoy) pada triwulan I 2026. Sejalan dengan itu, kredit perbankan di DIY turut mencatatkan peningkatan pertumbuhan, dengan pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek sebesar 2,41% (yoy), meningkat dari 1,10% (yoy) pada triwulan sebelumnya, dan valuasi kredit perbankan DIY mencapai Rp62,46 triliun. Kualitas pembiayaan perbankan tetap terjaga, tecermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3,73%, masih berada di bawah *threshold* 5%. Dari sisi

pengembangan akses keuangan dan UMKM, penyaluran kredit UMKM di DIY pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp22,81 triliun dan kembali tumbuh positif sebesar 0,36% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,32% (yoy), seiring berlanjutnya dukungan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan berbagai program pengembangan kapasitas UMKM oleh Bank Indonesia.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pertumbuhan transaksi nontunai melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan positif. Transaksi melalui SKNBI mencatatkan nominal sebesar Rp3,16 triliun atau tumbuh 26,40% (yoy) serta naik 7,15% (qtq) dari triwulan sebelumnya (Rp2,94 triliun), dengan volume yang meningkat 17,62% (yoy) menjadi 123.291 transaksi. Sementara itu, transaksi BI-RTGS mengalami lonjakan nominal yang sangat signifikan sebesar 116,74% (yoy) mencapai Rp22,52 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp10,39 triliun), yang turut diiringi oleh peningkatan volume transaksi sebesar 13,63% (yoy) menjadi 7.999 kali transaksi.

Di sisi lain, transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di DIY pada triwulan II 2026 meningkat secara tahunan, namun menurun secara kuartalan. Nominal transaksi pembayaran nontunai berbasis kartu di DIY tercatat sebesar Rp19,68 triliun naik sebesar 1,37% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp19,41 triliun, namun menurun jika dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 19,85 triliun.

Adopsi QRIS di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus meningkat hingga triwulan II 2026. Jumlah *merchant* QRIS tercatat mencapai 1,11 juta, tumbuh 18,92% (yoy) atau 2,37% (qtq), sementara jumlah pengguna mencapai 1,13 juta, meningkat 17,51% (yoy) atau 7,50% (qtq). Struktur *merchant* masih didominasi sektor usaha mikro sebesar 66,93% dan usaha kecil sebesar 25,09%. Sejalan dengan ekspansi ekosistem tersebut, aktivitas pembayaran digital melonjak signifikan hingga membukukan volume 284,28 juta transaksi (tumbuh 68,74% yoy) dengan nilai nominal mencapai Rp24,74 triliun (naik 21,09% yoy).

Sementara itu, Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) pada triwulan I 2026 terus dilaksanakan guna menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, dan tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat. Pada triwulan II 2026 DIY mengalami *net inflow* seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang ditunjang oleh pertumbuhan pariwisata DIY. Jumlah arus uang tunai yang keluar dan masuk di KPwBI DIY masing-masing tercatat sebesar Rp1,33 triliun dan Rp4,29 triliun sehingga mengalami *net inflow* sebesar Rp2,95 triliun Pada triwulan II 2026 arus *outflow* uang kartal sebesar Rp1,33 triliun, meningkat 21,39% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,1 triliun, namun mengalami penurunan arus *outflow* jika dibandingkan dengan triwulan I 2026 sebesar 64,28% (qtq).

Jumlah transaksi penukaran valuta asing (valas) DIY melalui Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) pada triwulan I 2026 peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan turis mancanegara di DIY. Total transaksi jual dan beli valas di DIY pada triwulan II 2026 sebesar Rp590 miliar, meningkat sebesar 0,04% (yoy). Porsi transaksi penjualan dan pembelian mata uang USD mencapai 49,26%, diikuti mata uang Dolar Singapura (16,48%), Euro (10,96%), Real Saudi Arabia (5,28%), serta Yen Jepang (4,26%).

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di DIY yang tecermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif terjaga pada Mei 2026 meskipun meningkat terbatas dibandingkan Februari 2026. TPT DIY tercatat sebesar 3,11%, sedikit meningkat dari 3,05% pada Februari 2026, seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran menjadi 70,56 ribu orang dari 69,54 ribu orang. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 74,04%, menurun 0,48% dibandingkan Februari 2026. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Di tengah moderasi tersebut, kualitas penyerapan tenaga kerja menunjukkan perbaikan yang tecermin dari meningkatnya pangsa pekerja formal dari 46,02% menjadi 47,59% pada Februari 2026.

Sejalan dengan hal tersebut, kondisi kesejahteraan masyarakat DIY tetap terjaga, yang tecermin dari berlanjutnya tren penurunan kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran serta terjaganya kesejahteraan petani. Persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,70%, menurun dari 10,23% pada Maret 2025 dan menjadi level terendah dalam lima tahun terakhir. Ketimpangan pengeluaran juga menurun, tecermin dari *Gini Rasio* sebesar 0,411, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 sebesar 0,426, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 0,368. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan II 2026 tercatat sebesar 108,01, atau tumbuh 2,01% (yoy), yang mengindikasikan kemampuan tukar petani tetap terjaga.

Prospek Perekonomian

Secara umum, perekonomian DIY pada tahun 2026 diperkirakan melanjutkan pertumbuhan positif dibandingkan 2025. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran 5,7 – 6,5% (yoy). Di tengah ketidakpastian global, perekonomian DIY diperkirakan tetap kuat sejalan dengan kebijakan kenaikan UMP dan UMK 2026 yang berpotensi mendorong daya beli masyarakat. Kinerja investasi juga berpotensi mengalami pertumbuhan seiring dengan membaiknya kepercayaan investor dan berlanjutnya pembangunan di daerah. Namun di sisi lain, ketidakpastian ekonomi global diwaspadai dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan impor DIY.

Inflasi DIY pada tahun 2026 diprakirakan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2025 dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Beberapa faktor seperti peningkatan permintaan dan dinamika geopolitik menjadi pemicu tekanan inflasi sepanjang 2026. Inflasi secara umum diproyeksikan tetap terjaga didukung oleh upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY untuk menjaga kestabilan inflasi melalui koridor 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Hingga periode laporan, telah dilaksanakan berbagai upaya dan rencana jangka pendek ke depan, antara lain kondisi tersebut didukung oleh upaya TPID DIY dalam kerangka 4K, melalui perluasan kios Segoro Amarto sebagai *price reference store* melalui Warung MRANTASI, pelaksanaan edukasi MRANTASI Pasar, MRANTASI PKK, MRANTASI *Goes to School,* dan MRANTASI *Goes to Campus* serta rencana pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, dan Pasar Murah berdasarkan 3Tepat (Tepat Waktu, Tepat Lokasi, dan Tepat Sasaran) oleh TPID se-DIY untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan pasokan.



Indikator Ekonomi dan Perbankan

Provinsi D.I. Yogyakarta

Indikator	2024			2025				2026	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Ekonomi Makro Regional									
Produk Domestik Regional Bruto (%,yoy)	4,95	5,05	5,07	5,11	5,49	5,40	5,94	5,84	5,75
Berdasarkan Sektor									
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,14	3,84	1,66	14,83	-0,81	6,08	4,28	2,25	0,02
Pertambangan dan Penggalian	7,29	10,33	15,50	9,43	8,00	8,88	-0,29	4,25	1,93
Industri Pengolahan	2,14	2,90	4,76	3,94	5,25	5,07	3,86	5,94	5,40
Pengadaan Listrik, Gas	13,32	12,76	1,91	8,59	-0,31	4,21	5,82	3,12	13,98
Pengadaan Air	4,25	(2,37)	-4,36	-0,95	-2,67	-0,11	1,56	5,17	7,00
Konstruksi	8,50	8,84	7,90	5,07	9,38	8,77	8,12	7,60	7,82
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,86	4,48	5,11	5,15	5,06	5,14	5,74	5,13	5,19
Transportasi dan Pergudangan	5,50	6,53	6,10	4,27	7,40	4,74	5,68	5,74	4,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,32	7,67	6,01	5,20	7,17	5,30	7,99	11,59	10,56
Informasi dan Komunikasi	3,45	3,56	4,51	3,77	4,92	3,30	4,58	4,63	4,59
Jasa Keuangan	9,08	7,04	2,61	1,96	1,06	-0,12	3,41	-0,79	3,31
Real Estate	3,68	4,04	4,69	1,32	4,44	4,47	5,96	5,89	4,41
Jasa Perusahaan	6,85	2,50	5,82	-0,21	6,18	5,46	7,15	6,25	5,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,85	5,39	3,48	5,35	5,92	6,67	7,13	5,66	5,62
Jasa Pendidikan	3,57	3,49	5,85	5,09	7,15	5,98	5,00	5,68	6,63
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,93	5,50	5,66	5,60	6,34	7,53	9,62	4,75	6,37
Jasa lainnya	4,71	5,07	4,60	4,51	6,95	7,87	9,70	10,34	9,79
Berdasarkan Permintaan									
Konsumsi Rumah Tangga	4,72	4,64	4,61	4,80	4,43	4,29	4,89	5,02	4,80
Konsumsi Pemerintah	5,53	5,05	4,62	2,26	2,00	0,40	1,47	20,08	18,34
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	8,11	8,97	8,35	4,58	8,23	10,42	9,36	7,35	6,95
Ekspor Luar Negeri	7,88	3,04	8,67	4,45	3,21	-0,99	(3,76)	1,58	4,93
Impor Luar Negeri	9,23	5,03	10,27	1,26	2,27	-0,90	(4,23)	4,62	2,30
Laju Inflasi Tahunan									
- Kota Yogyakarta (%,yoy)	2,53	1,86	1,30	0,83	2,35	2,72	3,33	4,19	3,18
- Kabupaten Gunungkidul (%, yoy)	2,20	1,83	0,64	0,28	2,66	2,43	2,93	3,98	2,69
Bank Umum*									
Aset (Rp Miliar)	88.043	88.983	89.890	88.529	89.610	92.974	94.288	93.076	94.250
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	81.410	82.106	83.151	82.344	82.968	86.114	88.024	85.668	86.902
Kredit (Rp Miliar)	57.261	58.998	60.370	60.608	60.988	62.755	63.969	61.275	62.456
Loan to Deposit Ratio (%)	70,34	71,86	72,60	73,60	73,51	72,87	72,67	71,53	71,87
NPL *Gross* (%)	3,27	3,15	3,01	2,91	3,06	3,04	3,08	3,38	3,73

*Berdasarkan Lokasi Proyek




JL. MA
Pintu Masuk Timur
Stasiun Yogyakarta



01

Perkembangan Ekonomi Makro Regional

Perekonomian DIY tumbuh positif pada triwulan II 2026 mencapai 5,75% (yoy), terjaga baik meskipun termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan yang mencapai 5,75% (yoy) tersebut didorong oleh aktivitas eskpor barang dan jasa yang tumbuh positif. Perlambatan dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas masyarakat pasca festive season Ramadan dan periode HBKN Idulfitri serta Iduladha yang terjadi pada triwulan sebelumnya.

PDRB DIY (%yoy)		Investasi (%yoy)		Konsumsi RT (%yoy)	
5,84	5,75	7,35	6,95	5,02	4,80
Triwulan I 2026	Triwulan II 2026	Triwulan I 2026	Triwulan II 2026	Triwulan I 2026	Triwulan II 2026

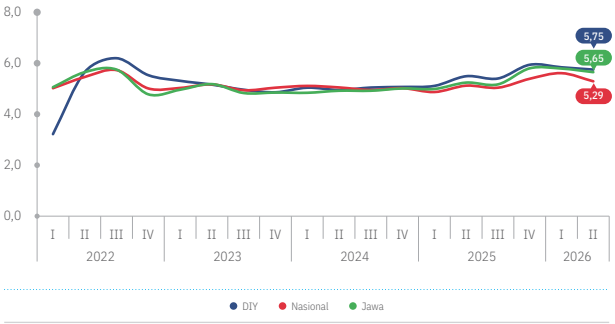
Industri Pengolahan (%yoy)		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%yoy)	
5,86	5,40	11,59	10,56
Triwulan I 2026	Triwulan II 2026	Triwulan I 2026	Triwulan II 2026

1. Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan II 2026

Perekonomian DIY tumbuh positif pada triwulan II 2026 mencapai 5,75% (yoy), terjaga baik meskipun termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,84% (yoy). Perekonomian DIY triwulan II 2026 tersebut tumbuh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja perekonomian wilayah Jawa dan Nasional yang masing-masing tumbuh sebesar 5,65% (yoy) dan 5,29% (yoy) (Grafik 1.1). Adapun kontribusi perekonomian DIY terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa dan Nasional secara berturut-turut sebesar 1,52% dan 0,86%.

Secara spasial, perekonomian DIY pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan tertinggi se-Jawa (Tabel 1.1). Dari sisi pengeluaran, perekonomian DIY yang tetap kuat utamanya didorong oleh tetap tumbuh positifnya komponen konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Adapun dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi DIY utamanya ditopang oleh LU Industri Pengolahan, Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), Pertanian, Informasi dan Komunikasi, dan Konstruksi dengan kontribusi total LU tersebut mencapai 52,90% terhadap perekonomian DIY.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2026 DIY, Nasional, dan Jawa



Sumber: BPS (Diolah)

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jawa Triwulan II 2026

Provinsi	IV 2025	I 2026	II 2026
Jawa	5,80	5,79	5,65
DKI Jakarta	5,71	5,59	5,52
Jawa Barat	5,85	5,79	5,73
Jawa Tengah	5,84	5,89	5,71
DIY	5,94	5,84	5,75
Jawa Timur	5,85	5,96	5,72
Banten	5,64	5,64	5,49

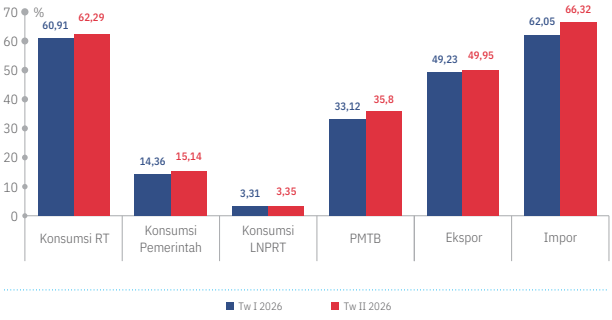
Sumber: BPS

1.1. Komponen Pengeluaran (Permintaan)

Dari sisi pengeluaran, perekonomian DIY yang tumbuh positif pada triwulan II 2026 terutama ditopang oleh terjaganya kinerja konsumsi Rumah Tangga (RT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor. Konsumsi RT yang memiliki pangsa terbesar dibandingkan komponen lainnya yaitu sebesar 62,29%, melanjutkan pertumbuhan positif sebesar 4,80% (yoy), kendati tidak setinggi pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yaitu 5,02% (yoy). Lebih lanjut, kinerja PMTB memiliki pangsa sebesar 35,80% terhadap perekonomian DIY, tumbuh sebesar 6,95% (yoy), termoderasi apabila dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 7,35% (yoy). Adapun kinerja konsumsi pemerintah juga tumbuh melambat sebesar 18,34% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 20,08% (yoy) dan memberikan kontribusi sebesar 15,14% pada perekonomian DIY pada triwulan II 2026.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor barang dan jasa DIY tercatat tumbuh positif pada triwulan II 2026 yaitu sebesar 4,93% (yoy) lebih tinggi dibandingkan kinerja ekspor pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,58% (yoy). Ekspor memiliki pangsa sebesar 49,95% terhadap perekonomian DIY pada triwulan II 2026. Lebih lanjut, kinerja impor juga tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,30% (yoy), meskipun melemah dibandingkan kinerja pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,62% (yoy) pada triwulan II 2026, dengan kontribusi sebesar 66,32% terhadap perekonomian DIY pada periode laporan. Secara keseluruhan, komponen net eskpor mencatatkan defisit dengan kontribusi sebesar 16,37% terhadap perekonomian DIY pada triwulan II 2026 seiring dengan kenaikan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor (Grafik 1.2 dan Tabel 1.2).

Grafik 1.2. Pangsa Komponen Pengeluaran pada Pertumbuhan PDRB DIY ADHB



Sumber: BPS, DIY

1. *ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku*

Tabel 1.2. Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2026 Sisi Permintaan

Pengeluaran	(y-on-y)			(q-to-q)		
	IV 2025	I 2026	II 2026	IV 2025	I 2026	II 2026
Sisi Permintaan	5,94	5,84	5,75	3,45	0,87	1,12
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,89	5,02	4,80	3,53	0,81	2,24
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,57	9,11	9,45	6,78	0,21	1,15
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,47	20,08	18,34	33,78	-10,87	4,32
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,36	7,35	6,95	2,76	-10,23	7,32
Perubahan Inventori	7,05	-4,97	-111,11	-1492,37	558,66	-118,11
Ekspor Barang dan Jasa	-3,76	1,58	4,93	-2,90	5,99	-0,33
Impor Barang dan Jasa	-4,23	4,62	2,30	5,01	-3,72	2,58

Sumber: BPS DIY

1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga (RT)

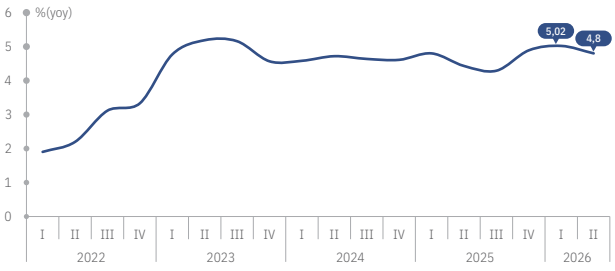
Konsumsi RT tetap tumbuh positif pada triwulan II 2026 sebesar 4,80% (yoy), meskipun termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,02% (yoy) (Grafik 1.3). Momentum Ramadan, HBKN Idulfitri dan Iduladha yang telah berlalu menyebabkan aktivitas pariwisata, perdagangan, dan mobilitas masyarakat melambat sehingga kinerja konsumsi rumah tangga tidak sebaik triwulan sebelumnya.

Konsumen RT masih berada pada *level* optimis, meskipun melambat. Perlambatan konsumsi juga sejalan dengan meningkatnya kehati-hatian konsumen, tecermin dari melemahnya Indeks Ekspektasi Lapangan Kerja yang mendekati batas optimistis. Kendati demikian, kondisi dan ekspektasi penghasilan konsumen masih berada pada level optimistis (>100), sehingga menopang daya beli dan menjaga konsumsi rumah tangga tetap tumbuh solid.

Melambatnya pertumbuhan konsumsi RT juga sejalan dengan meningkatnya kehati-hatian konsumen. Hal ini tecermin dari beberapa indikator pada Survei Konsumen (SK) yang dilakukan oleh Bank Indonesia, antara lain Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Berdasarkan hasil survei konsumen, IKK pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 102,33; melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 111,75. Adapun IEK pada triwulan II 2026 juga tercatat termoderasi yaitu sebesar 105,43; dibandingkan IEK pada triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 119,28. Meskipun mengalami pelemahan, indeks dimaksud berada di atas angka 100 atau berada pada zona optimis. Angka tersebut menunjukkan konsumen masih melihat kondisi ekonomi saat ini dan ke depan tetap baik, meski terdapat kehati-hatian (Grafik 1.4).

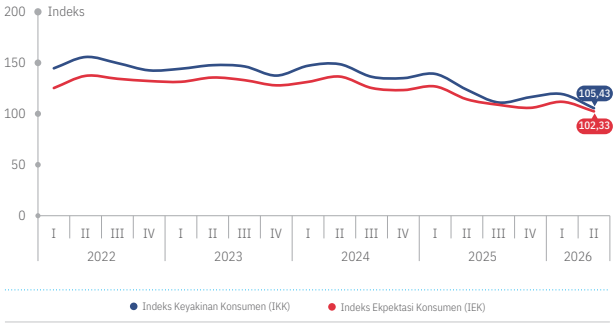
Termoderasinya kinerja konsumsi RT juga tecermin dari Indeks Penghasilan Konsumen yang tumbuh 106,67 pada triwulan II 2026, melambat dibandingkan kinerja pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 109,17. Sejalan dengan hal tersebut, persepsi konsumen pada perekonomian yang akan datang tecermin dari indikator Indeks Ekspektasi Penghasilan dan Indeks Ekspektasi Lapangan Kerja yang tumbuh secara berturut-turut 117,00 dan 102,17, melambat dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang secara bertutut-turut berada pada level 126,50 dan 116,33. Meskipun demikian, kondisi dan ekspektasi penghasilan konsumen masih berada pada level optimistis (>100), sehingga menopang daya beli dan menjaga konsumsi rumah tangga tetap tumbuh solid (Grafik 1.5).

Grafik 1.3. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga



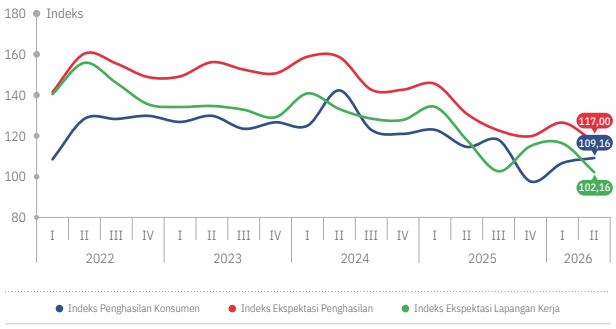
Sumber: BPS DIY

Grafik 1.4. Perkembangan IKK, IKE, dan IEK DIY



Sumber: Survei Konsumen (BI)

Grafik 1.5. Perkembangan Indeks Penghasilan Konsumen, Indeks Ekspektasi Lapangan Kerja, dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha DIY



Sumber: Survei Konsumen (BI)

Lebih lanjut, termoderasinya sektor ritel pada triwulan laporan juga turut mempengaruhi kinerja konsumsi RT DIY pada triwulan II 2026. Tren belanja konsumen yang tetap kuat, meskipun melambat tertangkap oleh Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) beberapa kategori utama pada Grafik 1.6.

Perkembangan IPR pada triwulan II 2026 menunjukkan aktivitas belanja masyarakat masih berada pada level yang relatif tinggi, meskipun beberapa kelompok barang mengalami moderasi. IPR suku cadang dan aksesori mobil tetap menjadi yang tertinggi sebesar 233,56, sementara IPR elpiji tercatat sebesar 175,81. Di sisi lain, IPR barang kosmetik termoderasi menjadi 152,96, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 155,19. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa permintaan masyarakat masih terjaga, termasuk terhadap barang nonprimer, namun mulai mengalami normalisasi setelah tingginya aktivitas konsumsi pada triwulan I 2026 pada momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri.

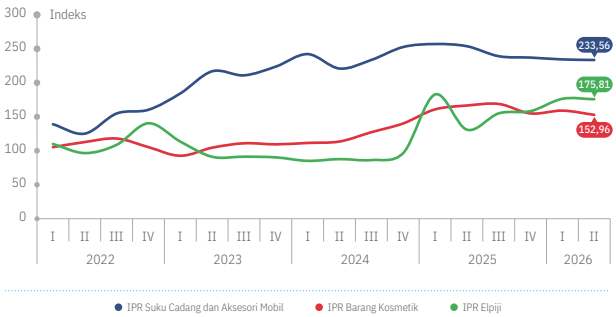
Sejalan dengan hal tersebut, termoderasinya konsumsi RT DIY juga tecermin dari perkembangan kredit konsumsi RT di DIY dimana pada triwulan II 2026 tumbuh 3,23% (yoy), melemah dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,94% (yoy). Perlambatan tersebut mengindikasikan normalisasi kebutuhan pembiayaan konsumsi pasca tingginya aktivitas belanja pada periode Ramadan dan HBKN Idulfitri, disertai kecenderungan rumah tangga yang lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian berbasis kredit. Kondisi ini sejalan dengan melemahnya ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja (Grafik 1.7).

Berdasarkan komponennya, melemahnya kinerja konsumsi RT tersebut terutama disertai oleh terbatasnya pembiayaan untuk konsumsi barang tahan lama, tecermin dari KKB yang terkontraksi sebesar 0,13% (yoy) dan KPR yang relatif stagnan sebesar 0,03% (yoy). Sementara itu, kredit multiguna masih tumbuh positif sebesar 5,37% (yoy), meskipun cenderung melambat dibandingkan periode sebelumnya. Perkembangan tersebut mengindikasikan meningkatnya kehati-hatian rumah tangga dalam mengambil pembiayaan baru, terutama untuk konsumsi bernilai besar dan berjangka panjang (Grafik 1.8).

Di sisi lain, DPK rumah tangga secara nominal tetap berada pada level tinggi, yaitu mencapai Rp64 triliun pada triwulan II 2026, meskipun secara tahunan tumbuh terbatas sebesar 0,03% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa simpanan rumah tangga masih relatif terjaga secara nominal, namun belum menunjukkan peningkatan akumulasi simpanan yang kuat. Kondisi ini, bersama dengan perlambatan kredit konsumsi dan melemahnya ekspektasi lapangan kerja, semakin memperkuat indikasi bahwa moderasi konsumsi RT lebih mencerminkan normalisasi konsumsi dan meningkatnya kehati-hatian rumah tangga, dibandingkan pelemahan daya beli secara signifikan (Grafik 1.9).

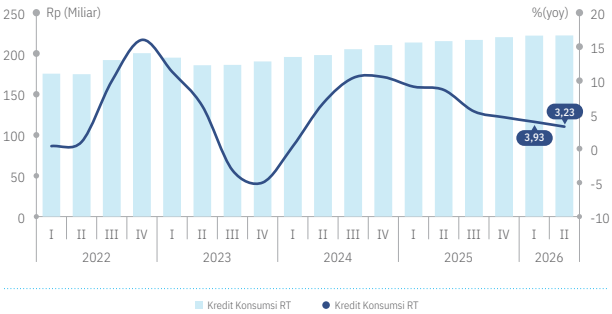
Selanjutnya, daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga petani, masih relatif terjaga meskipun termoderasi pada triwulan II 2026. Hal tersebut tecermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih berada pada level 108,01, dengan pertumbuhan sebesar 2,01% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan NTP pada Triwulan I 2026 sebesar 3,95% (yoy) (Grafik 1.10).

Grafik 1.6. Perkembangan Komponen Indeks Penjualan Riil di DIY



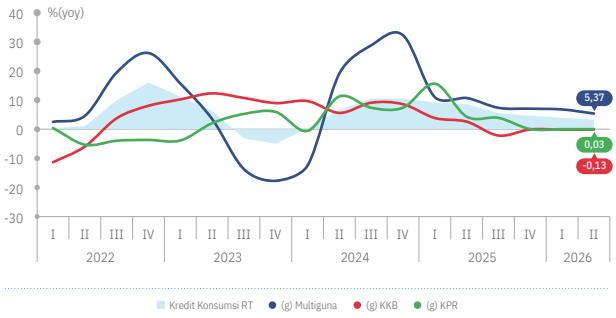
Sumber: Survei Penjualan Eceran (BI

Grafik 1.7. Perkembangan Kredit Konsumsi RT di DIY



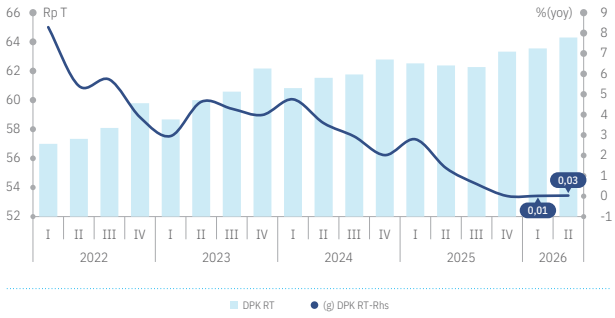
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.8. Perkembangan Komponen Kredit Konsumsi RT di DIY



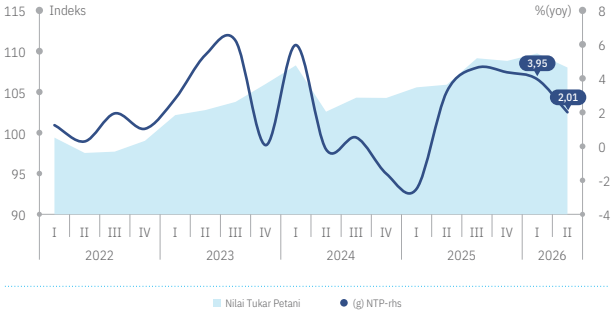
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.9. Perkembangan DPK RT di DIY



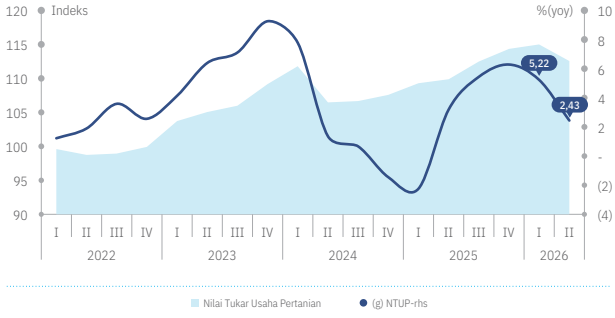
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.10. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) DIY



Sumber: BPS DIY

Grafik 1.11. Perkembangan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) DIY



Sumber: BPS DIY

Sejalan dengan itu, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) juga memiliki indeks di atas 100, yaitu berada pada level 112,55. Meskipun demikian, pertumbuhan NTUP DIY termoderasi dari 5,23% (yoy) menjadi 2,44% (yoy) pada triwulan II 2026. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa daya beli dan kondisi usaha rumah tangga petani masih terjaga, namun peningkatannya tidak sekuat triwulan sebelumnya, sehingga turut sejalan dengan moderasi pertumbuhan konsumsi RT DIY pada triwulan II 2026 (Grafik 1.11).

1.1.2. Konsumsi Pemerintah

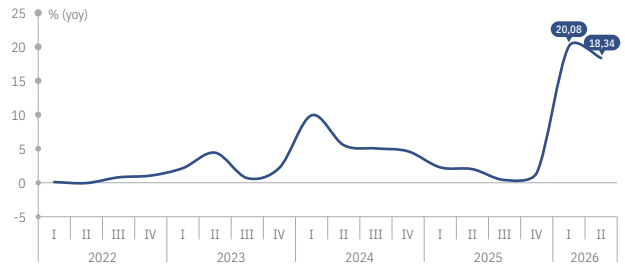
Konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 tetap tumbuh akseleratif. Kinerja konsumsi pemerintah tercatat 18,34% (yoy), lebih tinggi dari triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 20,08% (yoy) (Grafik 1.12). Kinerja konsumsi pemerintah yang tumbuh tinggi utamanya dipengaruhi oleh percepatan realisasi belanja barang dan jasa pemerintah. Meskipun demikian, terkontraksinya realisasi investasi oleh APBD dan kinerja program prioritas Pemerintah yang tidak memberikan layanan pada saat libur sekolah, menahan kinerja konsumsi pemerintah yang lebih tinggi pada triwulan berjalan.

Dari sisi APBN, kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 didukung oleh akselerasi realisasi Belanja Pemerintah Pusat, terutama belanja pegawai dan belanja barang, di tengah Transfer ke Daerah (TKD) yang masih terkontraksi secara nominal. Kinerja pelaksanaan APBN di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga 30 Juni 2026 menunjukkan kondisi fiskal yang relatif terjaga dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp4.785,97 miliar atau 43,98% dari target APBN sebesar Rp10.883,04 miliar. Capaian tersebut tumbuh sebesar 8,24% (yoy) secara nominal dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp3.334,43 miliar atau 41,19% dari target Rp8.096,10 miliar, meningkat 11,41% (yoy) secara nominal.

Secara lebih rinci, peningkatan penerimaan perpajakan terutama ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh signifikan sebesar 46,72% (yoy) menjadi Rp1.149,17 miliar serta Pajak Penghasilan (PPh) yang tumbuh 13,09% (yoy) menjadi Rp1.853,29 miliar. Sementara itu, penerimaan cukai tercatat sebesar Rp379,30 miliar atau terkontraksi 2,32% (yoy), sedangkan Bea Masuk meningkat 13,58% (yoy) menjadi Rp5,10 miliar. Perkembangan PPN dan PPh yang positif mengindikasikan masih terjaganya aktivitas ekonomi dan basis penerimaan perpajakan di DIY selama Semester I 2026.

Lebih lanjut, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih tumbuh positif secara nominal sebesar 1,62% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp1.451,53 miliar atau 52,08% dari target Rp2.786,94 miliar. Kinerja tersebut ditopang oleh

Grafik 1.12. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: BPS DIY

pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1.186,50 miliar yang tumbuh 1,65% (yoy), antara lain didukung oleh peningkatan pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan. Sementara itu, PNBP lainnya mencapai Rp265,04 miliar atau 99,82% dari target dan tumbuh 1,47% (yoy), antara lain didukung pendapatan pelayanan pertanahan dan bea lelang Pejabat Lelang Kelas I.

Dari sisi belanja negara, realisasi APBN DIY hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp10.134,85 miliar atau 51,55% dari pagu sebesar Rp19.660,28 miliar, meningkat 3,57% (yoy) secara nominal. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh akseleratif sebesar 22,71% (yoy) menjadi Rp5.282,91 miliar atau 45,93% dari pagu Rp11.503,00 miliar. Berdasarkan komponennya, Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp3.241,71 miliar dan tumbuh 15,12% (yoy), sementara Belanja Barang mencapai Rp1.414,25 miliar dan tumbuh 12,66% (yoy).

Pertumbuhan Belanja Pegawai terutama dikontribusikan oleh realisasi pada Kemendikti Saintek sebesar Rp671,12 miliar, Kementerian Pertahanan sebesar Rp612,27 miliar, dan Kepolisian RI sebesar Rp492,64 miliar. Sementara itu, peningkatan Belanja Barang antara lain didukung oleh belanja Kementerian Kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjutan di Unit Pelaksana Teknis sebesar Rp475,16 miliar, Kementerian Pertahanan untuk pelayanan kesehatan matra udara sebesar Rp102,60 miliar, serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air dan penanggulangan darurat akibat bencana sebesar Rp58,68 miliar.

Belanja Modal mencatatkan pertumbuhan paling tinggi sebesar 181,33% (yoy) menjadi Rp626,95 miliar atau 31,31% dari pagu Rp2.002,15 miliar. Akselerasi tersebut terutama didorong oleh sejumlah proyek strategis, antara lain pembangunan Bendungan Bener sebesar Rp167,81 miliar, Sekolah Rakyat sebesar Rp156,23 miliar, serta *Groundsill* Srandakan sebesar Rp55,96 miliar.

Sementara itu, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) masih tertahan secara nominal. Berdasarkan postur APBN, realisasi TKD mencapai Rp4.851,94 miliar atau 59,48% dari pagu Rp8.157,27 miliar. Meskipun persentase realisasi terhadap pagu membaik dibandingkan tahun sebelumnya, secara nominal TKD terkontraksi 11,47% (yoy) akibat efisiensi fiskal dan penurunan alokasi transfer. Kinerja TKD tersebut terutama ditopang oleh realisasi komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, dan Dana Keistimewaan DIY, sedangkan DAK Fisik belum terealisasi.

Secara lebih rinci, DAU memiliki realisasi Rp2.899,42 miliar atau 57,86% dari pagu yaitu sebesar Rp5.011,23 miliar. Dana Transfer Khusus mencapai Rp977,11 miliar atau 51,78% dari pagu dan terkontraksi 1,94% (yoy). Dana Keistimewaan DIY telah terealisasi Rp800 miliar atau 80% dari pagu Rp1 triliun. Di sisi lain, Dana Desa secara nominal mengalami kontraksi yang cukup dalam sejalan dengan lebih rendahnya pagu 2026 dibandingkan tahun 2025, sementara DAK Fisik belum mencatatkan realisasi.

Dalam pelaksanaan belanja tematik, APBN juga memberikan dukungan yang cukup kuat terhadap sektor prioritas di DIY. Pada sektor infrastruktur, dukungan K/L memiliki pagu Rp1,57 triliun dengan realisasi Rp686,16 miliar atau 43,51% dari pagu. Belanja tersebut antara lain mendukung pembangunan Groundsill Sungai Srandakan, Bendungan Bener, preservasi jalan koridor logistik, serta jaringan irigasi di sentra produksi lumbung pangan. Sementara itu, dukungan K/L untuk ketahanan pangan memiliki pagu Rp755,84 miliar dengan realisasi Rp335,71 miliar atau 44,42%, antara lain diarahkan untuk pendidikan vokasi pertanian, Gerakan Pangan Murah, prasarana pertanian, serta embung dan tampungan air.

Pada sektor kesehatan, dukungan K/L memiliki pagu Rp1,98 triliun dengan realisasi Rp745,30 miliar atau 37,58% dari pagu, sedangkan dukungan TKD kesehatan mencapai Rp80,34 miliar atau 45,24% dari pagu senilai Rp177,56 miliar. Dukungan tersebut antara lain digunakan untuk pengawasan obat dan makanan, penguatan laboratorium, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta Bantuan Operasional Keluarga Berencana. Sementara itu, pada sektor pendidikan, dukungan K/L terealisasi sebesar Rp524,70 miliar atau 50,83% dari pagu Rp1,03 triliun, sedangkan TKD pendidikan mencapai Rp851,14 miliar atau 49,13% dari pagu Rp1,73 triliun, antara lain untuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru, BOS, BOP PAUD, pendidikan kesetaraan, serta pengembangan perpustakaan daerah.

Dukungan fiskal terhadap aktivitas UMKM juga tetap kuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (Umi). Hingga 30 Juni 2026, penyaluran KUR di DIY

mencapai Rp2,74 triliun kepada 48.296 debitur atau tumbuh 17,11% (yoy). Penyaluran terbesar berada di Kabupaten Sleman sebesar Rp867,37 miliar, diikuti Bantul Rp783,49 miliar dan Gunungkidul Rp488,22 miliar. Berdasarkan sektor ekonomi, KUR utamanya disalurkan kepada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp891,18 miliar serta pertanian sebesar Rp675,10 miliar.

Sementara itu, penyaluran UMi mencapai Rp38,13 miliar kepada 6.969 debitur atau tumbuh 45,08% (yoy) pada triwulan II 2026. Penyaluran terbesar berada di Kabupaten Bantul sebesar Rp12,58 miliar, diikuti Gunungkidul dan Sleman, dengan sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran sebesar Rp36,04 miliar kepada 6.808 debitur.

Dari sisi APBD, peningkatan kinerja konsumsi pemerintah pada Triwulan II 2026 juga didukung oleh berlanjutnya akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah, terutama Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang masing-masing telah terealisasi sebesar 51,76% dan 38,99% dari pagu. Kinerja realisasi APBD Pemerintah Daerah DIY pada Triwulan II 2026 menunjukkan peningkatan sejalan dengan berlanjutnya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Pendapatan Daerah telah terealisasi sebesar 51,42% dari total pagu anggaran sebesar Rp15.889,72 miliar, dengan nilai realisasi mencapai Rp8.170,51 miliar. Capaian tersebut terutama ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp3.105,32 miliar atau 51,36% dari total pagu PAD sebesar Rp6.045,63 miliar. Sementara itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencatat realisasi sebesar Rp4.820,02 miliar atau 53,33% dari pagu Rp9.037,82 miliar. Pendapatan lainnya terealisasi sebesar Rp245,17 miliar atau 30,41% dari total anggaran sebesar Rp806,28 miliar.

Di sisi belanja, Belanja Daerah pada Triwulan II 2026 terealisasi sebesar Rp6.878,42 miliar atau 41,11% dari total pagu belanja sebesar Rp16.732,81 miliar. Berdasarkan kelompok belanja, realisasi tertinggi tercatat pada Belanja Pegawai sebesar Rp3.325,35 miliar atau 51,76% dari pagu Rp6.424,86 miliar, mencerminkan berlanjutnya realisasi belanja rutin pemerintah daerah hingga Semester I 2026. Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp2.006,79 miliar atau 38,99% dari pagu Rp5.146,99 miliar, menunjukkan semakin meningkatnya pelaksanaan kegiatan operasional dan program pemerintah daerah dibandingkan periode awal tahun.

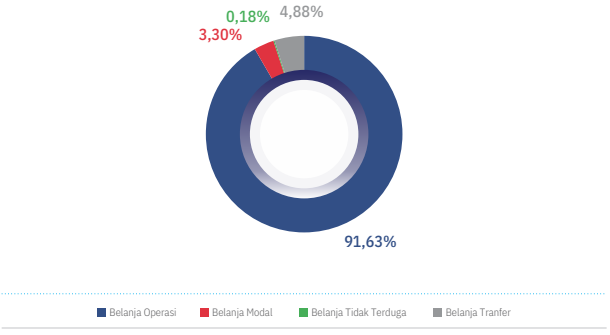
Lebih lanjut, realisasi Belanja Modal masih relatif terbatas sebesar Rp265,75 miliar atau 16,84% dari total pagu Rp1.578,58 miliar. Meskipun secara nominal dan persentase realisasi telah meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 yang baru mencapai Rp93,25 miliar atau 5,81% dari pagu, tingkat penyerapannya masih lebih rendah dibandingkan Belanja Pegawai maupun Belanja Barang dan Jasa. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan dan pengadaan aset pemerintah daerah masih berlangsung secara bertahap dan berpotensi mengalami akselerasi pada semester II 2026. Di sisi lain, Belanja Lainnya telah terealisasi sebesar Rp1.280,52 miliar atau 35,75% dari pagu Rp3.582,37 miliar.

Pada komponen pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp509,94 miliar atau 49,19% dari pagu sebesar Rp1.036,58 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp88,20 miliar atau 45,58% dari pagu Rp193,49 miliar. Secara keseluruhan, pembiayaan daerah mencatat realisasi bersih sebesar Rp421,74 miliar atau 50,02% dari anggaran pembiayaan daerah sebesar Rp843,09 miliar.

Secara keseluruhan, kinerja APBD DIY hingga Triwulan II 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan posisi Triwulan I 2026, terutama ditopang oleh akselerasi Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa. Perkembangan tersebut mengindikasikan semakin kuatnya realisasi belanja operasional pemerintah daerah pada Triwulan II 2026, meskipun realisasi Belanja Modal masih relatif terbatas dan berpotensi meningkat pada semester II seiring berlanjutnya pelaksanaan proyek pembangunan dan pengadaan pemerintah daerah.

Berdasarkan kontribusinya, belanja pemerintah di DIY didominasi oleh belanja operasi sebesar 91,63% dan belanja transfer 4,88%. Sementara belanja modal dan belanja tidak terduga masing-masing menyumbang 3,30% dan 0,18% dari total belanja pemerintah (Grafik 1.13).

Grafik 1.13. Pangsa Belanja Pemerintah Daerah

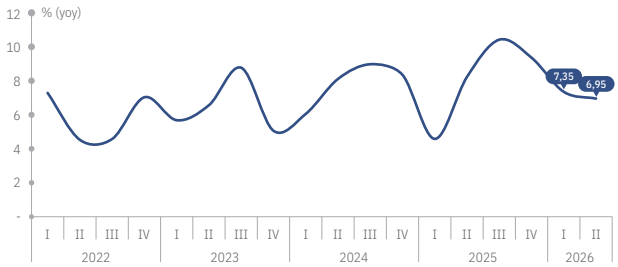


Sumber: BKAD & DJPb DIY

1.1.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Kinerja PMTB/investasi pada triwulan II 2026 tetap positif, meskipun termoderasi. Investasi DIY yang tecermin dari komponen PMTB pada triwulan laporan tumbuh sebesar 6,95% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 7,35% (yoy) (Grafik 1.14).

Grafik 1.14. Pertumbuhan Investasi

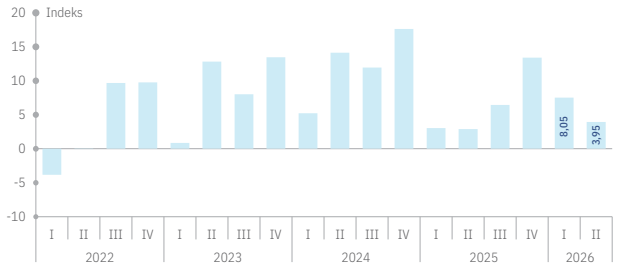


Sumber: BPS DIY

Pertumbuhan yang tetap positif tersebut terutama didorong oleh investasi bangunan maupun non bangunan seiring berlanjutnya proyek pembangunan eks Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tidak terdampak Inpres Realokasi Anggaran No.1 Tahun 2025. Kinerja PMTB utamanya didorong oleh pembangunan sejumlah infrastruktur fisik yang masih berlangsung, antara lain proyek tol Jogja-Solo, Tol Jogja-Bawen, pembangunan gedung DPRD DIY, proyek peningkatan kualitas infrastruktur jalan, termasuk pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dengan nilai konstruksi fisik rata-rata Rp1,8 miliar per unit untuk bangunan multifungsi.

Kinerja investasi yang tumbuh positif, namun melambat tecermin melalui indikator pembiayaan perbankan dan survei yang dilakukan Bank Indonesia kepada pelaku usaha. Berdasarkan indikator Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia kepada pelaku usaha, pada triwulan II 2026, kinerja Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Investasi sebesar 3,95%, termoderasi dibandingkan kinerja SBT Investasi pada triwulan I 2026 yang sebesar 7,52% (Grafik 1.15). Penurunan SBT Investasi mengindikasikan bahwa proporsi pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi mengalami moderasi, sejalan dengan kecenderungan dunia usaha yang lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi maupun penambahan kapasitas usaha pada periode laporan.

Grafik 1.15. Perkembangan SBT Investasi



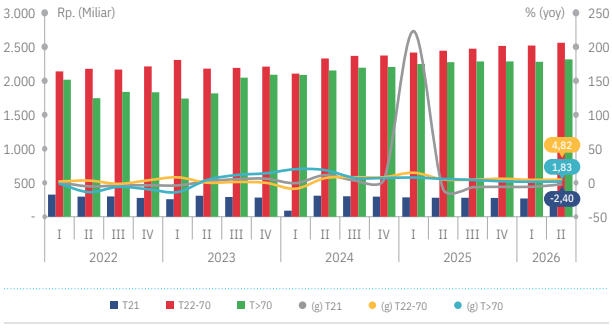
Sumber: Bank Indonesia

Sejalan dengan hal tersebut, tertahannya investasi bangunan turut terindikasi dari perkembangan pembiayaan pada sektor properti. Pada Triwulan II 2026, pertumbuhan kredit properti menunjukkan perkembangan yang relatif terbatas, terutama pada kelompok kredit properti dengan nilai hingga Rp21 miliar yang terkontraksi sebesar 2,41% (yoy). Sementara itu, kredit properti dengan nilai Rp22–70 miliar dan di atas Rp70 miliar masih tumbuh positif masing-masing sebesar 4,83% (yoy) dan 1,83% (yoy) (Grafik 1.16). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan untuk aktivitas investasi properti belum meningkat secara merata, khususnya pada segmen proyek bernilai lebih kecil, sehingga turut mencerminkan tertahannya ekspansi investasi bangunan pada Triwulan II 2026.

Senada dengan hal tersebut, investasi nonbangunan DIY juga menunjukkan perkembangan yang tertahan pada Triwulan II 2026. Berdasarkan realisasi investasi PMA dan PMDN, total investasi terkontraksi sebesar 0,19% (yoy), berbalik arah dibandingkan Triwulan I 2026 yang masih tumbuh sebesar 1,91% (yoy) (Grafik 1.17). Penurunan tersebut terjadi baik pada komponen Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN pada Triwulan II 2026 tercatat terkontraksi sebesar 0,27% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 1,65% (yoy). Sementara itu, PMA juga masih terkontraksi sebesar 0,22% (yoy), meskipun membaik dibandingkan kontraksi pada triwulan I 2026 yang sebesar 0,39% (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi baru maupun ekspansi usaha dari investor domestik belum cukup kuat untuk menopang akselerasi investasi DIY, di tengah investasi asing yang masih berada pada zona kontraksi.

Adapun secara sektoral, baik investasi domestik maupun asing, investasi masih terkonsentrasi pada sektor-sektor utama yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan lebih tinggi dan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian DIY (Grafik 1.18). Porsi investasi terbesar berada pada sektor industri lainnya yang

Grafik 1.16. Perkembangan Kredit Properti



Sumber: Bank Indonesia

mencapai 22% dari total investasi. Hal ini menunjukkan bahwa investor masih melihat sektor industri sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi DIY. Di posisi kedua, terdapat sektor Hotel dan Restoran dengan pangsa 15% terhadap total investasi di DIY. Hal ini mencerminkan optimisme investor terhadap prospek pariwisata DIY. Sebagai destinasi wisata unggulan nasional, kebutuhan terhadap akomodasi, fasilitas pendukung wisata, restoran, dan pusat kuliner masih menjadi daya tarik utama investasi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian DIY. Sektor konstruksi memiliki pangsa 14% dari total investasi di DIY. Besarnya investasi sektor konstruksi mengindikasikan masih tingginya aktivitas pembangunan fisik di DIY, baik pembangunan eks-Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti jalan tol Jogja-Solo, Jogja-Bawen, serta pembangunan kawasan komersial, hunian, fasilitas pendidikan, maupun infrastruktur penunjang ekonomi lainnya. Lebih lanjut, investasi pada sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (14%) menunjukkan peningkatan kebutuhan akan konektivitas, logistik, dan infrastruktur digital di DIY. Sementara itu, Jasa Lainnya (12%) mencerminkan berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa profesional yang sejalan dengan karakteristik DIY sebagai daerah berbasis pengetahuan dan jasa. Di sisi lain, Perdagangan dan Reparasi (10%) mengindikasikan optimisme investor terhadap aktivitas konsumsi dan distribusi barang, sedangkan Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (9%) menunjukkan masih berlanjutnya pengembangan properti dan fasilitas pendukung kegiatan usaha.

Apabila dilihat secara spasial, investasi di DIY mayoritas terdapat di Kabupaten Sleman dengan proporsi 57,14% dari total investasi di DIY. Hal ini sejalan dengan keberadaan Kawasan Pariwisata Prambanan-Ratuboko dan Kaliurang-Merapi sebagai destinasi unggulan pariwisata yang dimiliki Pemda DIY dan didorong untuk menjadi destinasi prioritas pada tahun 2025-2026. Adapun Kota Yogyakarta menjadi daerah yang memiliki pangsa investasi terbesar kedua dengan

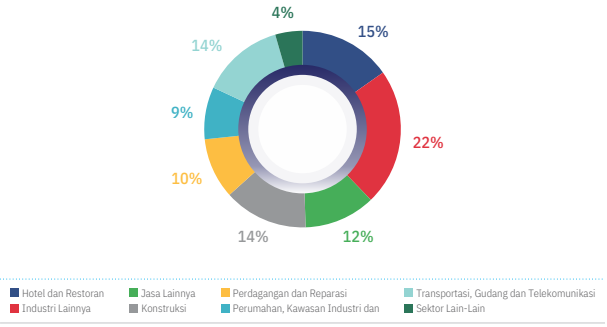
Grafik 1.17. Perkembangan Investasi PMA dan PMDN



Sumber: BKPM (diolah

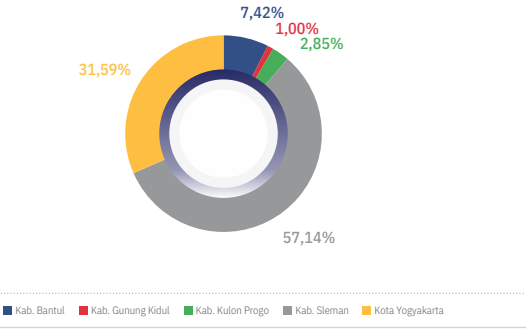
2. *Atau setara dengan Rp2,876 triliun (rerata kurs JISDOR IDR/USD periode triwulan II 2026 sebesar Rp17.544,00).*

Grafik 1.18. Sebaran Sektor Investasi di DIY



Sumber: BKPM (diolah)

Grafik 1.19. Pangsa Investasi PMA dan PMDN Per Spasial Triwulan II 2026



Sumber: BKPM (diolah)

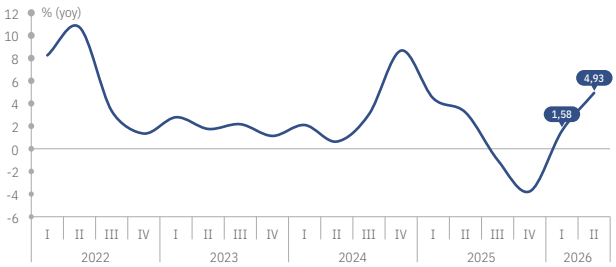
persentase 31,59% seiring dengan karakter Kota Yogyakarta yang memiliki ekosistem ekonomi, digital, infrastuktur dan aksesibilitas yang tinggi. Selanjutnya, Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul secara berturut-turut berada pada posisi 3 sampai 5 dengan persentase 7,42%; 2,85%; dan 1% (Grafik 1.19).

1.1.4. Ekspor Barang dan Jasa

Di tengah dinamika global, kinerja ekspor DIY tumbuh meningkat. Pada triwulan II 2026, ekspor DIY mencapai USD163,96 juta[2] atau tumbuh sebesar 4,93% (yoy), meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,58% (yoy) (Grafik 1.20).

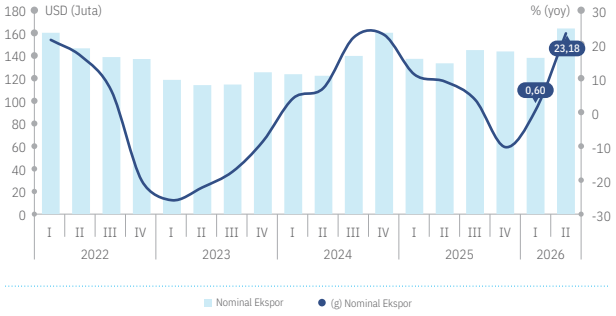
Kinerja ekspor DIY utamanya ditopang oleh performa ekspor luar negeri. Apabila dilihat berdasarkan nominal, ekspor luar negeri DIY triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 23,19% (yoy), lebih tinggi apabila dibandingkan dengan performa ekspor triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,60% (yoy) (Grafik 1.21). Peningkatan kinerja ekspor DIY utamanya didukung oleh ketahanan sektor manufaktur berorientasi ekspor, khususnya industri tekstil, pakaian jadi, dan produk rajutan. Kondisi ini juga mengindikasikan masih terjaganya permintaan pasar internasional terhadap produk tekstil dan garmen DIY yang memiliki daya saing ekspor tinggi.

Grafik 1.20. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa



Sumber: BPS DIY

Grafik 1.21. Perkembangan Nominal Ekspor Luar Negeri

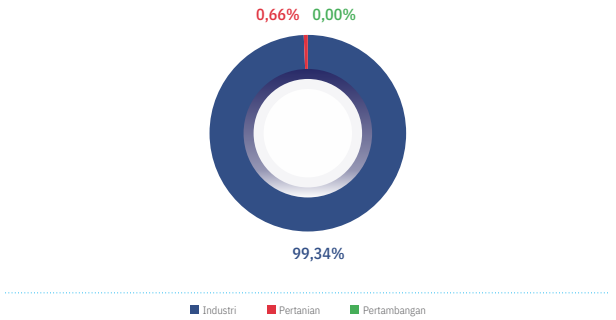


Sumber: BPS DIY

Adapun dari sisi ekspor barang, perkembangan ekspor DIY secara sektoral didominasi oleh LU industri pengolahan yang memiliki persentase 99,33% dari total ekspor dengan valuasi USD162,62 juta. Sementara itu, LU pertanian hanya memiliki pangsa 0,66% dari total ekspor DIY dengan valuasi USD689 ribu (Grafik 1.22).

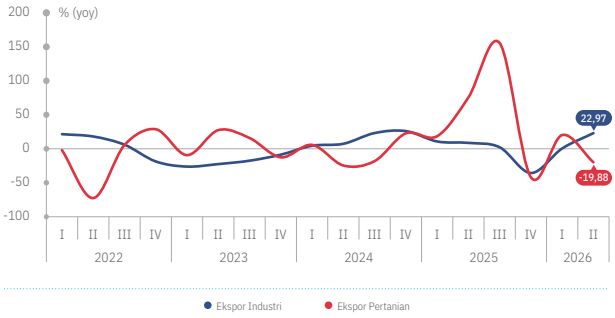
Berdasarkan kelompok barang, kinerja ekspor tumbuh positif di komoditas ekspor industri. Kinerja ekspor industri pada triwulan laporan mengalami peningkatan, yaitu tercatat tumbuh 22,97% (yoy), lebih tinggi dari capaian kinerja triwulan sebelumnya yaitu tercatat sebesar 0,43% (yoy). Sebaliknya, ekspor produk pertanian masih terkontraksi sebesar

Grafik 1.22. Pangsa Ekspor Barang DIY Per Sektor



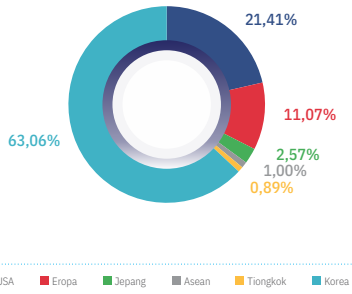
Sumber: BPS DIY

Grafik 1.23. Perkembangan Ekspor Pertanian dan Industri Pengolahan DIY



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.24. Pasar Ekspor Utama DIY



Sumber: BPS DIY

19,88% (yoy) pada triwulan II 2026, setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 20,18% (yoy) (Grafik 1.23).

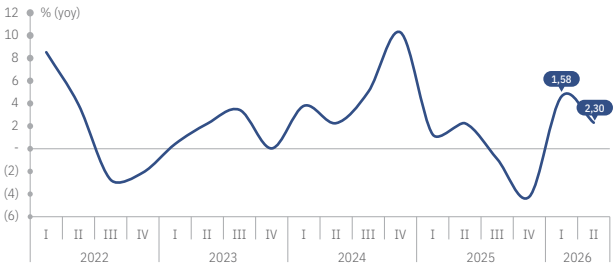
Adapun secara proporsi, 70% ekspor DIY pada April-Juni 2026 masih ditopang oleh industri padat karya dan industri kreatif berbasis manufaktur, khususnya tekstil, kulit, serta pengolahan kayu dan kerajinan, yang merupakan sektor unggulan ekspor DIY.

Berdasarkan negara/kawasan tujuan, pasar ekspor DIY masih relatif terdiversifikasi, meskipun Amerika Serikat menjadi pasar individual terbesar. Pangsa ekspor ke Amerika Serikat mencapai 21,41%, diikuti Eropa sebesar 11,07%, Korea sebesar 2,57%, Jepang sebesar 1,00%, dan ASEAN sebesar 0,89%. Sementara itu, negara tujuan lainnya secara agregat memiliki pangsa terbesar sebesar 63,06%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja ekspor DIY masih memiliki eksposur yang cukup besar terhadap perkembangan permintaan di Amerika Serikat dan Eropa, namun secara keseluruhan tujuan ekspor tersebar pada berbagai negara lainnya (Grafik 1.24).

1.1.5. Impor Barang dan Jasa

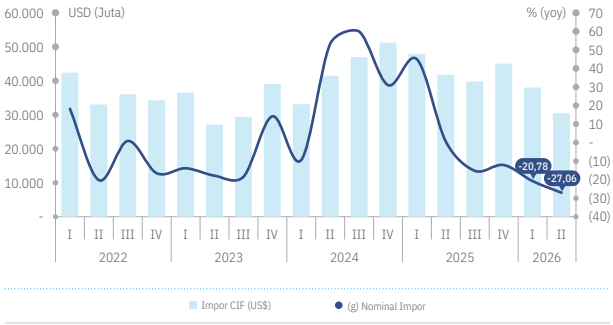
Kinerja impor DIY juga tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2026, impor DIY mencapai USD 30,46 Juta atau tumbuh 2,30% (yoy), melemah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,62% (yoy) (Grafik 1.25).

Grafik 1.25 .Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa



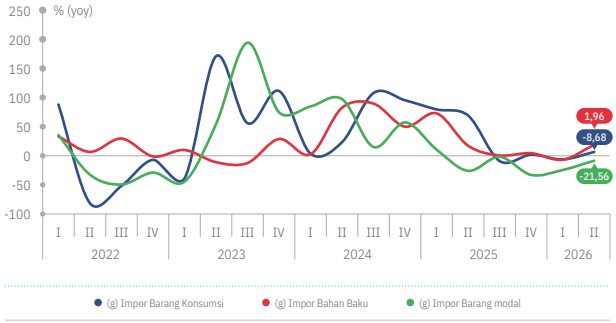
Sumber: BPS DIY

Grafik 1.26. Perkembangan Nominal Impor



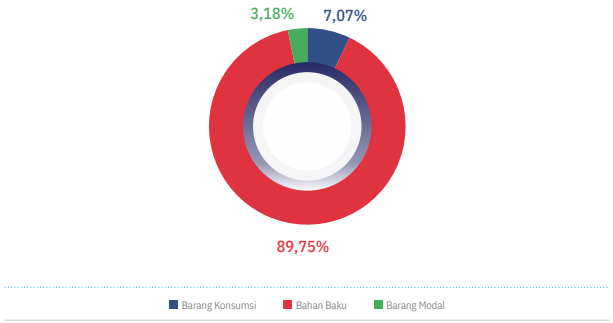
Sumber: Bea & Cukai

Grafik 1.27. Perkembangan Impor Berdasarkan Kelompok Barang



Sumber: BPS DIY

Grafik 1.28. Pangsa Impor Berdasarkan Kelompok Barang



Sumber: BPS DIY

Apabila dilihat berdasarkan nominalnya, impor luar negeri tercatat masih terkontraksi 27,06% (yoy) pada triwulan laporan, terkontraksi lebih dalam dari triiwulan sebelumnya yang terkontraksi 20,78% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 1.26).

Perlambatan kinerja impor barang dan jasa DIY pada triwulan II 2026 sejalan dengan masih tertahannya kinerja impor untuk barang konsumsi dan barang modal. Impor barang konsumsi dan barang modal masih berada pada zona kontraksi meskipun menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Impor barang konsumsi terkontraksi sebesar 8,68% (yoy), lebih dangkal dibandingkan kontraksi 19,71% (yoy) pada Triwulan I 2026. Sejalan dengan itu, impor barang modal juga masih terkontraksi cukup dalam sebesar 21,57% (yoy), meskipun membaik dibandingkan Triwulan I 2026 yang terkontraksi 35,27% (yoy). Berlanjutnya kontraksi barang modal mengindikasikan bahwa permintaan terhadap barang impor untuk mendukung ekspansi kapasitas dan investasi masih relatif terbatas.

Meskipun demikian, terdapat perbaikan kinerja impor terutama pada impor bahan baku. Impor bahan baku berbalik tumbuh sebesar 1,97% (yoy) setelah pada Triwulan I 2026 terkontraksi sebesar 20,16% (yoy). Perbaikan tersebut mengindikasikan meningkatnya kebutuhan input impor untuk mendukung aktivitas produksi domestik. Mengingat bahan baku merupakan komponen dominan dalam struktur impor DIY, perkembangan ini menjadi faktor yang menahan perlambatan impor lebih lanjut.

Berdasarkan pangsanya, struktur impor DIY masih didominasi oleh bahan baku dengan kontribusi sebesar 89,75% terhadap total impor. Sementara itu, barang konsumsi memiliki pangsa sebesar 7,07%, sedangkan barang modal sebesar 3,18% (Grafik 1.28). Dominasi bahan baku menunjukkan bahwa perkembangan impor DIY terutama berkaitan dengan kebutuhan input kegiatan produksi, sementara porsi impor yang secara langsung ditujukan untuk konsumsi dan pembentukan modal relatif terbatas.

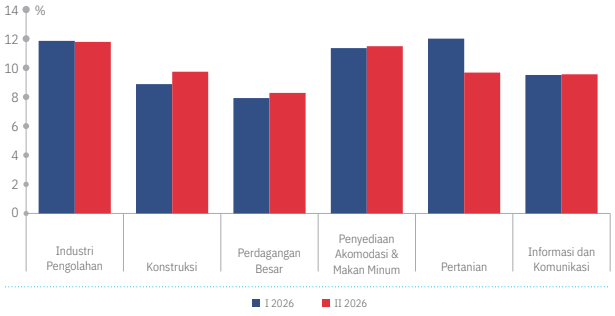
1.2. Komponen Penawaran (Lapangan Usaha)

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perekonomian DIY yang tetap tumbuh positif, meskipun termoderasi pada triwulan II 2026 ditopang oleh kinerja sejumlah LU utama, terutama LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, LU Informasi dan Komunikasi, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki pangsa sebesar 11,48% terhadap PDRB DIY pada triwulan II 2026 dan tumbuh sebesar 10,56% (yoy), meskipun termoderasi dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 11,59% (yoy). Sementara itu, LU Industri Pengolahan yang memiliki pangsa sebesar 11,78% tumbuh 5,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar 5,86% (yoy). Adapun LU Informasi dan Komunikasi memiliki pangsa sebesar 9,55% terhadap PDRB DIY dan tumbuh relatif stabil sebesar 4,59% (yoy), dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 4,63% (yoy).

Adapun kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 7,82% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 7,60% (yoy), dengan pangsa terhadap PDRB sebesar 9,73%. Penguatan juga terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 5,19% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,13% (yoy), dengan pangsa sebesar 8,28%. Di sisi lain, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki pangsa sebesar 9,67% mengalami perlambatan tajam dan hanya tumbuh 0,02% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 2,31% (yoy) (Grafik 1.29 dan Tabel 1.5).

Grafik 1.29. Pangsa Komponen Lapangan Usaha Utama pada Pertumbuhan PDRB DIY ADHB[4]



Sumber: BPS, DIY

1.2.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) termoderasi pada triwulan II 2026, LU Akmamin tercatat tumbuh sebesar 10,56% (yoy) pada triwulan laporan, melemah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 11,59% (yoy) (Grafik 1.30). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas masyarakat pasca festive season Ramadan dan periode HBKN Idulfitri serta Iduladha.

Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan mobilitas wisatawan domestik yang mengalami perlambatan pada periode laporan, Jumlah keberangkatan domestik tercatat terkontraksi sebesar 18,10% (yoy) pada Triwulan II 2026, setelah pada triwulan sebelumnya masih tumbuh sebesar 7,47% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan jumlah kedatangan domestik juga berbalik dari 6,80% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi kontraksi sebesar 16,02% (yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik 1.31). Penurunan mobilitas wisatawan domestik tersebut mengindikasikan berkurangnya intensitas perjalanan masyarakat dibandingkan triwulan sebelumnya, sehingga turut menahan permintaan terhadap jasa akomodasi serta makan dan minum di DIY.

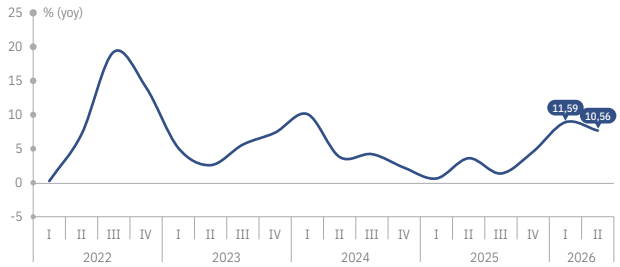
Tabel 1.3. Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2026 Sisi Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	(y-on-y)			(q-to-q)		
	IV 2025	I 2026	II 2026	IV 2025	I 2026	II 2026
Sisi Produksi	5,94	5,84	5,75	3,45	0,87	0,87
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,28	2,31	0,02	-13,86	40,02	-18,16
Pertambangan dan Penggalian	-0,29	4,25	1,93	-8,75	1,55	1,06
Industri Pengolahan	3,86	5,86	5,40	2,21	4,98	0,12
Pengadaan Listrik, Gas	5,82	3,17	13,98	4,96	-0,05	4,75
Pengadaan Air	1,56	5,17	7,00	1,59	3,52	1,70
Konstruksi	8,12	7,60	7,82	6,45	-15,99	9,24
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,74	5,13	5,19	1,10	1,23	2,66
Transportasi dan Pergudangan	5,68	5,74	4,99	3,48	0,80	4,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,99	11,59	10,56	15,32	-0,32	1,94
Informasi dan Komunikasi	4,58	4,63	4,59	2,85	0,71	1,21
Jasa Keuangan	3,41	-0,65	3,31	-1,12	0,39	3,50
Real Estate	5,96	5,89	4,41	2,04	0,01	1,63
Jasa Perusahaan	7,15	6,25	5,07	4,91	-4,76	7,26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,13	5,66	5,62	9,47	-2,36	1,10
Jasa Pendidikan	5,00	5,68	6,63	3,07	-3,07	3,40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,62	4,75	6,37	2,54	-2,14	4,30
Jasa lainnya	9,70	10,34	9,79	11,69	0,24	6,22

Sumber : BPS

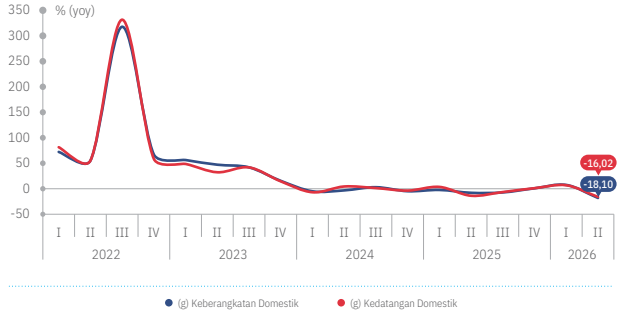
4. *ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku*

Grafik 1.30. Pertumbuhan LU Penyediaan Akmamin



Sumber: BPS DIY

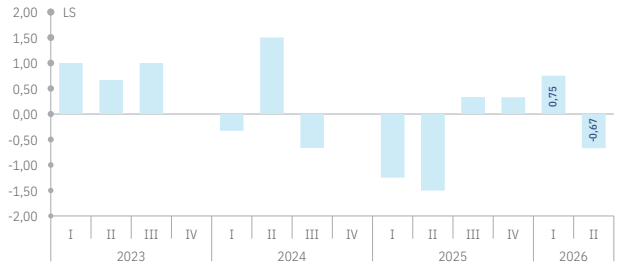
Grafik 1.31. Perkembangan Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Wisatawan Domestik



Sumber: BPS DIY

Penurunan kinerja LU Akmamin DIY pada triwulan II 2026 juga tecermin dari indikator survei *Liaison* Bank Indonesia, *Likert Scale* (LS) LU Akmamin melemah dari 0,75 pada triwulan I 2026, menjadi terkontraksi 0,67 di triwulan II 2026 (Grafik 1.32). Perkembangan tersebut mengindikasikan adanya penurunan kinerja penjualan pelaku usaha Akmamin pada periode laporan, sejalan dengan normalisasi permintaan pasca tingginya aktivitas masyarakat pada periode Ramadan dan HBKN Idulfitri serta menurunnya mobilitas wisatawan domestik.

Grafik 1.32. *Likert Scale* Penyediaan Akmamin



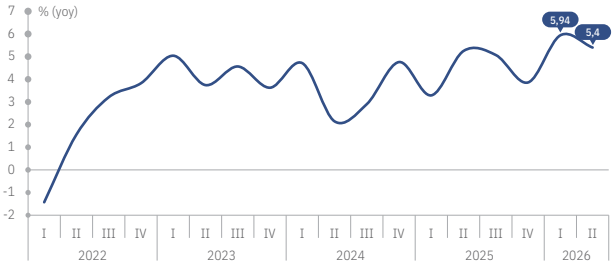
Sumber : Liaison Bank Indonesia

1.2.2. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan tetap tumbuh kuat pada triwulan II 2026, meskipun termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Industri Pengolahan tercatat tumbuh sebesar 5,40% (yoy) pada triwulan laporan, melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 5,94% (yoy) (Grafik 1.33). Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas produksi industri pengolahan masih terjaga, meskipun tidak sekuat triwulan sebelumnya seiring normalisasi permintaan pasca momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri yang pada triwulan I 2026 mendorong peningkatan produksi, terutama pada industri yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat.

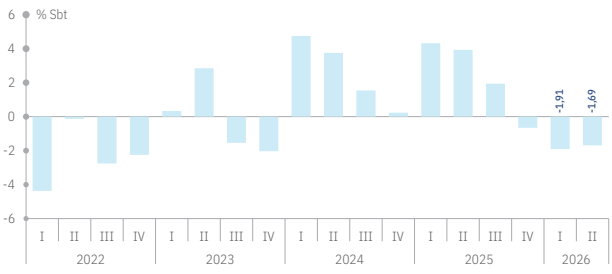
Moderasi kinerja LU Industri Pengolahan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha Industri Pengolahan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar -1,69%, membaik dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar -1,91%, namun masih berada pada zona negatif (Grafik 1.34). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa secara survei, aktivitas usaha industri pengolahan masih mengalami kontraksi, meskipun tekanan mulai berkurang dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan ini sejalan dengan pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan yang masih positif, namun mengalami moderasi pada periode laporan.

Grafik 1.33. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan



Sumber: BPS DIY

Grafik 1.34. Perkembangan SBT Industri



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (BI)

1.2.3 . Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan laporan tumbuh meningkat, Pertumbuhan LU Konstruksi pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 7,82% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 7,60% (yoy) (Grafik 1.35). Akselerasi tersebut mengindikasikan meningkatnya aktivitas pembangunan fisik pada periode laporan, setelah pada triwulan sebelumnya kegiatan konstruksi relatif tertahan seiring berlangsungnya periode Ramadan dan HBKN Idulfitri.

Kinerja konstruksi yang meningkat juga tecermin melalui indikator pembiayaan perbankan dan perkembangan konsumsi semen. Penyaluran kredit konstruksi pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 11,07% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,20% (yoy) (Grafik 1.36). Sejalan dengan hal tersebut, penjualan semen juga tumbuh akseleratif sebesar 8,85% (yoy) pada triwulan II 2026, setelah terkontraksi sebesar 14,37% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.37). Peningkatan kebutuhan material konstruksi tersebut mengindikasikan kembali meningkatnya kegiatan pembangunan fisik pada periode laporan.

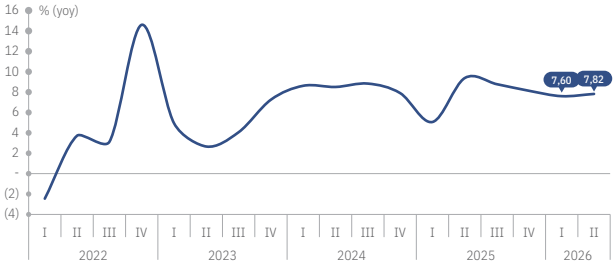
Lebih lanjut, berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), SBT Konstruksi meningkat dan kembali berada pada zona positif sebesar 3,98% pada triwulan II 2026, setelah berada pada zona negatif pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.38). Perkembangan SBT yang kembali berada pada zona positif menunjukkan meningkatnya aktivitas usaha pelaku konstruksi pada periode laporan, konsisten dengan akselerasi pertumbuhan LU Konstruksi, peningkatan penyaluran kredit konstruksi, serta perbaikan penjualan semen.

1.2.4. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh melambat pada triwulan I 2026. Pada triwulan II 2026, LU Pertanian tumbuh sebesar 0,02% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,25% (yoy) (Grafik 1.39). Melambatnya kinerja LU Pertanian utamanya dipicu oleh menurunnya produksi padi dan jagung pada triwulan II 2026 pasca berlalunya panen raya di beberapa wilayah lumbung pangan di DIY.

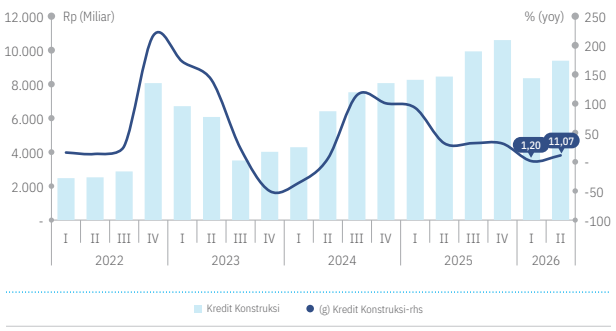
Kinerja LU Pertanian yang melambat terkonfirmasi melalui survei kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), pada triwulan II 2026, kinerja Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Pertanian sebesar 1,28%, termoderasi dibandingkan kinerja SBT Pertanian pada triwulan I 2026 yang berada pada level 1,70% (Grafik 1.40).

Grafik 1.35. Pertumbuhan LU Konstruksi



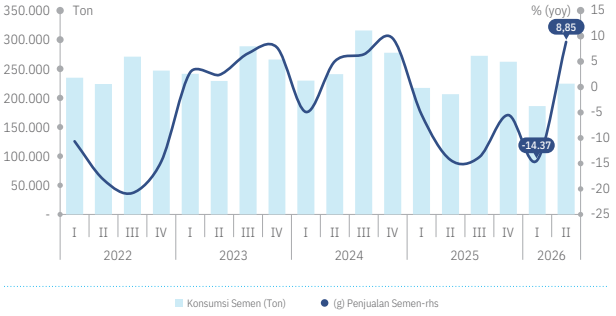
Sumber: BPS DIY

Grafik 1.36. Perkembangan Kredit Konstruksi



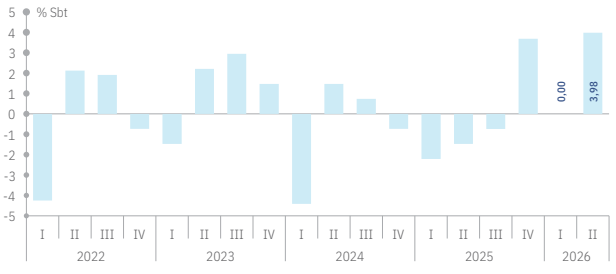
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.37. Perkembangan Kredit Konstruksi



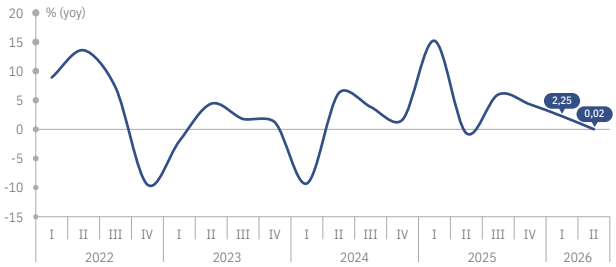
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

Grafik 1.38. Perkembangan SBT Konstruksi



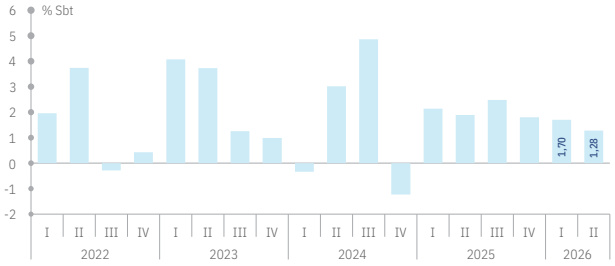
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (BI)

Grafik 1.39. Pertumbuhan LU Pertanian



Sumber: BPS DIY

Grafik 1.40. Perkembangan SBT Pertanian

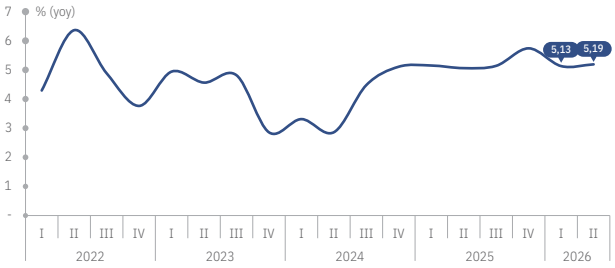


Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (BI)

1.2.5. Lapangan Usaha Perdagangan

LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan pada triwulan II 2026. Pada triwulan laporan, LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat tumbuh 5,19% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 5,13% (yoy) (Grafik 1.41). Kinerja tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan dan permintaan masyarakat tetap terjaga, meskipun telah melewati momentum peningkatan konsumsi selama Ramadan dan HBKN Idulfitri pada triwulan sebelumnya. Tetap kuatnya aktivitas perdagangan juga sejalan dengan konsumsi rumah tangga DIY yang masih tumbuh positif sebesar 4,80% (yoy) pada periode laporan.

Grafik 1.41. Pertumbuhan LU Perdagangan

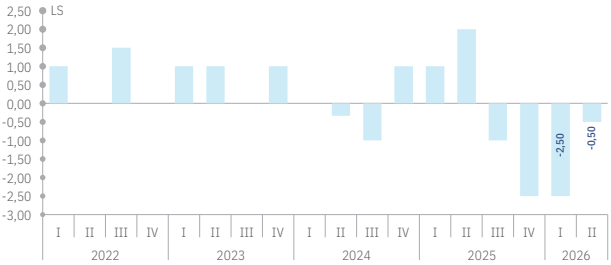


Sumber: BPS DIY

Perbaikan kinerja LU Perdagangan juga tecermin dari indikator survei *Liaison* Bank Indonesia, *Likert Scale* (LS) LU Perdagangan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar -0,50, membaik dibandingkan Triwulan I 2026 yang sebesar -2,50 (Grafik 1.42). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap penjualan pelaku usaha perdagangan mulai berkurang pada periode laporan, sejalan dengan tetap terjaganya aktivitas perdagangan secara agregat.

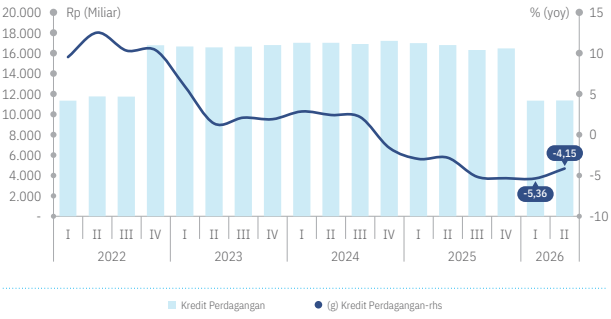
Dari sisi pembiayaan, dukungan perbankan terhadap aktivitas perdagangan menunjukkan perbaikan pada triwulan II 2026, Kredit perdagangan tercatat terkontraksi sebesar 4,15% (yoy), lebih dangkal dibandingkan kontraksi sebesar 5,36% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 1.43). Perbaikan tersebut mengindikasikan bahwa tekanan terhadap pembiayaan sektor perdagangan mulai berkurang, meskipun penyaluran kredit belum kembali tumbuh positif. Di tengah pembiayaan perbankan yang masih terbatas, LU Perdagangan tetap mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,19% (yoy), menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan pada periode laporan masih relatif terjaga.

Grafik 1.42. Perkembangan *Likert Scale* Perdagangan



Sumber : Liaison Bank Indonesia

Grafik 1.43. Perkembangan Kredit Perdagangan

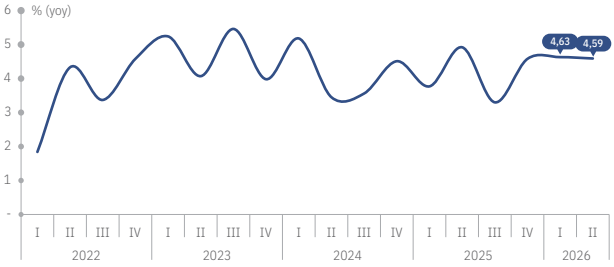


Sumber : Bank Indonesia

1.2.6. Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi

LU Informasi dan Komunikasi tumbuh melambat pada triwulan II 2026. Tercatat kinerja LU Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 4,59% (yoy) pada triwulan laporan, termoderasi dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 4,63% (yoy) (Grafik 1.44) . Kinerja LU Informasi dan Komunikasi DIY pada triwulan II 2026 yang termoderasi utamanya dipicu oleh normalisasi aktivitas digital masyarakat pasca periode Ramadan dan HBKN Idulfitri.

Grafik 1.44. Pertumbuhan LU Informasi dan Komunikasi



Sumber: BPS DIY







02

Perkembangan Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di DIY pada triwulan II 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan Tw I 2026, dan lebih rendah dari Inflasi Jawa dan Nasional. Secara umum, capaian tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% pada 2026. Selain itu, inflasi tahunan pada triwulan II 2026 juga disebabkan oleh peningkatan harga komoditas emas akibat ketidakpastian global yang masih berlanjut. TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) DIY bersama stakeholder di daerah terus memperkuat sinergi terkait upaya pengendalian inflasi melalui kerangka 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) dalam rangka menjaga kestabilan harga di DIY.

Inflasi DIY (%yoy)		Inflasi Jawa (%yoy)		Inflasi Nasional (%yoy)	
4,08	2,91	3,56	2,98	3,48	3,34
Triwulan I 2026	Triwulan II 2026	Triwulan I 2026	Triwulan II 2026	Triwulan I 2026	Triwulan II 2026

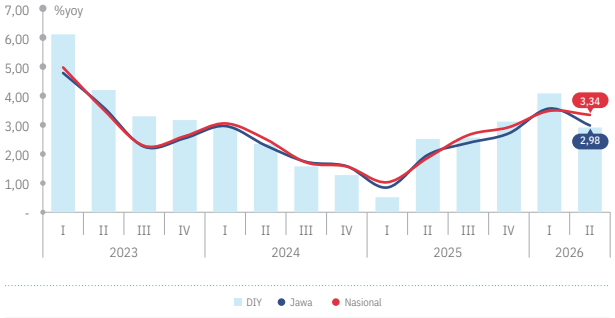
2.1. Perkembangan Inflasi Triwulan II 2026

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul sebagai kota IHK yang mewakili DIY tercatat mengalami inflasi yang terkendali pada triwulan II 2026. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi DIY pada triwulan II 2026 tercatat lebih rendah, yaitu sebesar 2,91% (yoy), dibandingkan inflasi triwulan I 2026 yang sebesar 4,08% (yoy) . Adapun realisasi Inflasi pada triwulan II 2026 turut lebih rendah jika dibandingkan capaian nasional sebesar 3,34% (yoy) dan capaian Jawa dengan angka inflasi sebesar 2,98% (yoy) (Grafik 2.1) . Jika dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya, inflasi gabungan kota IHK di DIY pada triwulan II 2026 tercatat lebih tinggi dari realisasi triwulan IV 2025 dan triwulan IV 2024 yang masing-masing sebesar 3,11% (yoy) dan 1,28% (yoy) (Grafik 2.2) .

Inflasi tahunan DIY pada triwulan II 2026 terutama dipicu oleh peningkatan harga komoditas emas seiring dengan ketidakpastian global yang masih tinggi. Selain itu, kenaikan harga bensin Pertamax yang berlaku pada 10 Juni 2026 turut mendorong IHK DIY lebih tinggi pada triwulan II 2026, Besaran inflasi DIY pada triwulan II 2026 lebih rendah dibanding triwulan I 2026 disebabkan oleh normalisasi besaran inflasi tarif listrik yang menyumbang andil inflasi tahunan pada triwulan I 2026.

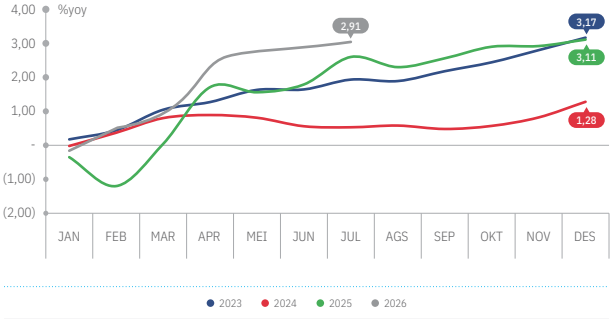
Berdasarkan kota IHK, inflasi Kota Yogyakarta pada triwulan II 2026 tercatat 3,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi Kabupaten Gunungkidul yang mencapai 2,69% (yoy). Inflasi tahunan Kota Yogyakarta yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Gunungkidul disebabkan oleh permintaan yang

Grafik 2.1. Inflasi DIY, Jawa dan Nasional (%yoy)



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.2. Inflasi Tahun Kalender DIY (%ytd)



Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.1. Perkembangan Inflasi DIY (% yoy)

Kelompok Inflasi	2025			2026	
	II	III	IV	I	II
Umum	2,52	2,56	3,11	4,08	2,91
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,46	4,25	5,00	2,76	2,54
Pakaian dan Alas Kaki	2,94	2,55	2,31	1,73	2,02
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,33	1,18	1,09	9,49	0,94
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,83	1,32	0,93	0,62	1,54
Kesehatan	1,66	1,16	0,44	0,37	0,96
Transportasi	0,66	0,54	1,22	0,35	3,87
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,08	-0,10	0,00	-0,02	0,98
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,37	0,62	1,15	0,59	1,80
Pendidikan	1,37	1,54	2,28	2,10	2,21
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,72	1,79	1,51	1,04	1,54
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	11,65	10,27	14,49	21,19	14,71

Sumber: BPS DIY, diolah
Keterangan: Angka realisasi sejak tahun 2024 dengan penambahan kota IHK baru, Kab. Gunungkidul

Tabel 2.2. Perkembangan Andil Inflasi DIY per Kelompok Pengeluaran (% yoy)

Kelompok Inflasi	2025			2026	
	II	III	IV	I	II
Umum	2,52	2,56	3,11	4,08	2,91
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,98	1,16	1,29	0,79	0,72
Pakaian dan Alas Kaki	0,12	0,11	0,10	0,07	0,08
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,23	0,20	0,19	1,50	0,16
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,08	0,06	0,04	0,03	0,07
Kesehatan	0,05	0,04	0,01	0,01	0,03
Transportasi	0,09	0,07	0,16	0,05	0,50
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,06
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,02	0,01	0,02	0,01	0,04
Pendidikan	0,08	0,10	0,14	0,13	0,13
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,16	0,17	0,14	0,10	0,14
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,72	0,65	0,92	1,39	0,98

Sumber: BPS DIY, diolah
Keterangan: Angka realisasi sejak tahun 2024 dengan penambahan kota IHK baru, Kab. Gunungkidul

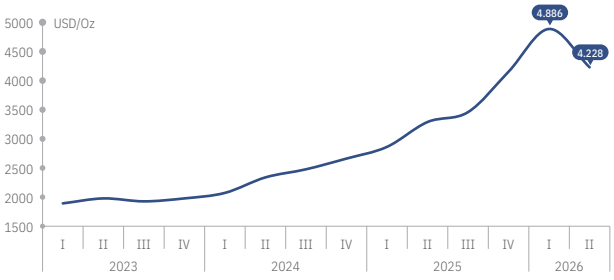
tinggi oleh penduduk kota terhadap kebutuhan nonpangan seperti emas perhiasan, bensin, angkutan udara, dan pembayaran akademi/perguruan tinggi. Sementara itu, kenaikan harga minyak goreng terjadi di kedua wilayah, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul, menjadi pemicu inflasi di wilayah DIY.Kenaikan harga minyak goreng tersebut dipicu oleh pasokan yang terbatas di tengah permintaan masyarakat yang tetap tinggi.

Ditinjau dari kelompok pengeluaran, tingkat inflasi pada triwulan II 2026 dipengaruhi oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 14,71% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan I 2026 sebesar 21,19% (yoy) . Meskipun lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya, kelompok ini masih memberikan andil inflasi tahunan yang dominan sebesar 0,98% (yoy), yang terutama disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasaan dengan andil inflasi sebesar 0,95% (yoy). Kenaikan harga emas dipengaruhi harga emas global (Grafik 2.3) seiring perkembangan ketidakpastian global yang tecermin dari meningkatnya *Global Risk Index* dan *Geopolitical Risk Index* dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya permintaan konsumen untuk komoditas emas sebagai aset *safe-haven* serta fluktuasi harga pada komoditas minyak kelapa sawit *(Crude Palm Oil)* secara global (Grafik 2.4) .

Sementara itu, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau turut menyumbang andil inflasi sebesar 0,72% (yoy) pada triwulan II 2026, meskipun tingkat inflasi dari kelompok ini lebih melandai menjadi sebesar 2,54% (yoy) pada triwulan II 2026 dari sebesar 2,76% (yoy) pada triwulan I 2026. Inflasi tersebut dipicu oleh kenaikan harga beras, minyak goreng, dan cabai rawit dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,11% (yoy), 0,10% (yoy), dan 0,08% (yoy) .Naiknya harga beras terjadi akibat kenaikan harga beras premium yang dipicu oleh peningkatan biaya produksi serta kenaikan harga gabah di tingkat petani. Selanjutnya, kenaikan harga minyak goreng dipicu oleh pasokan yang terbatas di tengah permintaan masyarakat yang tetap stabil tinggi. Sementara itu, inflasi tahunan pada komoditas cabai rawit pada akhir triwulan II 2026 disebabkan oleh kenaikan harga logistik yang turut memicu kenaikan harga komoditas tersebut. Bank Indonesia bersinergi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY terus berupaya melalui komitmen dan konsistensi dalam melanjutkan langkah pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan dan Sejahtera (GPIPS) dengan mengusung 7 (tujuh) program unggulan, di antaranya: 1) peningkatan produktivitas pangan strategis melalui optimalisasi *Good Agricultural Practices* (GAP), 2) penguatan pasca panen melalui hilirisasi pangan maupun penguatan kapasitas dan kelembagaan petani, 3) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), 4) dukungan fasilitasi distribusi pangan, 5) dukungan pelaksanaan operasi pasar/pasar murah/Gerakan Pangan Murah/Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), 6) penguatan neraca pangan, serta 7) penguatan koordinasi dan komunikasi.

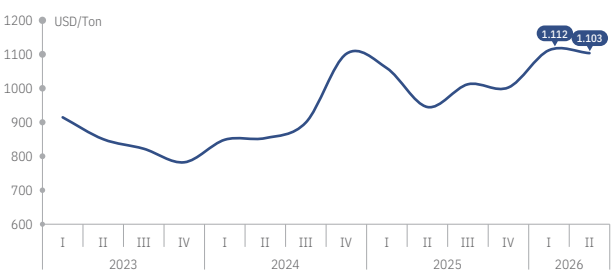
Selanjutnya, inflasi kelompok Transportasi pada triwulan laporan tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 3,87% (yoy) atau memberikan andil sebesar 0,50% (yoy), lebih tinggi dari triwulan I 2026 yang mengalami inflasi sebesar 0,35% (yoy) dengan andil sebesar 0,05% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, peningkatan inflasi disumbang oleh kenaikan harga bensin yang memberikan andil inflasi tahunan sebesar 0,27% (yoy) . Lebih rinci, harga bensin nonsubsidi secara rata-rata tercatat mengalami kenaikan pada triwulan II 2026. Mengacu pada rilis harga bahan bakar non-subsidi oleh Pertamina per 10 Juni 2026, harga Pertamax di DIY tercatat sebesar Rp16.250/L, Pertamax Turbo sebesar Rp20.750/L, Dexlite sebesar Rp23.000/L, dan Pertamina Dex sebesar Rp24.800/L, yang secara rata-rata keseluruhan mengalami kenaikan harga sebesar 49.26% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, Sejalan dengan hal tersebut, harga avtur mengalami kenaikan signifikan dari sebesar Rp15.484/L menjadi sebesar Rp26.122/L. Kenaikan harga pada bensin nonsubsidi serta avtur dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah global di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih tinggi. Kenaikan harga avtur turut memicu kenaikan harga pada tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,07% (yoy) .

Grafik 2.3. Perkembangan Harga Emas Global (USD/oz)



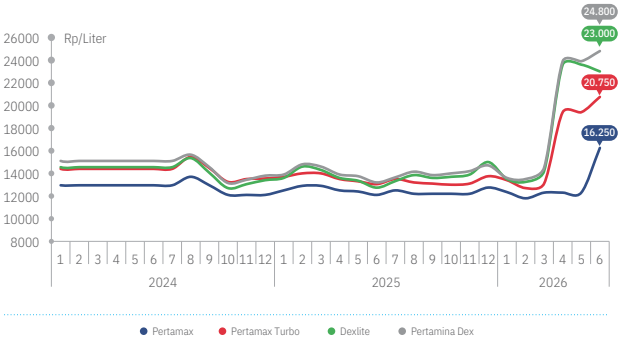
Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 2.4. Perkembangan Harga CPO Global (Usd/metric ton)



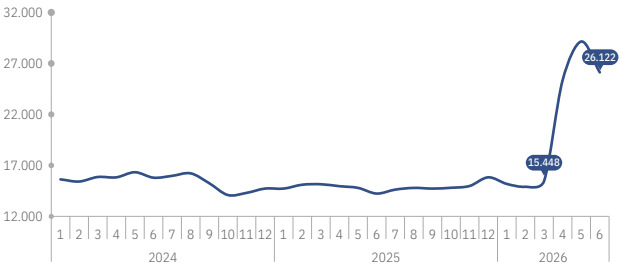
Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 2.5. Perkembangan Harga BBM (Rp/L)



Sumber: Pertamina, diolah

Grafik 2.6. Perkembangan Harga Avtur (Rp/L)



Sumber: Pertamina, diolah

Lebih lanjut, tingkat inflasi pada triwulan II 2026 turut dipengaruhi oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,16% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan andil inflasi triwulan I 2026 sebesar 1,50% (yoy) (Tabel 2.2) . Hal ini sejalan dengan perkembangan inflasi kelompok tersebut pada triwulan laporan yang tercatat sebesar 0,94% (yoy), lebih rendah dari triwulan I 2026 sebesar 9,49% (yoy) (Tabel 2.1) . Kenaikan inflasi tersebut dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar rumah tangga yang menyumbang andil inflasi sebesar 0,08% (yoy), serta harga sewa/kontrak rumah yang menyumbang andil inflasi sebesar 0,02% (yoy) . Harga bahan bakar rumah tangga pada periode laporan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya disebabkan oleh penyesuaian harga bahan bakar LPG nonsubsidi yang berlaku mulai pada 18 April 2026.

Kelompok Pendidikan pada triwulan II 2026 turut mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,13% (yoy), dengan besaran andil inflasi yang sama pada triwulan I 2026, Namun demikian, secara tahunan, inflasi kelompok Pendidikan pada triwulan II sebesar 2,21% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 2,10% (yoy). Inflasi tahunan dipicu oleh kenaikan tarif pendidikan khususnya pada akademi/perguruan tinggi yang memberikan andil inflasi sebesar 0,05% (yoy) dan tarif sekolah dasar yang memberikan andil inflasi sebesar 0,03% (yoy) .

Sejalan dengan itu, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran turut memberikan andil inflasi sebesar 0,14% pada triwulan II 2026, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang memberikan andil inflasi sebesar 0,10% (yoy). Hal ini sejalan dengan meningkatnya inflasi kelompok tersebut tercatat sebesar 1,54% (yoy) pada triwulan II 2026 dari inflasi pada triwulan I 2026 yang sebesar 1,04% (yoy) . Inflasi yang semakin terdorong dipicu oleh kenaikan harga pada komoditas nasi dengan lauk dengan andil inflasi sebesar 0,03% (yoy) sejalan dengan peningkatan harga dari komoditas pangan utama seperti beras.

Lebih lanjut, kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami peningkatan andil inflasi menjadi 0,8% (yoy) pada triwulan II 2026 dari semula sebesar 0,7% (yoy) pada triwulan I 2026. Sejalan dengan hal itu, inflasi kelompok ini mencatatkan peningkatan inflasi menjadi 2,02% (yoy) pada triwulan II 2026 dari sebelumnya mengalami inflasi sebesar 1,73% (yoy) pada triwulan I 2026. Tekanan inflasi kelompok Pakaian dan Alas Kaki terutama dipicu oleh inflasi subkelompok pakaian sebesar 2,12% (yoy), sejalan dengan kenaikan permintaan seragam sekolah menjelang tahun ajaran baru.

Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga turut memberikan inflasi sebesar 0,07% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan andil inflasi pada triwulan I 2026 sebesar 0,03% (yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, inflasi tahunan kelompok ini mengalami peningkatan sebesar 1,54% (yoy) dari semula 0,62% (yoy) pada triwulan I 2026. Tekanan inflasi kelompok ini terutama dipicu oleh subkelompok furnitur, perlengkapan, dan karpet dengan inflasi sebesar 6,33% (yoy).

2.2. *Tracking* Inflasi Triwulan III 2026

Memasuki triwulan III 2026, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kota inflasi di DIY tetap terjaga. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) di DIY tercatat secara tahunan pada Juli 2026 mengalami inflasi sebesar 2,54% (yoy) dan secara bulanan mengalami deflasi sebesar 0,31% (mtm) . Besaran inflasi DIY secara tahunan lebih rendah dibandingkan besaran inflasi Jawa dan inflasi Nasional yang masing-masing sebesar 2,64% (yoy) dan 2,88% (yoy) .

Berdasarkan kota IHK, Kota Yogyakarta pada Juli 2026 juga secara tahunan mengalami inflasi sebesar 2,83% (yoy) meskipun mengalami deflasi bulanan sebesar 0,17% (mtm). Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi tahunan mencapai 2,30% (yoy) dan mengalami deflasi bulanan sedalam 0,42% (mtm) .

Secara tahunan, inflasi yang terjadi di DIY disebabkan oleh inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,40% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,90% (yoy) (Tabel 2.3). Penyebab utama inflasi pada kelompok ini adalah kenaikan harga emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,86%(yoy) . Kenaikan harga emas dipengaruhi oleh harga emas global sepanjang 2026 dibandingkan tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik.

Selanjutnya, inflasi tahunan yang terjadi di DIY dipicu oleh Kelompok Transportasi dengan inflasi sebesar 4,51% (yoy), dengan andil sebesar 0,58% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, peningkatan inflasi pada kelompok ini disumbang oleh kenaikan harga bensin yang memberikan andil inflasi tahunan sebesar 0,35% (yoy) . Lebih rinci, harga bensin nonsubsidi secara rata-rata tercatat mengalami kenaikan pasca penyesuaian pada 10 Juni 2026, dengan tarif bensin nonsubsidi Pertamax yang masih tetap tinggi pada tarif Rp16.200/L.

Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut mengalami inflasi sebesar 1,31% (yoy) dan andil inflasi sebesar 0,37% (mtm). Kenaikan pada kelompok komoditas tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga beras dan minyak yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,10% (yoy) dan 0,09% (yoy) . Adanya peningkatan harga gabah serta keterbatasan pasokan minyak goreng menjadi faktor yang mendukung kenaikan harga dari komoditas tersebut.

Tekanan IHK gabungan kota di DIY pada triwulan III 2026 diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan II 2026. Prakiraan tersebut dipicu oleh prakiraan dampak dari puncak El-Nino yang terjadi pada triwulan III 2026 dapat menyebabkan penurunan produktivitas tanaman pangan apabila dibandingkan dengan produktivitas pada periode yang sama pada tahun 2025. Selanjutnya, tekanan inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan dikarenakan relatif stabilnya inflasi kelompok hortikultura seiring dengan cuaca cerah yang mendukung, serta peningkatan kapasitas dari sisi hulu yang telah terlaksana pada tahun sebelumnya melalui implementasi *Good Agricultural Practices* (GAP), dan replikasi Pasar Lelang Cabai yang telah terlaksana di seluruh Kabupaten di DIY. Selain itu, inflasi secara umum diproyeksikan tetap terjaga didukung oleh upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY untuk menjaga kestabilan inflasi melalui GPIPS dalam koridor 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) . Hingga Juli 2026, telah dilaksanakan berbagai upaya dan rencana jangka pendek ke depan, antara lain kondisi tersebut didukung oleh upaya TPID DIY dalam kerangka 4K, melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, dan Pasar Murah berdasarkan 3Tepat (Tepat Waktu, Tepat Lokasi, dan Tepat Sasaran) oleh TPID se-DIY untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Tabel 2.3. Perkembangan Inflasi DIY Triwulan III* 2026 per Kelompok Pengeluaran (% yoy)

Kelompok Inflasi	III 2026*	
	Inflasi	Andil
Umum	2,54	2,54
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,31	0,37
Pakaian dan Alas Kaki	1,95	0,08
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,95	0,16
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,74	0,08
Kesehatan	1,04	0,03
Transportasi	4,51	0,58
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,02	0,06
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,98	0,03
Pendidikan	1,71	0,11
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,46	0,14
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	13,40	0,90

Sumber: BPS DIY, diolah
Keterangan: *) realisasi per Juli 2026

Komitmen pengendalian inflasi tersebut turut diperkuat melalui sinergi pemantuan harga dan pasokan secara intensif di seluruh kabupaten dan kota di DIY guna memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga serta mendukung stabilitas harga di DIY.

2.3. Program Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan II 2026

Berbagai upaya dan forum koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi DIY telah dilakukan di sepanjang triwulan II 2026 bersinergi dengan TPID DIY dan *stakeholder* terkait. Keseluruhan langkah pengendalian inflasi tersebut dilaksanakan dengan mengimplementasikan kerangka 4K sesuai Peta Jalan TPID DIY Tahun 2025-2027, diantaranya:

i. **Aspek Keterjangkauan Harga:**
   a. Penyelenggaraan Operasi Pasar/Gelar Pangan Murah/Pasar Murah/SPHP dengan berdasarkan 3Tepat (Tepat Lokasi, Tepat Waktu, dan Tepat Sasaran) yang telah dilaksanakan sebanyak 235 kali di seluruh kabupaten/kota, termasuk Pasar Pantauan.
   b. Optimalisasi Kios Segoro Amarto serta Warung MRANTASI di Yogyakarta, serta Toko Simbok Kendil di Kabupaten Gunung Kidul sebagai price reference store yang berhak memperoleh sejumlah manfaat, diantaranya: 1) prioritas alokasi pasokan dari Bulog, 2) prioritas alokasi subsidi pada pelaksanaan Operasi Pasar, 3) prioritas akses penyaluran pembiayaan KUR oleh BPD DIY.

c. Pemantauan harga dan pasokan langsung ke produsen, distributor, hingga pedagang ritel untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pada momentum bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri, yang telah terlaksana pada 24 Februari s,d 2 Maret 2026 di seluruh kabupaten/kota di DIY; serta pemantauan harga, pasokan, dan kesehatan hewan untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan hewan ternak yang telah terlaksana pada 5 s,d 12 Mei 2026 di seluruh kabupaten/kota di DIY; serta
d. Fasilitasi subsidi ongkos angkut komoditas pangan strategis dari distributor ke pedagang di pasar tradisional dan juga sewa kendaraan untuk pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

ii. Aspek Ketersediaan Pasokan:

a. Penguatan data dan informasi melalui pengembangan Neraca Pangan yang dapat diakses melalui website https://tpid,jogjaprov,go,id;
b. Pengembangan fitur *Geographic Information System* (GIS) pada sebagai geoportal dalam optimalisasi monitoring produksi dan penggunaan lahan pertanian di DIY, termasuk pemetaan lokasi SPPG untuk mendukung ketersediaan pasokan di MBG.
c. Pemda DIY bekerjasama dengan Perum Bulog DIY terkait Pengelolaan Pangan yang Terintegrasi di Wilayah DIY untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan strategis milik pemerintah, termasuk untuk penyaluran beras SPHP dan minyak goreng "Minyak Kita" .
d. Integrasi data neraca pangan antar-daerah melalui sumber data Big Data Inflasi yang diinisiasi dan dikembangkan oleh KPw BI DIY dan TPID DIY dan terkoneksi dengan beberapa aplikasi Kabupaten dan/Kota, termasuk SIGAPAN (Sistem Informasi Harga Pangan) Bantul, SIHARPA (Sistem Informasi Harga Pangan) Sleman, Sikepoku (Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok) Kulon Progo.
e. Pelaksanaan *Capacity Building* Proyeksi Neraca Pangan pada tanggal 24 Juni 2026 se-DIY sebagai upaya penyelerasan proyeksi, serta peningkatan pemahaman perserta dalam penyusunan data ketersediaan pangan secara akurat dan berkelanjutan.
f. Implementasi Padi Galon oleh masyarakat Gunungkidul melalui metode menanam padi di pekarangan rumah menggunakan galon air mineral bekas sebagai media tanam pengganti sawah dengan produktivitas hasil per galon sebanyak 300 gram s.d 500 gram padi.

iii. Aspek Kelancaran Distribusi:

a. TPID DIY melakukan pengembangan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebagai bentuk komitmen menjaga kelancaran arus barang, baik secara intra maupun antar Provinsi. Hal itu mengacu pada Berita Acara No, 500/2847 tentang Komitmen Bersama Mendorong Kemandirian Pangan dalam rangka Menjaga Kestabilan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi DIY oleh Gubernur DIY dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-DIY, Selain dengan adanya 12 KAD yang telah terjalin pada 2025, pada tahun 2026 telah dilaksanakan 14 (empat belas) KAD secara *Business to Business* antara PPHPM Sleman, Kelompok Tani Sido Dadi Kulon Progo, dan Kelompok Tani Gisik Pranaji Kulon Progo dengan PT Sarana Pangan Madani, PT Riau Pangan Bertuah, dan Koperasi Pro Aktif Pangan Solutif Syariah; Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kabupaten Bantul serta Kabupaten Sleman.
b. Memperluas pemanfaatan pasar lelang digital dan mendorong pedagang lokal untuk turut berpartisipasi dalam proses lelang komoditas hortikultura untuk kemudian memasarkan ke pasar lokal yang saat ini telah dilaksanakan pada Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul.

iv. Aspek Komunikasi Efektif:

a. Penyelenggaraan HLM yang diinisiasi oleh TPID DIY dan TPID kabupaten/kota di DIY dalam rangka menjelang HBKN Idul Fitri 2026 pada tanggal 13 Februari 2026 yang diikuti oleh HLM TPID Kabupaten Bantul pada 20 Februari 2026 yang dipimpin oleh Wakil Bupati, HLM TPID Kabupaten Sleman pada 24 Februari 2026 yang dipimpin oleh Bupati, dan HLM Kota Yogyakarta pada 25 Februari 2026 yang dipimpin oleh Walikota.
b. Penyelenggaraan HLM yang diinisiasi oleh TPID Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mitigasi potensi El-Nino, dengan penyelenggaraan HLM pada 24 Juni 2026 yang dihadiri oleh Bupati.
c. Penyelenggaraan HLM yang diinisiasi oleh TPID se-DIY sebagai forum Monitoring dan Evaluasi Inflasi Semester I 2026, dengan penyelenggaraan HLM pada 23 Juli 2026 yang dihadiri oleh Gubernur DIY dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-DIY.
d. Pelaksanaan *press conference* hasil pemantauan menjelang HBKN Idulfitri 2026 yang terlaksana pada 4 Maret 2026.
e. Pelaksanaan *press conference* hasil pemantauan menjelang HBKN Iduladha 2026 yang terlaksana pada 18 Mei 2026.

f. Pelaksanaan rapat koordinasi teknis monitoring Peta Jalan Realisasi Pengendalian Inflasi triwulan I 2026 pada 16 April 2026.
g. Penayangan Iklam Layanan Masyarakat Belanja Bijak pada radio serta videotron bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.
h. Pelaksanaan *capacity building* tim teknis TPID DIY dalam mendukung penulisan *One Page Summary* (OPS) TPID pada 28 Januari 2026.
i. Pelaksanaan *capacity building* dan *study visit* TPID se-DIY ke Provinsi Kalimantan Selatan pada 20-23 April 2026 dengan tema Penguatan Inovasi Program Unggulan TPID dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Stabilitas Inflasi Daerah.
j. Pelaksanaan *capacity building* laporan kinerja TPID Kabupaten Gunungkidul pada 4 Juni 2026.
k. Pelaksanaan MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) Goes to School yang telah terlaksana pada 4 s,d 11 Mei 2026 di seluruh kabupaten/kota di DIY dengan total 690 peserta dari guru dan siswa tingkat SMA/SMK/MA se-DIY.
l. Pelaksanaan MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang telah terlaksana pada 9 Juni 2026, serta dukungan pemberian 10.000 bibit cabai rawit ke 66 kalurahan sebagai bentuk penguatan ketahanan pangan rumah tangga melalui Gerakan Budidaya Cabai hingga tingkat rumah tangga.
m. Pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Tematik diselenggarakan pada 30 Juli 2026 di Kota Yogyakarta dengan melibatkan sekitar 100 peserta yang terdiri atas petani, penyuluh pertanian, dan pemangku kepentingan sektor pertanian di DIY, Kegiatan menghadirkan narasumber dari BMKG, Stasiun Klimatologi DIY, Bank Indonesia DIY, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap cuaca ekstrem dan risiko El Niño guna mengurangi potensi gagal panen. Kegiatan ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan DIY melalui peningkatan literasi iklim dan sinergi antarinstansi dalam mendukung sektor pertanian yang lebih tangguh.
n. Koordinasi replikasi social movement Bantu Petani oleh Masjid Nurul Ashri ke lembaga lainnya untuk perluasan program penyerapan produksi sayuran dan buah dalam upaya menjaga keseimbangan harga dan kesejahteraan petani di DIY melalui gerakan masyarakat.
o. Inisiasi program literasi tani di Bantul yang melibatkan 32 sekolah (SD-SLB) untuk praktik bercocok tanam (cabai, tomat, terong) guna menumbuhkan minat generasi muda sejak dini.
p. Koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) yang akan diperluas ke Universitas, Pesantren, serta pedagang pasar.
q. Komunikasi efektif dalam rangka pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat melalui kampanye belanja bijak dengan memaksimalkan *omni-channel,* seruan diversifikasi pangan, dan *press conference* hasil sidak harga di beberapa pasar pantauan yang tersebar di seluruh wilayah DIY; serta
r. Keikutsertaan TPID DIY secara rutin dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang langsung dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam rangka mendukung keselarasan dan kesinambungan program TPID DIY dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) .

BOKS 1

High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Se-DIY Monitoring dan Evaluasi Inflasi DIY Semester I Tahun 2026: Upaya Pengendalian Inflasi DIY di Tengah Dinamika Energi, Cuaca, dan Aktivitas Konsumsi Wisatawan



Diskusi dan Arahan Gubernur DIY pada HLM TPID se-DIY Semester I 2026

Guna memperkuat sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi di daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KPw BI DIY) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY dan para pemangku kepentingan terkait menyelenggarakan *High Level Meeting* (HLM) TPID DIY pada 23 Juli 2026, mengangkat tema "Monitoring dan Evaluasi Inflasi DIY Semester I Tahun 2026: Upaya Pengendalian Inflasi DIY di Tengah Dinamika Energi, Cuaca, dan Aktivitas Konsumsi Wisatawan".

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Daerah beserta jajaran Forkopimda se-DIY, anggota TPID se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pertemuan diawali dengan pengantar Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, yang menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana strategis untuk mengevaluasi capaian pengendalian inflasi DIY sepanjang Semester I 2026, memetakan tantangan dan risiko inflasi pada Semester II 2026, serta merumuskan langkah pengendalian melalui penguatan strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Forum tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, BUMD, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi DIY yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, memaparkan perkembangan dan prospek inflasi DIY terkini. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi DIY pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,91% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun tetap berada dalam rentang sasaran dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy). Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, inflasi DIY sepanjang 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional 2,5±1% (yoy), dengan prasyarat utama terjaganya kecukupan pasokan bahan pangan pokok strategis.

BOKS 1



HLM TPID se-DIY Semester I 2026 dihadiri oleh Gubernur DIY, jajaran Forkopimda DIY, dan Kepala Daerah se-DIY

Pembahasan lebih lanjut menyoroti tiga tantangan utama yang perlu diwaspadai. Pertama, dinamika cuaca dan potensi El Nino yang berisiko menekan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan ternak. Kedua, rambatan kenaikan harga energi global terhadap harga BBM nonsubsidi yang berpotensi memengaruhi produk turunan minyak dan komoditas pangan. Ketiga, peningkatan kunjungan wisatawan yang secara historis turut mendorong tekanan inflasi musiman melalui kenaikan permintaan konsumsi.

Mencermati risiko inflasi ke depan, disepakati tiga rekomendasi utama yang perlu ditindaklanjuti melalui sinergi TPID se-DIY, yaitu (1) memperkuat mitigasi rambatan kenaikan harga energi melalui fasilitasi distribusi pangan dan pasar murah berbasis prinsip 3Tepat, penjaminan ketersediaan kuota BBM bersubsidi untuk kegiatan pertanian, serta dorongan bertahap konversi bahan bakar pertanian ke listrik atau tenaga surya; **(2) memperkuat antisipasi risiko El Nino** melalui pemetaan wilayah terdampak yang ditindaklanjuti dengan Sekolah Lapang Iklim bagi petani, sinergi modifikasi cuaca bersama BMKG, pengembangan benih unggul, serta penguatan kemandirian pangan rumah tangga; serta **(3) meningkatkan akurasi perencanaan kebutuhan pangan** melalui pemanfaatan data geoportal dan mobilitas masyarakat dalam penyusunan neraca pangan sebagai basis pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang efektif dan efisien. Ketiga langkah tersebut perlu diperkuat dengan pelibatan aktif akademisi melalui kajian dan pengabdian bersama TPID, agar kebijakan pengendalian inflasi semakin berbasis riset, implementatif, dan sesuai karakteristik daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas harga dinilai tidak hanya menjaga daya beli dan kepastian berusaha, tetapi juga mencerminkan efektivitas kebijakan dalam melindungi masyarakat dari gejolak harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Gubernur DIY turut mengapresiasi capaian TPID DIY sebagai Provinsi Terbaik Kedua kategori Pengendalian

BOKS 1

Inflasi se-Jawa dan Bali Tahun 2026, yang diharapkan menjadi modal untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi di DIY.

Memasuki Semester II 2026, Gubernur DIY menekankan tujuh langkah prioritas yang perlu menjadi fokus TPID, yaitu (1) memperkuat produksi pangan melalui perluasan dukungan alat dan mesin pertanian pascapanen, rehabilitasi jaringan irigasi, dan pompanisasi pada sentra produksi pangan strategis; (2) mengintensifkan Sekolah Lapang Iklim guna penyesuaian pola tanam dan mitigasi dampak El Nino; (3) memperkuat distribusi komoditas pangan strategis, khususnya beras, telur ayam ras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit; (4) memperkuat Kerja Sama Antar Daerah di dalam wilayah DIY, baik antarpemerintah maupun antarpelaku usaha; (5) memetakan kebutuhan konsumsi masyarakat dan wisatawan pada masa Idul Fitri, libur sekolah, serta Natal dan Tahun Baru; (6) memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah serta koordinasi dengan Perum BULOG; dan (7) mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai instrumen fiskal untuk membiayai subsidi secara terukur, fasilitasi distribusi, dukungan produksi, dan perlindungan daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, sinergi pengendalian inflasi juga perlu diperluas melalui pelibatan akademisi, sekolah, PKK, dan masyarakat, termasuk melalui program MRANTASI, sehingga kebijakan yang diambil semakin berbasis data, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Hasil HLM beserta seluruh langkah tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana aksi TPID DIY 2026, sehingga pengendalian inflasi dapat berjalan lebih terukur dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Sinergi dan kolaborasi antarlembaga yang telah terjalin diharapkan semakin diperkuat untuk mengawal pencapaian inflasi DIY 2026 sesuai rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy).




RIWI MIRZA
35.000
3 biji 100rb



03

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kinerja perbankan umum di DIY pada triwulan II 2026 tetap solid, tecermin dari pertumbuhan intermediasi yang meningkat dan risiko kredit yang terjaga. Terjaganya kinerja pembiayaan DIY juga tecermin dari penyaluran kredit korporasi dan DPK yang tetap tumbuh positif. Selain itu, kualitas pembiayaan perbankan tetap terjaga, tecermin dari rasio *Non Performing Loa*n (NPL) yang masih berada di bawah *threshold* 5%.



3.1. Kinerja Perbankan

3.1.1. Kondisi Umum

Kinerja perbankan umum di DIY pada triwulan II 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang solid, tecermin dari pertumbuhan intermediasi yang positif dan risiko kredit yang terjaga pada level yang terkendali.Capaian ini tidak terlepas dari sinergi antara Bank Indonesia dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan. Lebih lanjut, implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia secara konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas *(pro-stability)* melalui kebijakan moneter, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi *(pro-growth)* melalui kebijakan makroprudensial yang diperkuat dengan kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau.

Kapasitas perbankan yang terjaga baik antara lain dapat dilihat dari kondisi likuiditas yang memadai diiringi risiko kredit yang terjaga rendah di bawah *threshold* 5%. Selain itu, kapasitas perbankan diperkuat melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), berupa pengurangan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM), terutama bagi bank yang meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia. Ke depan, penguatan KLM sebagaimana diatur dalam PADG Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PADG Nomor 27 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026, diharapkan semakin memperkuat likuiditas dan kapasitas pembiayaan perbankan.

Penguatan tersebut memperluas cakupan pemberian KLM melalui tiga kanal, yaitu *financing channel* berupa penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor tertentu dan pembelian surat berharga korporasi, dengan insentif paling tinggi 4,5%; *interest rate channel* berdasarkan selisih antara suku bunga kredit baru atau persentase imbalan pembiayaan baru dan suku bunga kebijakan Bank Indonesia, dengan insentif paling tinggi 1%; serta *financing-to-funding channel* berupa tambahan insentif paling tinggi 0,5% atas pencapaian sumber pendanaan selain dana pihak ketiga bagi bank yang belum memperoleh insentif maksimum 5,5%. Selain memperluas sumber likuiditas perbankan, pengaturan tersebut juga memperhitungkan pertumbuhan kepemilikan surat berharga korporasi sebagai bagian dari pencapaian pertumbuhan kredit atau pembiayaan.

Di samping penguatan KLM tersebut, Bank Indonesia juga mempertahankan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan kisaran 84-94%; mempertahankan *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0%; mempertahankan asesmen Transparansi Suku Bunga (TSB); melanjutkan pelonggaran LTV/FTV KPR dan Uang Muka Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) hingga 31 Desember 2026, dengan rasio LTV/FTV maksimal 100% dan Uang Muka KKB minimal 0% bagi bank-bank dengan NPL/NPF< 5%, termasuk properti/kendaraan berwawasan lingkungan; serta meningkatkan batas Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) maksimum sebesar 35% terhadap modal bank sejak 1 Juni 2025 melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan dalam rangka memperkuat likuiditas perbankan.

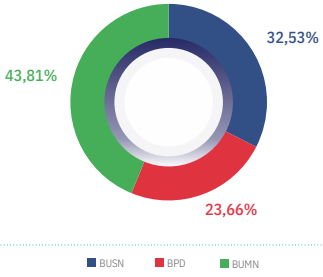
Perluasan cakupan dan kriteria KLM tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia serta menjaga kinerja intermediasi perbankan melalui penguatan likuiditas, penurunan suku bunga kredit, dan diversifikasi sumber pendanaan. Kondisi likuiditas yang memadai serta ditopang dengan kebijakan insentif likuiditas dapat meringankan *cost of fund* perbankan, sehingga bank dapat memperluas fasilitas kredit/pembiayaan dengan suku bunga lebih rendah guna mendorong pertumbuhan kredit, Seiring dengan pertumbuhan kredit yang meningkat, total aset perbankan juga mengalami pertumbuhan.

Grafik 3.1. Perkembangan Aset Perbankan DIY



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2. Komposisi Aset Perbankan DIY



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Adapun pada triwulan II 2026, kinerja aset perbankan DIY tercatat menguat, yakni dari 5,14% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi sebesar 5,18% (yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik 3.1) . Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, pangsa aset terbesar berada pada kelompok Bank Umum Milik Negara (BUMN) sebesar 43,81%, diikuti kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yaitu 32,53%, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 23,66% (Grafik 3.2) .

3.1.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

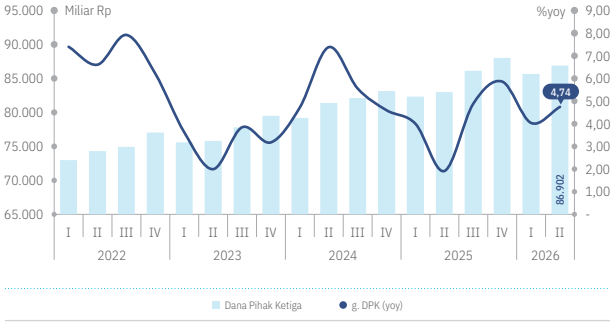
Kinerja penghimpunan DPK perbankan umum di DIY pada triwulan II 2026 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan DPK tercatat sebesar 4,74% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,04% (yoy) (Grafik 3.3) . Ditinjau berdasarkan komponen pembentuknya, meningkatnya kinerja DPK perbankan umum di DIY pada triwulan II 2026 ditopang oleh komponen tabungan yang tumbuh lebih tinggi menjadi 5,02% (yoy) dari 4,25% (yoy) pada triwulan I 2026, serta perbaikan pada komponen deposito yang tercatat terkontraksi 0,96% (yoy), tidak sedalam kontraksi pada triwulan I 2026 sebesar 2,18% (yoy) . Di sisi lain, pertumbuhan lebih tinggi tertahan oleh komponen giro yang melambat menjadi 12,87% (yoy) dari sebelumnya 16,18% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 3.4).

Hingga triwulan II 2026, komponen tabungan memiliki pangsa terbesar sebagai pembentuk DPK perbankan DIY yaitu sebesar 62,56%, dengan nominal tercatat sebesar Rp54,36 triliun. Selanjutnya, share tertinggi kedua pembentuk DPK perbankan DIY adalah deposito dengan pangsa sebesar 24,37% dengan nominal sebesar Rp21,18 triliun, serta giro di posisi ketiga dengan pangsa sebesar 13,07% dan nominal Rp11,35 triliun (Grafik 3.5) .

Berdasarkan klasifikasi kepemilikannya, meningkatnya kinerja DPK pada triwulan II 2026 didorong oleh pertumbuhan DPK di segmen perorangan yang terakselerasi. DPK segmen perorangan turut tumbuh lebih tinggi, dari 1,24% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 2,30% (yoy) pada triwulan II 2026. Sementara itu, DPK segmen korporasi melambat menjadi 2,51% (yoy) pada triwulan II 2026 dari 2,75% (yoy) pada triwulan I 2026. Pertumbuhan kinerja DPK yang lebih tinggi juga tertahan oleh kinerja DPK segmen pemerintah yang berbalik terkontraksi 0,07% (yoy) pada triwulan II 2026, setelah tumbuh 0,04% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 3.6).

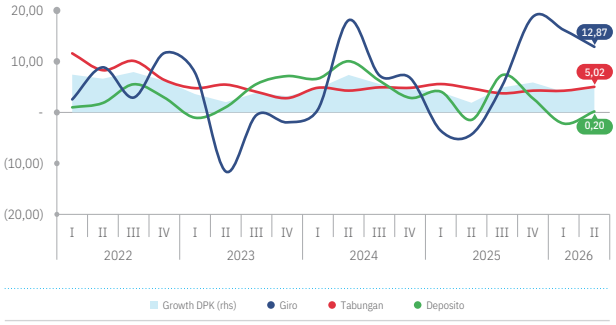
Secara spasial, pangsa DPK di DIY terkonsentrasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan kontribusi gabungan yang mencapai lebih dari 80%. Pada triwulan II 2026, porsi DPK perbankan tertinggi berada di Kota Yogyakarta dengan pangsa

Grafik 3.3. Pertumbuhan DPK Perbankan DIY



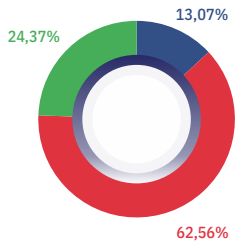
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.4. Pertumbuhan DPK DIY berdasarkan Komponen



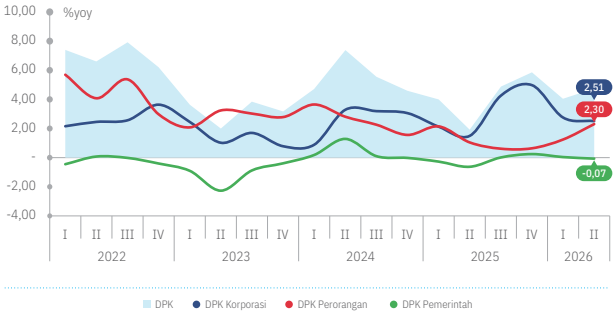
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.5. Pangsa DPK Bank Umum DIY



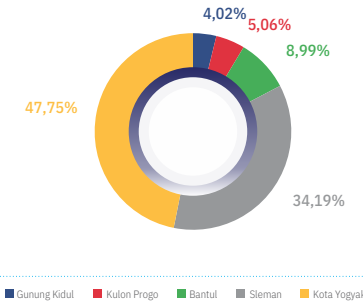
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.6. Pertumbuhan DPK DIY berdasarkan Kepemilikan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.7. Pangsa DPK DIY secara Spasial



Sumber: Bank Indonesia

47,75%, lalu diikuti Kabupaten Sleman dengan pangsa 34,19%, Kabupaten Bantul dengan pangsa 8,99%, Kabupaten Kulon Progo dengan pangsa 5,06%, dan Kabupaten Gunungkidul dengan pangsa 4,02% (Grafik 3.7).

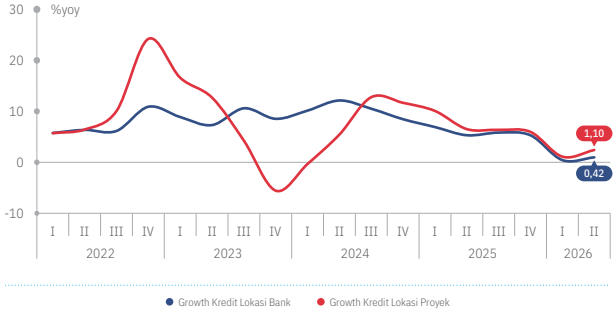
3.1.3. Perkembangan Kredit

Pada triwulan II 2026, kredit perbankan di DIY tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026. Pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,41% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,10% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi bank pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 0,97% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat 0,42% (yoy) (Grafik 3.8). Adapun valuasi kredit perbankan DIY pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp62,46 triliun, meningkat dibandingkan valuasi kredit pada triwulan sebelumnya yaitu Rp61,27 triliun (Grafik 3.9). Pertumbuhan DPK yang masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit mencerminkan likuiditas perbankan yang tetap memadai, namun di sisi lain juga mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan belum optimal akibat pertumbuhan penyaluran kredit yang relatif lebih tertahan dibandingkan penghimpunan dana masyarakat.

Kinerja kredit pada triwulan II 2026 tetap kuat seiring dengan ketahanan ekonomi domestik yang tetap solid, serta ditopang oleh kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang bersifat pro-growth. Meskipun demikian, terdapat beberapa risiko ke depan yang dapat menekan pertumbuhan kredit, yaitu perlambatan ekonomi dunia yang menyebabkan melemahnya permintaan ekspor Indonesia, termasuk DIY, serta meningkatnya ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik dunia.

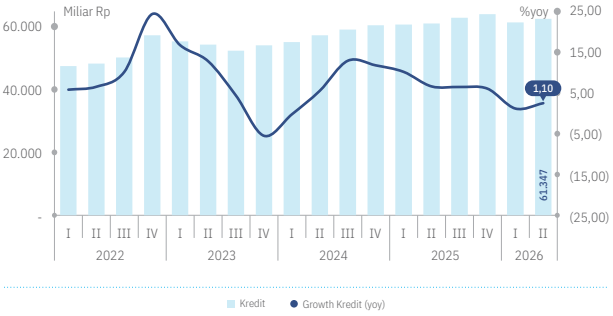
Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan kredit tertinggi pada triwulan II 2026 terjadi pada komponen kredit investasi yang tumbuh sebesar 22,74% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 3,39% (yoy). Di sisi lain, kredit konsumsi melambat menjadi 3,23% (yoy) pada triwulan II 2026 seiring dengan penyaluran KPR/KPA yang masih menjadi

Grafik 3.8. Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Lokasi



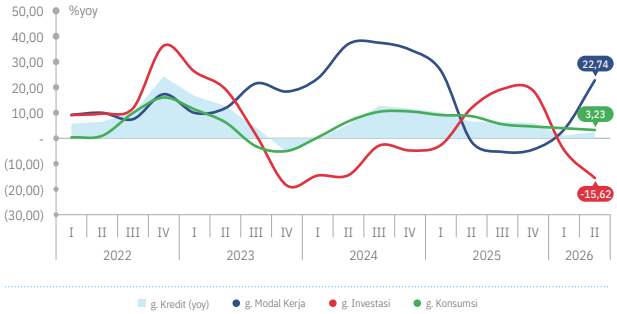
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.9. Kinerja Pertumbuhan Kredit DIY



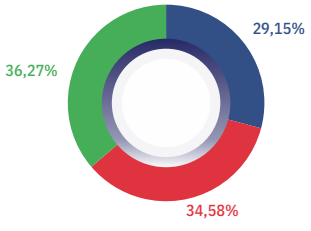
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.10. Pertumbuhan Kredit DIY



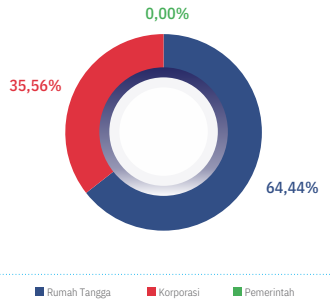
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.11. Komposisi Kredit DIY Berdasarkan Penggunaan



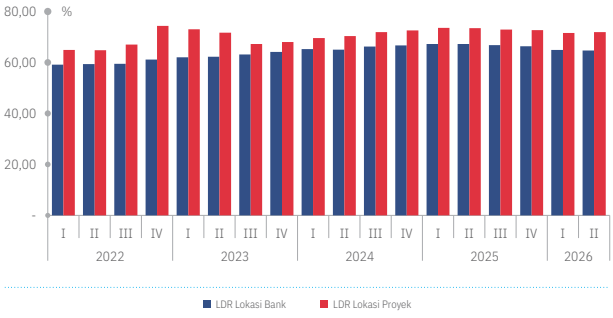
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.12. Komposisi Kredit DIY Berdasarkan Kepemilikan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.13. Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek



Sumber: Bank Indonesia

prioritas utama kredit konsumsi perbankan, dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat tumbuh sebesar 3,94% (yoy). Pertumbuhan kredit perbankan DIY yang lebih tinggi pada triwulan II 2026 tertahan oleh kinerja kredit modal kerja yang terkontraksi sebesar 15,62% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan I 2026 yang terkontraksi sebesar 4,60% (yoy) (Grafik 3.10).

Secara komposisi, kredit konsumsi dan investasi memiliki pangsa yang sama terhadap total penyaluran kredit perbankan DIY pada triwulan II 2026 yaitu sebesar 35,55%, diikuti oleh kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 28,90% (Grafik 3.11).

Menguatnya pertumbuhan kredit pada triwulan II 2026 juga dipengaruhi oleh terjaganya permintaan dari dunia usaha sejalan dengan dukungan kapasitas pembiayaan dari perbankan yang memadai sebagai dampak penerapan bauran Kebijakan Bank Indonesia melalui berbagai instrumen, antara lain kebijakan seperti Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Pelonggaran rasio *Loan to Value* (LTV) untuk kredit properti, rasio *Financing to Value* (FTV) untuk kendaraan bermotor, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendorong kredit UMKM, serta Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Lebih lanjut jika ditinjau berdasarkan kelompok debitur, penyaluran kredit perbankan DIY sektor rumah tangga pada triwulan II 2026 mendominasi dengan pangsa mencapai 64,44%, diikuti dengan kredit sektor korporasi sebesar 35,56% (Grafik 3.12).

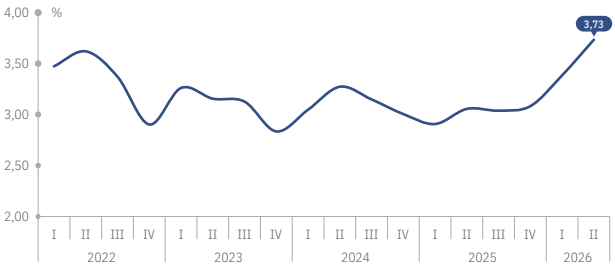
Meningkatnya penyaluran kredit yang tecermin pada pertumbuhan kredit yang positif mengindikasikan terjadinya aktivitas intermediasi perbankan yang terus bertumbuh. Pada triwulan II 2026, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berdasarkan lokasi proyek meningkat menjadi 71,87% dari 71,53% pada triwulan I 2026, sedangkan LDR berdasarkan lokasi bank menurun menjadi 64,74% dari 64,94% (Grafik 3.13). Angka rasio intermediasi perbankan berdasarkan lokasi proyek yang relatif lebih besar dibandingkan lokasi bank mengindikasikan terdapat gap kredit perbankan yang dialokasikan untuk pengembangan proyek dari perbankan di luar DIY dibandingkan perbankan di wilayah DIY.

3.1.4. Likuiditas dan Risiko Kredit Perbankan

Kualitas pembiayaan perbankan tetap terjaga di tengah kinerja penyaluran kredit yang membaik. Hal ini tecermin dari rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) pada triwulan II 2026 yang masih terjaga di bawah *threshold* 5%, yakni tercatat sebesar 3,73%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 3,38% (Grafik 3.14). Peningkatan risiko kredit perbankan DIY pada triwulan II 2026 terutama didorong oleh kredit investasi yang meningkat dari 2,81% pada triwulan I 2026 menjadi 3,41% pada triwulan II 2026. Sejalan dengan itu, risiko kredit konsumsi juga sedikit meningkat dari 2,09% menjadi 2,27%. Peningkatan risiko kredit tersebut juga didorong oleh risiko kredit modal kerja yang meningkat dari 5,66% pada triwulan I 2026 menjadi 5,94% pada triwulan II 2026 (Grafik 3.15).

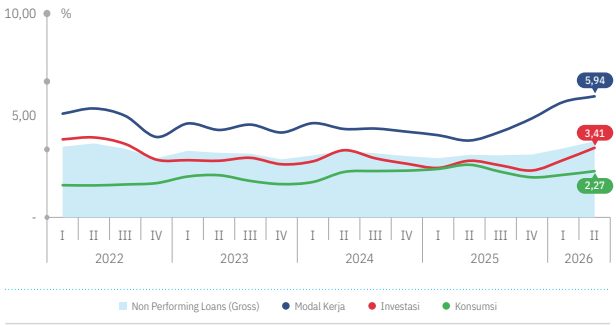
Sejalan dengan hal tersebut, nilai *Loan at Risk* (LaR) perbankan di DIY tercatat sebesar 19,08% pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan rasio pada triwulan I 2026 yang tercatat 17,77% seiring kenaikan kredit kolektabilitas 2 dan kredit kolektabilitas 2 yang direstrukturisasi (Grafik 3.16).

Grafik 3.14. Perkembangan NPL DIY



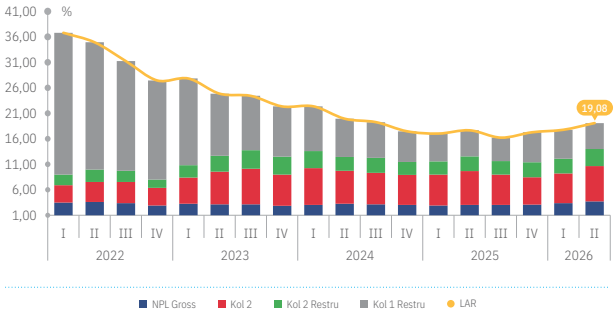
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.15. Perkembangan NPL DIY berdasarkan Komponen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.16. Perkembangan LaR DIY



Sumber: Bank Indonesia

3.2. Asesmen Kinerja Sektor Korporasi

3.2.1. Ketahanan Sektor Korporasi

Kinerja kredit korporasi DIY sedikit termoderasi seiring meningkatnya ketidakpastian global. Eskalasi ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran berdampak pada gangguan rantai pasok serta kelancaran aktivitas ekspor-impor korporasi. Meski demikian, kinerja korporasi tetap ditopang permintaan domestik selama periode liburan sekolah, khususnya pada sektor terkait pariwisata.

3.2.2. Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi

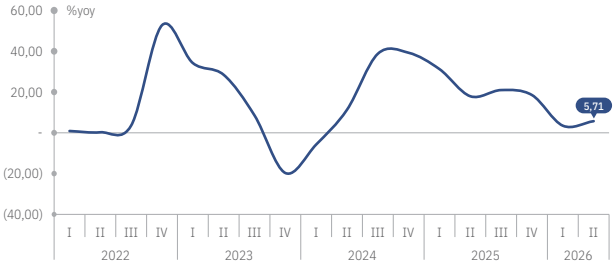
3.2.2.1. Perkreditan

Kinerja kredit korporasi di DIY pada triwulan II 2026 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit korporasi DIY pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp22,21 triliun atau tumbuh 5,71% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2026 yang tercatat 3,50% (yoy) (Grafik 3.17) . Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan kinerja kredit korporasi ditopang oleh kredit investasi yang terakselerasi menjadi 30,61% (yoy) pada triwulan II 2026 dari 2,21% (yoy) pada triwulan I 2026. Di sisi lain, kinerja kredit korporasi tertahan oleh kredit modal kerja dan konsumsi yang masing-masing berbalik terkontraksi 22,28% (yoy) dan 11,10% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 5,68% (yoy) dan 116,74% (yoy) (Grafik 3.18) .

2,21% (yoy) pada triwulan I 2026, setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 8,10% (yoy) pada triwulan IV 2025. Di sisi lain, kinerja kredit korporasi tertahan oleh kredit jenis modal kerja yang melambat menjadi 5,68% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih rendah signifikan dibandingkan capaian pada triwulan IV 2025 yang tumbuh akseleratif sebesar 68,39% (yoy) (Grafik 3.18).

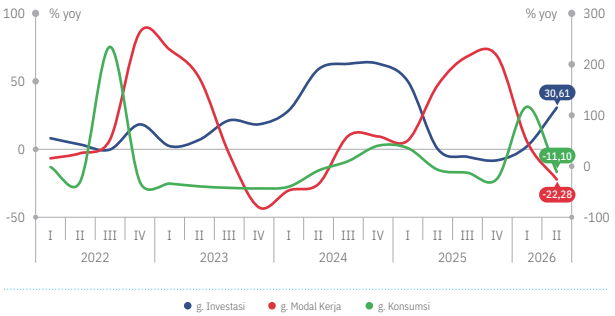
Melambatnya kredit segmen korporasi di DIY sejalan dengan kinerja kredit pada sebagian besar LU utama perekonomian DIY yang pertumbuhannya turut termoderasi. Penurunan paling dalam terjadi pada kinerja kredit LU konstruksi yang turun menjadi 1,15% (yoy) pada triwulan I 2026 setelah tumbuh 32,40% (yoy) pada periode sebelumnya. Selanjutnya, turunnya kinerja kredit LU penyediaan akomodasi dan makan minum turut menjadi salah satu penyebab melambatnya kredit korporasi, yaitu terkontraksi sebesar 10,81% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2025 yakni sebesar 7,90% (yoy). Begitu pula dengan kinerja kredit LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan yang pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 7,74% (yoy) dan 0,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan pada triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 11,33% (yoy) dan 2,10% (yoy). Adapun penurunan lebih dalam tertahan oleh kinerja kredit LU Real Estate yang tumbuh sebesar 35,17% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 25,31% (yoy) (Grafik 3.19).

Grafik 3.17. Perkembangan Kredit Korporasi DIY



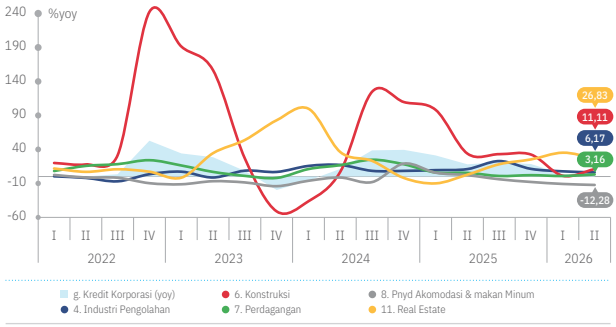
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.18. Perkembangan Kredit Korporasi berdasarkan Komponen



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.19. Perkembangan Kredit Korporasi berdasarkan Sektor Ekonomi



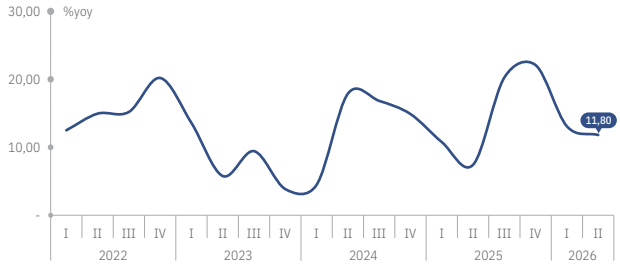
Sumber: Bank Indonesia

Peningkatan kredit segmen korporasi di DIY terutama ditopang oleh kredit pada LU konstruksi dan perdagangan. Penurunan paling dalam terjadi pada kinerja kredit LU penyediaan akomodasi dan makan minum yang terkontraksi 12,28% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih dalam dari sebelumnya yang terkontraksi 10,81% (yoy) pada triwulan I 2026. Selanjutnya, kinerja kredit LU konstruksi tumbuh lebih tinggi menjadi 11,11% (yoy) pada triwulan II 2026, dari 1,15% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Begitu pula dengan kinerja kredit LU Industri Pengolahan melambat menjadi 6,17% (yoy) dari 7,74% (yoy), sedangkan kredit LU Perdagangan tumbuh lebih tinggi menjadi 3,16% (yoy) dari 0,89% (yoy). Adapun penurunan lebih dalam tertahan oleh kinerja kredit LU *Real Estate* yang tetap tumbuh tinggi sebesar 26,83% (yoy) pada triwulan II 2026, meski sedikit melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 35,17% (yoy) (Grafik 3.19) .

3.2.2.2. Dana Pihak Ketiga Korporasi

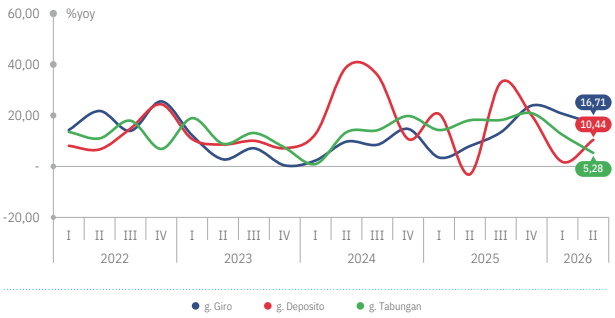
Penghimpunan DPK Korporasi pada triwulan II 2026 tetap tumbuh positif, meski melambat dibandingkan triwulan I 2026. Pertumbuhan DPK nasabah golongan Korporasi di perbankan DIY tercatat sebesar 11,80% (yoy), lebih rendah dibandingkan kinerja pada triwulan I 2026 yang tumbuh 13,08% (yoy) (Grafik 3.20). Perlambatan DPK Korporasi terutama bersumber dari giro dan tabungan yang tumbuh lebih rendah

Grafik 3.20. Perkembangan DPK Sektor Korporasi



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.21. Perkembangan DPK Sektor Korporasi berdasarkan Komponen

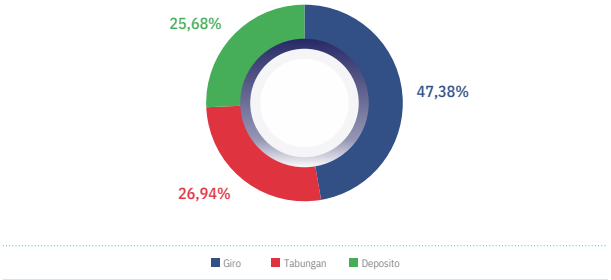


Sumber: Bank Indonesia

pada triwulan II 2026. Pertumbuhan deposito terakselerasi menjadi 10,44% (yoy) pada triwulan II 2026, dari sebelumnya tumbuh 1,78% (yoy) pada triwulan I 2026. Sejalan dengan itu, pertumbuhan komponen giro melambat dari 20,67% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 16,71% (yoy) pada triwulan II 2026. Sementara itu, komponen tabungan turut melambat menjadi 5,28% (yoy) pada triwulan II 2026, dari sebelumnya tumbuh 12,39% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 3.21) .

Berdasarkan komposisinya, dana korporasi pada perbankan di DIY pada triwulan II 2026 mayoritas berada dalam bentuk giro dengan persentase 47,30%; diikuti oleh tabungan dan deposito yang masing-masing memiliki pangsa sebesar 27,00% dan 25,70% (Grafik 3.22).

Grafik 3.22. Komposisi DPK Korporasi



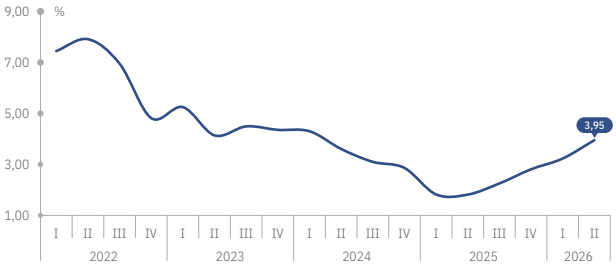
Sumber: Bank Indonesia

3.2.2.3. Likuiditas dan Risiko Kredit Korporasi

Kualitas pembiayaan nasabah korporasi tetap terjaga tecermin dari risiko kredit yang masih terkendali. Rasio NPL kredit korporasi pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,95%, meningkat dibandingkan rasio pada triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 3,23% (Grafik 3.23).

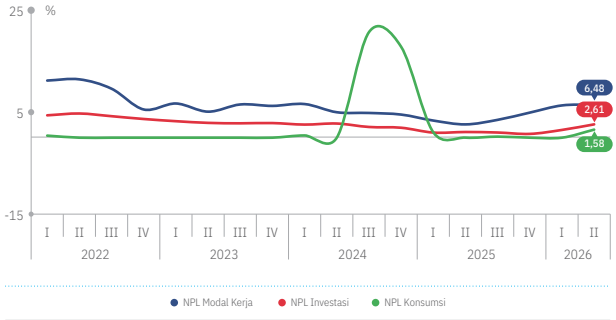
Dilihat berdasarkan komponen pembentuknya, peningkatan risiko kredit korporasi terjadi pada seluruh jenis penggunaan, NPL kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masing-masing meningkat menjadi 6,48%, 2,61%, dan 1,58% pada triwulan II

Grafik 3.23. Perkembangan NPL Korporasi



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.24. Komponen NPL Korporasi



Sumber: Bank Indonesia

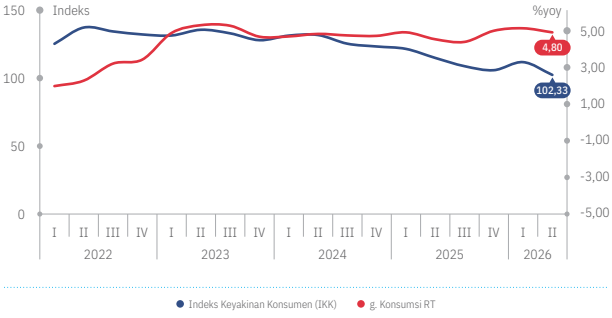
2026, dari 6,33%, 1,52%, dan 0,00% pada triwulan I 2026. Secara umum, risiko kredit korporasi masih terkendali dan berada di bawah *threshold* 5%, meski NPL kredit modal kerja berada di atas 5% (Grafik 3.24).

3.3. Kinerja Sektor Rumah Tangga

3.3.1. Ketahanan Rumah Tangga

Kinerja kredit rumah tangga membaik pada triwulan II 2026, kembali tumbuh positif meski di tengah melemahnya keyakinan konsumen dan termoderasinya konsumsi rumah tangga dibandingkan triwulan sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 102,33, menurun dibandingkan capaian pada triwulan I 2026 yang tercatat 111,75. Sejalan dengan itu, pertumbuhan PDRB konsumsi rumah tangga DIY turut melambat, tecermin dari 5,02% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 4,80% (yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik 3.25). Meski demikian, perbaikan kinerja kredit rumah tangga mengindikasikan bahwa pelemahan keyakinan dan konsumsi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada permintaan pembiayaan rumah tangga pada triwulan laporan.

Grafik 3.25. Perkembangan IKK dan Konsumsi RT DIY



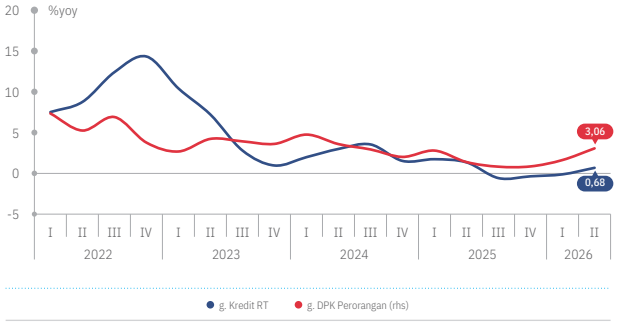
Sumber: Bank Indonesia

3.3.2. Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga

3.3.2.1. Perkreditan

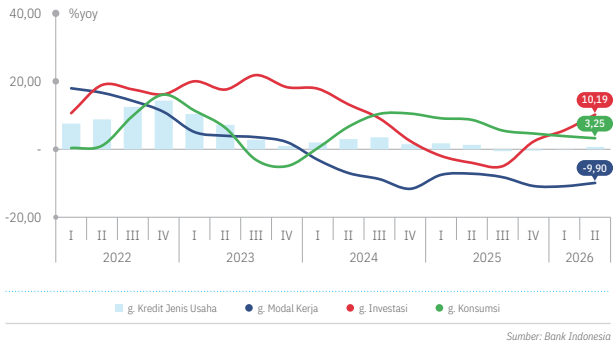
Penyaluran kredit segmen rumah tangga pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp40,25 triliun atau tumbuh 0,68% (yoy), membaik dibandingkan triwulan I 2026 yang terkontraksi sebesar 0,12% (yoy) (Grafik 3.26). Kondisi tersebut disebabkan oleh kinerja kredit investasi yang tumbuh lebih tinggi sebesar 10,19% (yoy) pada triwulan II 2026, dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 5,58% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit konsumsi melambat menjadi 3,25% (yoy) pada triwulan II 2026, dari 3,87% (yoy)

Grafik 3.26. Perkembangan Kredit RT DIY



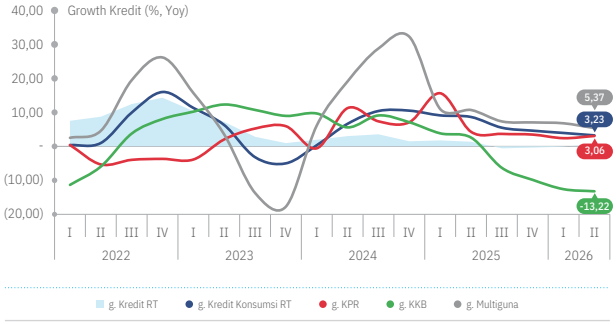
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.27. Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit RT



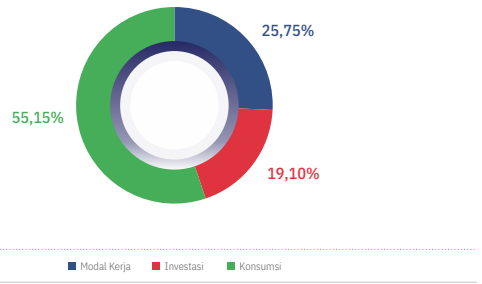
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.28. Perkembangan Komponen Kredit RT



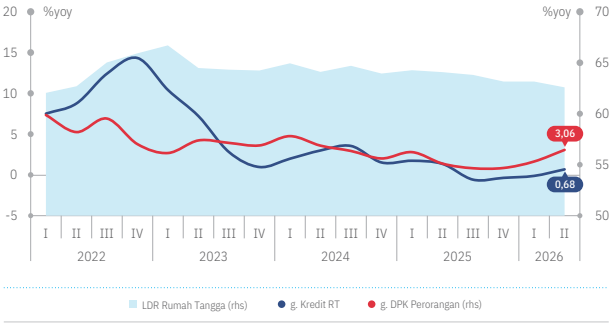
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.29. Komposisi Kredit RT



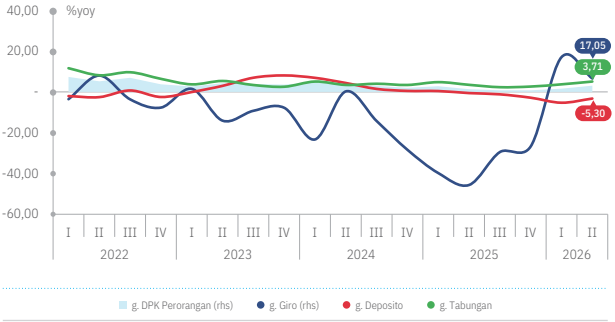
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.30. Perkembangan DPK dan Kredit Sektor RT



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.31. Perkembangan DPK RT per Jenis Simpanan



Sumber: Bank Indonesia

pada triwulan I 2026. Perbaikan kinerja kredit rumah tangga yang lebih tinggi tertahan oleh kredit modal kerja yang masih terkontraksi sebesar 9,90% (yoy) pada triwulan II 2026, meski tidak sedalam kontraksi pada triwulan I 2026 sebesar 10,87% (yoy) (Grafik 3.27).

Berdasarkan komponen pembentuknya, membaiknya kinerja kredit rumah tangga pada triwulan II 2026 ditopang oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang meningkat menjadi 3,06% (yoy) dari 2,41% (yoy) pada triwulan I 2026. Sementara itu, kredit konsumsi rumah tangga dan kredit multiguna melambat masing-masing menjadi 3,23% (yoy) dan 5,37% (yoy), dari 3,94% (yoy) dan 6,79% (yoy). Kinerja Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) terkontraksi lebih dalam sebesar 13,22% (yoy), dibandingkan kontraksi 12,60% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 3.28).

Berdasarkan komposisinya, kredit segmen rumah tangga DIY pada triwulan II 2026 didominasi oleh penyaluran kredit konsumsi dengan pangsa 55,15%, diikuti oleh kredit modal kerja dan investasi yang masing-masing memiliki pangsa sebesar 25,75% dan 19,10% (Grafik 3.29).

3.3.2.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga

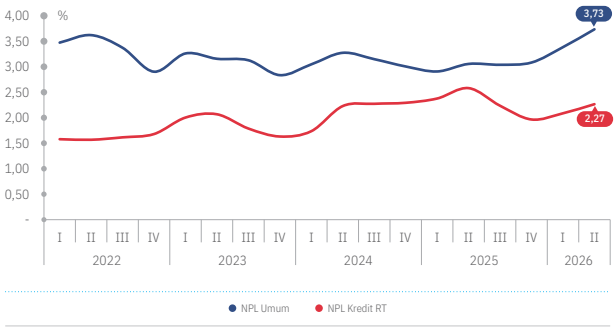
Dana Pihak Ketiga (DPK) nasabah golongan rumah tangga pada triwulan II 2026 melanjutkan pertumbuhan positif yang lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026. DPK nasabah rumah tangga pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 3,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 1,64% (yoy) (Grafik 3.30) . Meningkatnya kinerja penghimpunan DPK segmen rumah tangga pada perbankan DIY utamanya ditopang oleh komponen tabungan yang tumbuh lebih tinggi sebesar 5,09% (yoy) pada triwulan II 2026, dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 3,71% (yoy) . Di sisi lain, pertumbuhan komponen giro melambat signifikan menjadi 6,59% (yoy) pada triwulan II 2026, dari sebelumnya tumbuh 17,05% (yoy) pada triwulan I 2026, sementara deposito mengalami kontraksi sebesar 3,26% (yoy), membaik dibandingkan pada triwulan I 2026 yang mengalami kontraksi sebesar 5,30% (yoy) (Grafik 3.31) .

3.3.2.3. Likuiditas dan Risiko Kredit Rumah Tangga

Risiko kredit sektor rumah tangga tetap terjaga di bawah *threshold* 5,00% pada triwulan II 2026 yang tecermin dari rasio NPL kredit rumah tangga yang tercatat sebesar 2,27%, sedikit lebih tinggi dibandingkwulan I 2026 yang tercatat sebesar 2,09% (Grafik 3.32).

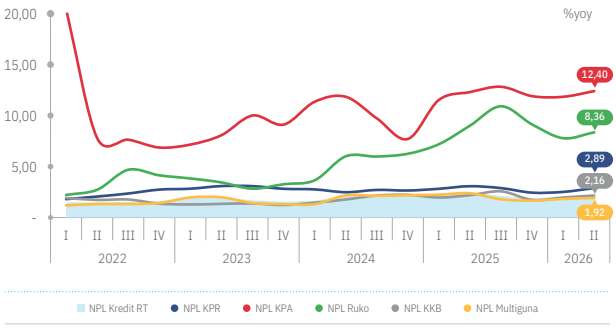
Ditinjau berdasarkan jenis kredit, peningkatan risiko terjadi pada seluruh komponen pada triwulan II 2026, Rasio NPL KPR, Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), kredit ruko, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna masing-masing

Grafik 3.32. Perkembangan NPL Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.33. Perkembangan NPL berdasarkan Jenis



Sumber: Bank Indonesia

meningkat menjadi 2,89%, 12,40%, 8,36%, 2,16%, dan 1,92%, dari 2,52%, 11,85%, 7,78%, 1,97%, dan 1,83% pada triwulan I 2026 (Grafik 3.33).

3.4. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

3.4.1. Akses Keuangan kepada UMKM

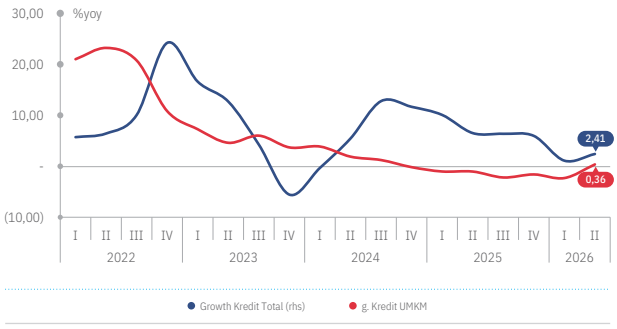
Berbagai kegiatan dalam rangka mengembangkan kapasitas UMKM untuk mendorong akses terhadap layanan keuangan dan pembiayaan telah dilakukan sebagai salah satu upaya pelaksanaan mandat Bank Indonesia khususnya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan, terutama pada pelaku UMKM, Pengembangan akses keuangan kepada UMKM menjadi salah satu fokus utama dikarenakan peran strategisnya dalam perekonomian nasional maupun DIY. Sebagai bentuk dukungan, Bank Indonesia mengeluarkan instrumen pengembangan UMKM yaitu Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk meningkatkan inklusi ekonomi, akses keuangan bagi UMKM, serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional dengan skema bertahap, yaitu minimal 20% di tahun 2022, 25% di tahun 2023, hingga 30% pada tahun 2024. Kebijakan ini terus berlanjut pada 2026 guna memberikan opsi yang lebih luas bagi Perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM, Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR), dan pembiayaan yang bersifat inklusif lainnya.

Selain kebijakan RPIM tersebut, Bank Indonesia juga melaksanakan program pengembangan UMKM melalui pemberian bantuan teknis dalam bentuk pelatihan, pendampingan, penyediaan informasi, dan fasilitasi yang bertujuan mendorong peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, peningkatan akses pembiayaan, perluasan akses pemasaran, dan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6% sebagai langkah afirmatif pemerintah ke segmen UMKM.

Penyaluran kredit kepada UMKM di DIY pada triwulan II 2026 tercatat memiliki valuasi Rp22,81 triliun dan tumbuh 0,36% (yoy), membaik dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat terkontraksi sebesar 2,32% (yoy) (Grafik 3.34) . Adapun pangsa terbesar kredit UMKM DIY pada triwulan II 2026 adalah komponen kredit UMKM mikro dengan persentase 50,51%, sejalan dengan adanya dukungan kebijakan penguatan UMKM berupa kebijakan RPIM. Selanjutnya, diikuti dengan kredit UMKM kecil dengan pangsa 33,99% dan kredit UMKM menengah dengan pangsa 15,50% (Grafik 3.35) .

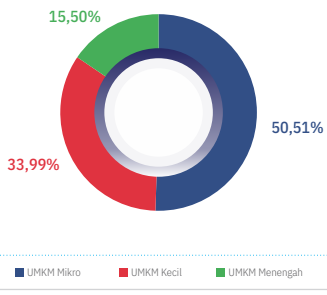
Kinerja penyaluran kredit UMKM mengalami perbaikan pada triwulan II 2026 dan kembali tumbuh positif. Kredit UMKM kecil mengalami perbaikan kontraksi menjadi 1,92% (yoy) pada triwulan II 2026 dari 2,48% (yoy) pada triwulan I 2026. Di sisi

Grafik 3.34. Perkembangan Kredit UMKM DIY



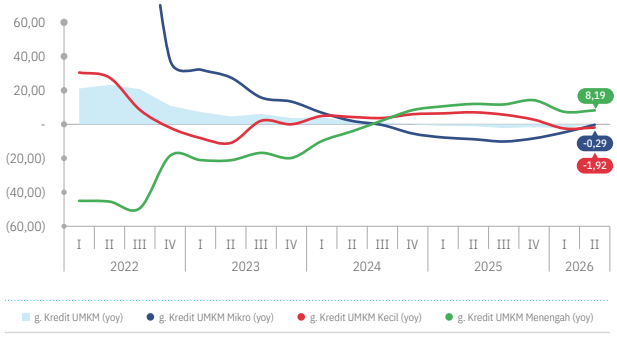
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.35. Pangsa Kredit UMKM DIY



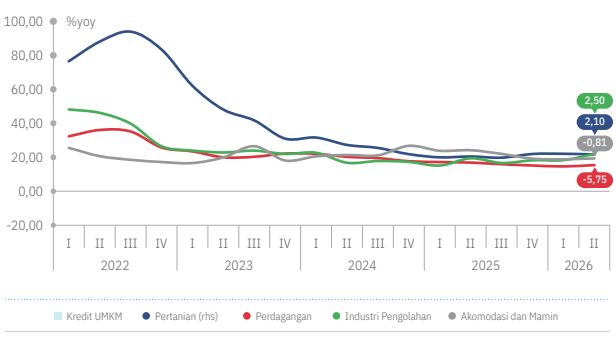
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.36. Perkembangan Kredit UMKM DIY Berdasarkan Skala Usaha



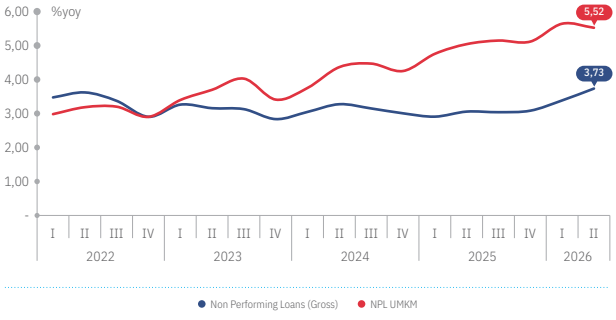
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.37. Perkembangan Kredit UMKM DIY Berdasarkan Sektor



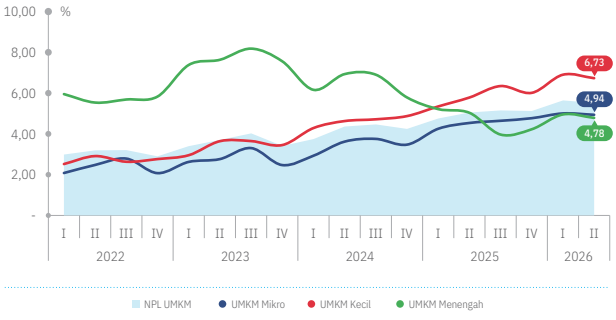
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.38. Perkembangan NPL UMKM DIY



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.39. Perkembangan NPL per Jenis UMKM



Sumber: Bank Indonesia

lain, kredit UMKM Mikro mengalami perbaikan walaupun masih terkontraksi sebesar 0,29% (yoy) pada triwulan II 2026, dari sebelumnya terkontraksi 4,72% (yoy) pada triwulan I 2026. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM Menengah terakselerasi menjadi 8,19% (yoy) pada triwulan II 2026, dari 7,33% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 3.36) .

Secara sektoral, perbaikan penyaluran kredit UMKM pada triwulan II 2026 ditopang oleh lapangan usaha perdagangan yang mengalami perbaikan menjadi terkontraksi sebesar 5,75% (yoy), dari sebelumnya terkontraksi 6,72% (yoy) pada triwulan I 2026. Di sisi lain, kinerja kredit pada lapangan usaha pertanian tetap tumbuh positif yaitu sebesar 2,10% (yoy) pada triwulan II 2026, sedikit melambat dari 2,56% (yoy) pada triwulan I 2026. Perbaikan kinerja kredit UMKM turut didukung oleh kredit pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang mengalami perbaikan kontraksi menjadi 0,81% (yoy), dari 1,47% (yoy) pada triwulan I 2026. Kinerja kredit UMKM pada lapangan usaha industri pengolahan berbalik tumbuh 2,50% (yoy), setelah terkontraksi 2,13% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 3.37).

Risiko kredit UMKM pada triwulan II 2026 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. NPL kredit UMKM pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,52%, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yaitu sebesar 5,64% (Grafik 3.38). Berdasarkan jenisnya, perbaikan risiko terjadi pada seluruh skala usaha, NPL kredit mikro, kecil, dan menengah masing-masing menurun menjadi 4,94%, 6,73%, dan 4,78% pada triwulan II 2026, dari 5,00%, 6,90%, dan 4,95% pada triwulan I 2026 (Grafik 3.39).

3.4.2. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pengembangan UMKM dilakukan untuk menunjang kebijakan utama dalam mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, sesuai dengan tujuan Bank Indonesia. Namun demikian, untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi unggulan di daerah, Bank Indonesia juga melakukan berbagai kegiatan lain yang sejalan dengan tugas Bank Indonesia. Aktivitas nyata yang hingga saat ini dilakukan oleh Bank Indonesia diantaranya pengembangan UMKM berbasis klaster, pemberdayaan ekonomi pesantren, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Zakat Infak dan Sedekah (ZISWAF), pengembangan *Local Economic Development,* peningkatan akses pemasaran, dan peningkatan akses keuangan.

Lebih lanjut, untuk menjawab keluhan lembaga keuangan akan minimnya pencatatan transaksi keuangan oleh UMKM, Bank Indonesia telah mengembangkan aplikasi pencatatan transaksi keuangan sederhana berbasis android yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM yakni Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). Agar aplikasi

tersebut dapat dipahami dengan baik dan cepat oleh para pelaku UMKM, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY telah beberapa kali menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) berbasis komunitas/asosiasi pengusaha lokal di DIY, dan hingga saat ini para *trainers* telah melatih ratusan pelaku UMKM. Untuk menyamakan persepsi antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan, penyelenggaraan ToT aplikasi ini dilakukan dengan melibatkan kalangan perbankan, dalam hal ini *Account Officer.* Selain itu, untuk lebih meningkatkan keuangan inklusif di sektor UMKM, juga telah diselenggarakan sosialisasi terkait transaksi non tunai seperti penggunaan QRIS (QR *Code Indonesian Standard*). Dengan adanya sosialisasi ini, pelaku UMKM yang masih menggunakan uang tunai dalam bertransaksi dapat beralih menggunakan transaksi non tunai sehingga setiap transaksi tercatat secara elektronik dan UMKM memiliki akses ke lembaga perbankan.

Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan Bank Indonesia DIY dalam pengembangan UMKM lokal antara lain:

a. Pelaksanaan Grebeg UMKM DIY yang merupakan *Strategic Flagship Event* yang diinisiasi oleh Bank Indonesia DIY sejak tahun 2017, sebagai salah satu wujud peningkatan kualitas dan pengembangan UMKM di DIY dalam bidang makanan *(food),* pakaian *(fashion),* dan kerajinan *(craft).* Sebagai *Strategic Flagship Event,* Grebeg UMKM DIY merupakan wujud kontribusi dalam mengintegrasikan bauran kebijakan di daerah yang berbasis *stability, growth, & inclusion.* Kegiatan dalam Grebeg UMKM DIY meliputi pameran UMKM dan fasilitasi UMKM *Go Export*. Adapun kegiatan pendampingan UMKM dalam rangka Grebeg UMKM DIY tersebut meliputi kurasi UMKM, *capacity building* dengan berbagai topik, fasilitasi pembuatan *e-catalog* dan *profile video* UMKM, serta *business matching* UMKM DIY dengan calon importir. Berkolaborasi bersama Pemda DIY, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DIY, Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) DIY, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) DIY, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY, *Indonesia Fashion Chamber* (IFC) Chapter Jogja, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu) DIY, Sekar Jagad, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Generasi Baru Indonesia (GenBI) DIY, diharapkan dapat menjadi *brand positioning* yang positif bagi *stakeholders.* Pada tahun 2026, Grebeg UMKM DIY disinergikan dengan penyelenggaraan event Digitalisasi Jogja untuk Semua nan Istimewa (DJAMUAN Istimewa) dengan mengangkat tema "Nyawiji: UMKM Mukti, Ekonomi Mumpuni", dengan rangkaian kegiatan antara lain:
   - *Business matching* pembiayaan UMKM;
   - Sosialisasi dan edukasi dalam rangka peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, ekonomi keuangan digital termasuk QRIS dan pelindungan konsumen;
   - *Capacity building* Millenial Batik Revolution;
   - berbagai perlombaan yang bertujuan untuk meningkatkan engagement masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia;
   - *Talkshow* Pengembangan UMKM;
   - *Training of Trainers* Pejuang Literasi EKSyar;
   - Pelaksanaan Kas Keliling;
   - Pameran produk UMKM unggulan DIY; serta
   - Festival Kuliner Pasar Kangen digital dan halal,
b. Pembinaan kepada 294 UMKM Binaan dan Mitra yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota di DIY, dengan rincian:
   - *Fashion* : 95 UMKM
   - *Food* : 100 UMKM
   - *Craft* : 84 UMKM
   - Ketahanan Pangan : 15 UMKM
c. Pengembangan UMKM pendukung Pariwisata (UMKM Pariwisata) Nglanggeran (Kabupaten Gunungkidul) dan Purwosari (Kabupaten Kulon Progo) yang menerapkan pengelolaan desa wisata dan industri pendukungnya dengan prinsip pemberdayaan komunitas yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata. Pengembangan yang telah dilakukan meliputi aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas, akses pemasaran, serta pembiayaan.
d. Pengembangan Klaster Komoditas Bawang Merah di Nawungan, Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mewujudkan sentra bawang merah yang ramah lingkungan dan memiliki kemandirian benih. Hal ini dilakukan dengan program yang mendorong peningkatan pemahaman dan keterampilan petani dalam melakukan pembenihan bawang merah secara mandiri serta intervensi digitalisasi dalam mendukung pertanian bawang merah baik dari aspek budidaya sampai dengan pemasaran.
e. Pengembangan Klaster Komoditas Cabai di Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul, meliputi pendampingan peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan, akses pemasaran dan hilirisasi. Salah satu upaya yang telah dilakukan di Kulon Progo adalah perluasan demplot cabai hingga mencapai 325Ha dengan memanfaatkan teknologi *sprinkle*. Sementara itu, upaya yang telah dilakukan di Bantul adalah memfasilitasi kegiatan pasar lelang untuk kelancaran dan mengoptimalkan penjualan. Sedangkan di Gunungkidul telah difasilitasi *Green House* untuk mengurangi risiko gagal tanam di cuaca ekstrem. Program *capacity building* juga menjadi salah satu langkah konkrit yang diberikan dalam rangka penguatan

kelembagaan untuk klaster komoditas cabai. Terdapat tantangan dalam hal area pemasaran pasar lelang belum optimal dan kurang efisiennya operasional lelang yang dilakukan secara manual, sehingga dari aspek pemasaran. KPw BI DIY pembangunan pasar lelang cabai secara digital melalui aplikasi dipanen,id berbasis *android* dan *web.* Fitur yang dapat diakses antara lain alur transaksi lelang, informasi *supply* cabai, dan informasi harga. Penggunaan aplikasi *dipanen.id* sudah dilaksanakan dan telah memberikan kemudahan transaksi serta kegiatan lelang semakin efektif.

f. Replikasi model bisnis melalui penggunaan aplikasi *dipanen.id* di Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu tools lelang digital, setelah menuai kesuksesan pada tahap *pilot project* untuk lelang komoditas cabai di Kabupaten Sleman. Dengan replikasi model bisnis ini, diharapkan mampu membantu petani untuk mendapatkan harga terbaik serta meningkatkan aktivitas pemasaran cabai. Selain itu, replikasi model bisnis juga dilakukan di Kabupaten Gunungkidul berupa implementasi pasar lelang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran.
g. Penyediaan informasi melalui *Database* Profil UMKM Potensial Dibiayai untuk mendorong intermediasi kepada lembaga keuangan, salah satunya melalui penggunaan BISAID, yaitu *platform* yang dapat menyediakan informasi profil UMKM yang tidak sedang mendapatkan pembiayaan perbankan, namun membutuhkan kredit/pembiayaan dalam rangka pengembangan usahanya. Dengan adanya BISAID, intermediasi perbankan kepada sektor riil dan UMKM dapat terakselerasi, serta memberikan manfaat bagi UMKM dalam rangka mempercepat akses pembiayaan. Pemanfaatan BISAID ke depan akan dikembangkan dengan melibatkan sebanyak 50 UMKM Binaan di wilayah DIY. Selain itu, UMKM juga dibekali dengan penyediaan informasi dan model bisnis pembiayaan UMKM antara lain *multichannel financing* serta pembiayaan digital.
h. Memfasilitasi *business matching* pembiayaan untuk 121 UMKM binaan di DIY dengan total pembiayaan pada triwulan I 2026 mencapai Rp21,55 miliar.

BOKS 2

Satu Dasawarsa Grebeg UMKM DIY 2026

Dalam rangka memperkuat pengembangan UMKM dan mendorong perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPw BI DIY) kembali menyelenggarakan **Grebeg UMKM X DJAMUAN Istimewa 2026.** Grebeg UMKM telah konsisten diselenggarakan sejak tahun 2017 sebagai *strategic regional program* Bank Indonesia DIY dalam mendukung penguatan kapasitas, perluasan akses pasar, dan peningkatan daya saing UMKM. Memasuki satu dasawarsa penyelenggaraan pada tahun 2026, Grebeg UMKM kembali disinergikan dengan **DJAMUAN Istimewa (Digitalisasi Jogja untuk Semua nan Istimewa)** guna memperluas akseptasi pembayaran digital sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengusung tema **"Nyawiji: UMKM Mukti, Ekonomi Mumpuni",** Grebeg UMKM X DJAMUAN Istimewa 2026 merefleksikan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong UMKM DIY agar semakin sejahtera, tangguh, dan berdaya saing serta mampu menjadi penggerak ekonomi daerah yang semakin kuat dan berkelanjutan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan Bank Indonesia terhadap pelaksanaan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026, Festival Ekonomi Syariah (FESyar), serta *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF).

Rangkaian puncak Grebeg UMKM X DJAMUAN Istimewa 2026 berlangsung selama tiga hari pada 5–7 Juni 2026 di Jogja City Mall Yogyakarta, diawali dengan seremoni pembukaan pada Jumat, 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua Harian Dekranasda DIY GKBRAA Paku Alam X, jajaran Forkopimda DIY, pimpinan lembaga vertikal dan organisasi perangkat daerah, pimpinan satuan kerja Bank Indonesia, perbankan, asosiasi, akademisi, komunitas, pelaku usaha, serta berbagai mitra strategis lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menyampaikan bahwa perekonomian DIY pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,84% (yoy) dan menempatkan DIY sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Capaian tersebut mencerminkan ketahanan dan daya saing ekonomi DIY yang terus menguat di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global. Sejalan dengan semangat *Nyawiji,* pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada besarnya potensi yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan menghubungkan berbagai potensi tersebut agar memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. Untuk itu, koordinasi lintas lembaga, sinergi antarpemangku kepentingan, serta dukungan terhadap penguatan kapasitas dan daya saing UMKM perlu terus diperkuat secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali menyampaikan bahwa selama satu dasawarsa, Grebeg UMKM telah menjadi *strategic regional program* Bank Indonesia DIY yang secara konsisten mendukung pengembangan UMKM. Penguatan UMKM terus didorong melalui peningkatan kualitas dan standardisasi produk, penguatan konektivitas dengan ekosistem digital dan pembiayaan formal, serta promosi UMKM dalam ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif

Sebagai implementasi semangat *Nyawiji,* rangkaian Grebeg UMKM X DJAMUAN Istimewa 2026 menghadirkan berbagai kegiatan yang saling melengkapi, antara lain pameran UMKM sektor *fashion, food,* dan *craft,* Pasar Kangen Digital & Halal dengan melibatkan 260 UMKM, *Capacity Building* Millennial Batik, Latte Art Competition, Kompetisi Robotika, Lomba Bankers Wear Wastra, Talkshow Pengembangan UMKM, serta sosialisasi Cinta Bangga Paham Rupiah, QRIS, dan Pelindungan Konsumen. Berbagai kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perbankan, akademisi, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan UMKM DIY.

Hasil sinergi dan kolaborasi penyelenggaraan road to Grebeg UMKM sepanjang tahun 2026 hingga puncak Grebeg UMKM X DJAMUAN Istimewa 2026 mencatat berbagai capaian positif. Rangkaian kegiatan berhasil menghadirkan 54.723 pengunjung, membukukan penjualan UMKM sebesar Rp9,91 miliar, serta menghasilkan *business matching* pembiayaan sebesar Rp15 miliar. Selain itu, 8 UMKM berhasil menembus pasar

BOKS 2

ekspor dan 30 UMKM berhasil menyusun laporan keuangan menggunakan SIAPIK.

Penguatan ekonomi dan keuangan syariah juga menghasilkan capaian yang signifikan, antara lain 200 UMKM dan 4 Rumah Potong Hewan bersertifikat halal, 20 orang tersertifikasi Juru Sembelih Halal, 20 orang tersertifikasi nadzir, 3 UMKM lolos kurasi Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA), serta 1.508 masjid terkoneksi dengan ZISWAF digital. Tingkat literasi ekonomi syariah juga tercatat mencapai skala 5,6 dari 6. Capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya ekosistem UMKM dan ekonomi syariah dalam mendukung perekonomian daerah.

Sejalan dengan penguatan UMKM, digitalisasi sistem pembayaran di DIY juga terus berkembang positif. Hingga April 2026, jumlah pengguna QRIS di DIY telah mencapai 1.081.745 pengguna, tumbuh 12,73% (yoy), dengan jumlah *merchant* mencapai 1.115.076 *merchant,* tumbuh 21,96% (yoy). Transaksi QRIS di DIY selama 2026 tercatat mencapai 198 juta transaksi atau tumbuh 62,19% (yoy).

Rangkaian Grebeg UMKM X DJAMUAN Istimewa 2026 resmi ditutup pada Minggu, 7 Juni 2026. Seremoni penutupan turut menjadi momentum pemberian apresiasi kepada para pemenang berbagai kompetisi, meliputi Championship Pejuang Kopi Nusantara (CANGKIR BARISTA), Lomba *Bankers Wear Wastra,* Kompetisi Robotika Logistic Challenge, Lomba Konten Experience Belanja Produk UMKM, Lomba Racing QRIS Pasar Kangen, Lomba Menggambar Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, serta Apresiasi UMKM Pameran Grebeg.



Grebeg UMKM x DJAMUAN Istimewa 2026 sebagai Penggerak Ekonomi Daerah

BOKS 2

Penyelenggaraan Grebeg UMKM X DJAMUAN Istimewa 2026 menjadi wujud nyata sinergi dalam memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM sekaligus mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan di DIY. Melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas produk, dan perluasan jejaring usaha, UMKM DIY diharapkan semakin adaptif, inovatif, dan kompetitif. Produk dan karya UMKM tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetapi juga merepresentasikan kreativitas, budaya, dan identitas Daerah Istimewa Yogyakarta.

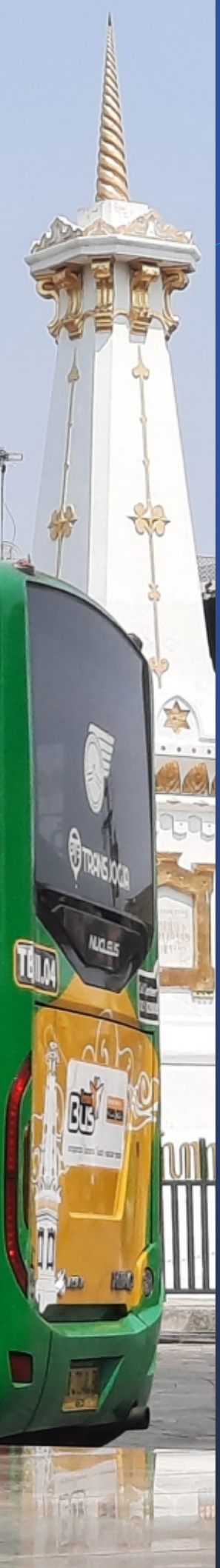
Melalui semangat *Nyawiji,* Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat kolaborasi untuk mendorong UMKM DIY semakin berkembang, memperluas akses pasar dan pembiayaan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, serta meningkatkan kesiapan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas. Berbagai capaian selama satu dasawarsa Grebeg UMKM diharapkan menjadi pijakan untuk semakin memperkuat peran UMKM sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi DIY yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.



Grebeg UMKM x DJAMUAN Istimewa 2026 Berhasil Menghadirkan 54.723 Pengunjung




G08 - SS



04

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kelancaran sistem pembayaran tunai dan non tunai di DIY tetap terjaga didukung oleh kinerja pengelolaan uang rupiah dan akseptasi penggunaan kanal pembayaran nontunai di masyarakat yang tetap kuat.

Arus Uang Rupiah -Inflasi (Rp Triliun)		Transaksi SKNBI (Rp Triliun)	
0,43	2,95	2,94	3,16
Triwulan I 2026	Triwulan II 2026	Triwulan I 2026	Triwulan II 2026

Transaksi RTGS (Rp Triliun)		Penjualan Valas KUPVA (Rp Triliun)	
14,14	22,52	0,64	0,59
Triwulan I 2026	Triwulan II 2026	Triwulan I 2026	Triwulan II 2026

Pertumbuhan transaksi nontunai melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan positif. Transaksi melalui SKNBI mencatatkan nominal sebesar Rp3,16 triliun atau tumbuh 26,40% (yoy) serta naik 7,15% (qtq) dari triwulan sebelumnya (Rp2,94 triliun), dengan volume yang meningkat 17,62% (yoy) menjadi 123,291 transaksi. Sementara itu, transaksi BI-RTGS mengalami lonjakan nominal yang signifikan sebesar 116,74% (yoy) mencapai Rp22,52 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp10,39 triliun), yang turut diiringi oleh peningkatan volume transaksi sebesar 13,63% (yoy) menjadi 7.999 kali transaksi.

Di sisi lain, transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di DIY pada triwulan II 2026 meningkat secara tahunan, namun menurun secara kuartalan. Nominal transaksi pembayaran nontunai berbasis kartu di DIY tercatat sebesar Rp19,68 triliun naik sebesar 1,37% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp19,41 triliun, namun menurun jika dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 19,85 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, adopsi dan transaksi QRIS di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mencatatkan pertumbuhan positif hingga triwulan II 2026, ditandai dengan capaian 1,11 juta *merchant* (naik 18,92% yoy / 2,37% qtq) dan 1,13 juta pengguna (naik 17,51% yoy / 7,5% qtq). Struktur *merchant* masih didominasi sektor usaha mikro sebesar 66,93% dan usaha kecil sebesar 25,09%, disusul kategori lainnya seperti usaha menengah (5,09%), reguler (1,45%), usaha besar (1,43%), PSO (0,01%), serta BLU (0,00143%). Sejalan dengan ekspansi ekosistem tersebut, aktivitas pembayaran digital melonjak signifikan hingga membukukan volume 284,28 juta transaksi (tumbuh 68,74% yoy) dengan nilai nominal mencapai Rp24,74 triliun (naik 21,09% yoy).

Sementara itu, Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) pada triwulan II 2026 terus dilaksanakan guna menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, dan tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat. Pada triwulan II 2026 DIY mengalami *net inflow* seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang ditunjang oleh pertumbuhan pariwisata DIY. Jumlah arus uang tunai yang keluar dan masuk di KPwBI DIY masing-masing tercatat sebesar Rp1,33 triliun dan Rp4,29 triliun sehingga mengalami *net inflow* sebesar Rp2,95 triliun. Pada triwulan II 2026 arus *outflow* uang kartal sebesar Rp1,33 triliun, meningkat 21,39% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,1 triliun, namun mengalami penurunan arus *outflow* jika dibandingkan dengan triwulan I 2026 sebesar 64,28% (qtq).

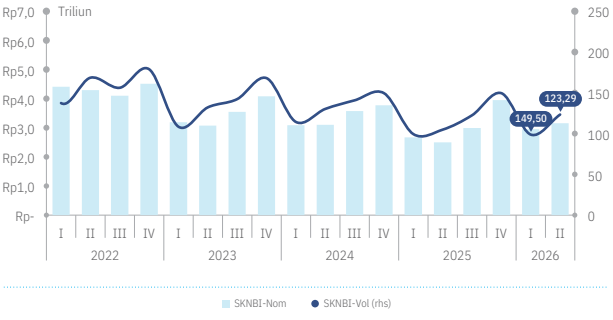
Jumlah transaksi penukaran valuta asing (valas) DIY melalui Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) pada triwulan II 2026 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan turis mancanegara di DIY. Total transaksi jual dan beli valas di DIY pada triwulan II 2026 sebesar Rp590 miliar, meningkat sebesar 0,04% (yoy). Porsi transaksi penjualan dan pembelian mata uang USD mencapai 49,26%, diikuti mata uang Dolar Singapura (16,48%), Euro (10,96%), Real Saudi Arabia (5,28%), serta Yen Jepang (4,26%).

4.1. Perkembangan Transaksi Non Tunai

4.1.1. Transaksi Yang Dioperasikan Oleh Bank Indonesia (SKNBI dan RTGS)

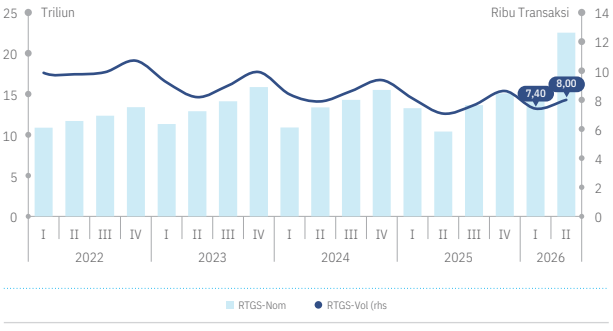
Transaksi sistem pembayaran nontunai melalui SKNBI di DIY menunjukkan pertumbuhan positif secara tahunan dan kuartalan. Nominal transaksi melalui SKNBI pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp 3,16 triliun atau tumbuh sebesar 26,40% (yoy). Sebaliknya, nilai transaksi SKNBI pada triwulan II 2026 mencatatkan peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tercatat sebesar Rp 2,94 triliun atau naik sebesar 7,15%. Di sisi lain, volume transaksi SKNBI di DIY mengalami meningkat sebesar 17,62% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 104.819 kali

Grafik 4.1. Perkembangan Transaksi SKNBI



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.2. Perkembangan Transaksi RTGS



Sumber : Bank Indonesia

transaksi pada triwulan II 2025 menjadi 123.291 kali transaksi pada triwulan II 2026 (Grafik 4.1).

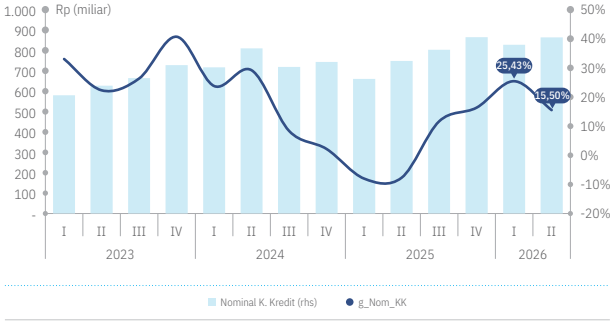
Di sisi lain, transaksi sistem pembayaran nontunai melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) Bank Indonesia menunjukkan kinerja yang bervariasi. Nominal transaksi RTGS di DIY pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp22,52 triliun meningkat signifikan sebesar 116,74% (yoy) dibandingkan dengan triwulan II 2026 yang mencapai Rp10,39 triliun (Grafik 4.2). Selaras dengan nominal transaksi, volume transaksi RTGS pada triwulan II 2026 juga meningkat sebesar 13,63% (yoy) atau sebesar 7.999 kali transaksi dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang mencapai 7.056 kali transaksi.

4.1.2 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Dan Uang Elektronik

4.1.2.1 Transaksi APMK (Kartu Debet dan Kartu Kredit)

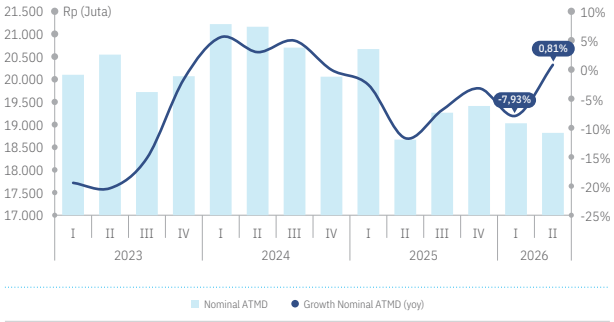
Pada triwulan II 2026, secara tahunan nominal transaksi dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) kartu debet dan kartu kredit mengalami peningkatan tahunan, namun menurun secara kuartalan. Nominal transaksi pembayaran nontunai berbasis kartu di DIY tercatat sebesar Rp19,68 triliun naik sebesar 1,37% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp19,41 triliun, namun menurun jika dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 19,85 triliun.

Grafik 4.3. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.4. Perkembangan Transaksi ATMD



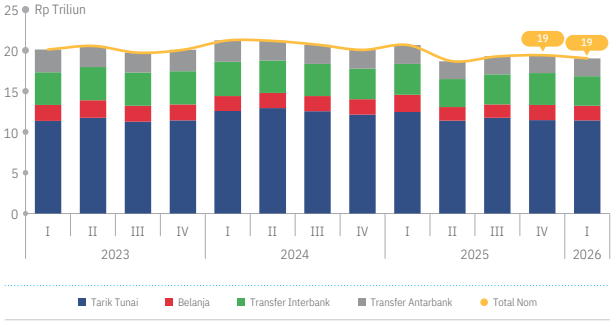
Sumber : Bank Indonesia

Pada triwulan II 2026 transaksi kartu kredit mengalami pertumbuhan dari sisi nominal dan volume dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Transaksi kartu kredit pada triwulan II 2026 senilai Rp863,80 miliar atau tumbuh sebesar 15,50% (yoy), sejalan dengan meningkatnya volume transaksi sebesar 27,84% sebanyak 1,28 juta transaksi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1 juta transaksi. Transaksi kartu kredit dibandingkan dengan transaksi pada triwulan I 2026 menunjukkan peningkatan senilai Rp36,35 miliar atau sebesar 4,39% (Grafik 4.3). Sementara itu pertumbuhan transaksi kartu ATM/kartu debet mengalami peningkatan sebesar 0,81% (yoy) dengan nominal Rp18,81 triliun (Grafik 4.4).

Pertumbuhan transaksi kartu kredit pada triwulan II 2026 didorong oleh meningkatnya transaksi belanja yang memiliki pangsa 98,54% terhadap total transaksi Kartu Kredit. Transaksi belanja mencatatkan peningkatan sebesar 4,47% dibandingkan dengan triwulan I 2026, hal ini didorong oleh integrasi kartu kredit dengan platform digital yang turut mengakselerasi volume transaksi non-tunai.

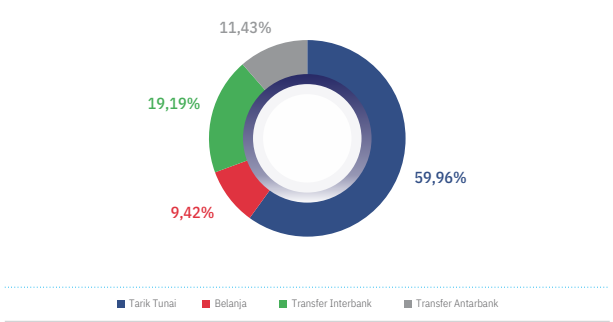
Penurunan nominal transaksi APMK sejalan dengan kontraksi kinerja transaksi kartu debit secara triwulanan, meskipun secara tahunan masih mencatatkan pertumbuhan yang relatif rendah. Pada triwulan II 2026 transaksi ATM Debet mengalami peningkatan sebesar 0,81% (yoy) dan menurun sebesar

Grafik 4.5. Perkembangan Transaksi Kartu ATM Debet



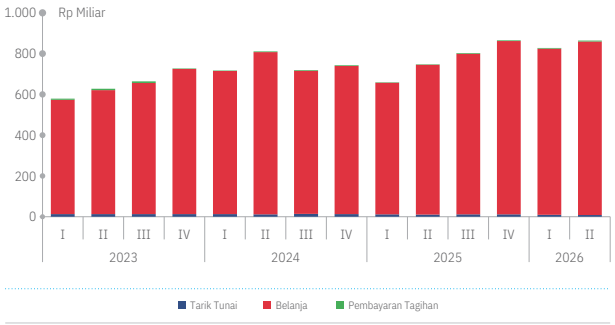
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.6. Pangsa Transaksi Kartu ATM Debet



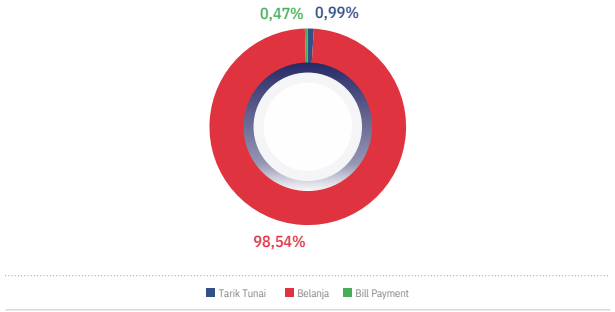
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.7. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.8. Pangsa Transaksi Kartu Kredit



Sumber : Bank Indonesia

1,09% (qtq) dari triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perluasan akseptasi dan penggunaan QRIS di wilayah DIY, Fitur QRIS yaitu Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai (TUNTAS) yang menawarkan biaya transaksi lebih murah yaitu Rp2.000 untuk transfer di bawah Rp100.000 dan Rp2.500 untuk nominal di atas Rp100.000. Hal ini berdampak pada kontraksi pertumbuhan transaksi transfer antarbank sebesar 1,30% (yoy) yang memiliki pangsa pasar 11,40% terhadap total transaksi (Grafik 4.5 dan Grafik 4.6).

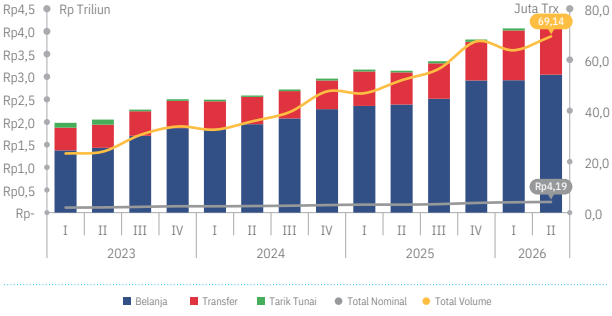
Transaksi belanja dengan pangsa pasar 8,63% mengalami kontraksi sebesar 3,15% (yoy). Sementara itu, transaksi tarik tunai menggunakan ATM Debet masih memiliki pangsa dominan mencapai 60,62%, tercatat meningkat 0,17% (yoy) dengan total transaksi mencapai Rp11,40 triliun. Di sisi lain, transaksi interbank dengan pangsa pasar 19,35% mengalami peningkatan sebesar 6,17% (yoy). Menurunnya transaksi transfer antarbank, belanja dan tarik tunai menggunakan instrumen ATM Debet, serta transaksi interbank didukung oleh perluasan penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran digital yang universal yang dapat menerima pembayaran melalui penyelenggara jasa pembayaran apapun.

4.1.2.2 Transaksi Uang Elektronik

Transaksi Uang Elektronik di DIY melanjutkan tren pertumbuhan positif didorong oleh perluasan penggunaan Uang Elektronik di sektor pajak dan retribusi serta transportasi seperti TransJogja, KRL, DAMRI, parkir dan jalan tol. Transaksi uang elektronik pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp4,18 triliun atau tumbuh 33,73% (yoy) dibandingkan dengan triwulan II tahun 2025 sebesar Rp3,13 triliun (Grafik 4.9). Transaksi uang elektronik tercatat meningkat sebesar 2,92% (qtq) dari triwulan I 2026. Transaksi uang elektronik didominasi oleh transaksi belanja dengan pangsa 72,77% (Grafik 4.10) dengan nominal transaksi senilai Rp3,04 triliun. Transaksi ini mengalami peningkatan 27,81% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,38 triliun.

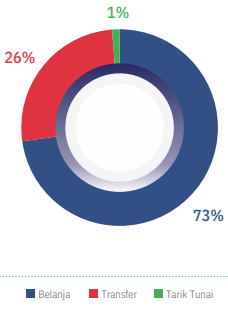
Transaksi transfer juga terus mendorong kenaikan total transaksi uang elektronik dengan pertumbuhan nominal transaksi sebesar 53,29% (yoy), Transaksi transfer mencapai Rp1,08 triliun dengan pangsa pasar 26,00%, meningkat dari triwulan yang sama pada tahun 2025 yang tercatat Rp710,22 miliar. Sementara itu, transaksi tarik tunai dengan pangsa pasar 1,23% memiliki nilai total nominal Rp51,39 miliar, turut tumbuh sebesar 39,91% (yoy) dibandingkan pada triwulan II 2025 yang mencapai nominal Rp36,73miliar.

Grafik 4.9. Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.10. Penggunaan Transaksi Uang Elektronik



Sumber : Bank Indonesia

4.1.2.3 Transaksi Bank Indonesia - *Fast Payment* (BI-FAST)

Transaksi sistem pembayaran BI-FAST pada triwulan II 2026 melanjutkan tren akselerasi yang kuat, didorong oleh semakin luasnya akseptasi kanal digital masyarakat dan pelaku usaha. Dari sisi nominal, transaksi transfer keluar *(outgoing)* mencapai Rp43,77 triliun atau melonjak 42,86% (yoy) dan tumbuh 4,64% (qtq). Sejalan dengan hal tersebut, nominal transfer masuk *(incoming)* tercatat sebesar Rp44,80 triliun, mencatatkan ekspansi sebesar 41,37% (yoy) dan 4,20% (qtq) .

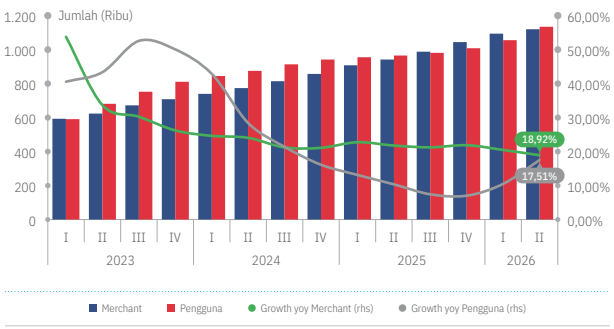
Akselerasi nominal tersebut ditopang oleh pertumbuhan volume transaksi yang tinggi. Frekuensi outgoing mencapai 20,85 juta transaksi, tumbuh sebesar 45,06% (yoy) dan 5,79% (qtq), sementara frekuensi *incoming* membukukan 22,91 juta transaksi, tumbuh sebesar 39,14% (yoy) dan 6,54% (qtq). Berdasarkan arah aliran dana, terpantau tercatat *net inflow* nominal sebesar Rp1,04 triliun pada triwulan II 2026, melanjutkan tren surplus likuiditas dari triwulan sebelumnya. Rata-rata nominal per transaksi berada di level Rp2,1 juta untuk *outgoing* dan Rp1,96 juta untuk *incoming*, menegaskan posisi BI-FAST sebagai instrumen utama transfer ritel masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan BI-FAST tidak hanya merefleksikan peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat transformasi struktural sistem pembayaran yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa.

4.1.2.3 Transaksi QRIS

Akseptasi kanal pembayaran berbasis QRIS sebagai kanal pembayaran digital di DIY terus mencatatkan perkembangan yang positif sejalan dengan perkembangan implementasi QRIS secara nasional. Pengguna QRIS secara nasional terus tumbuh hingga mencapai 65,77 juta pengguna pada triwulan II 2026.

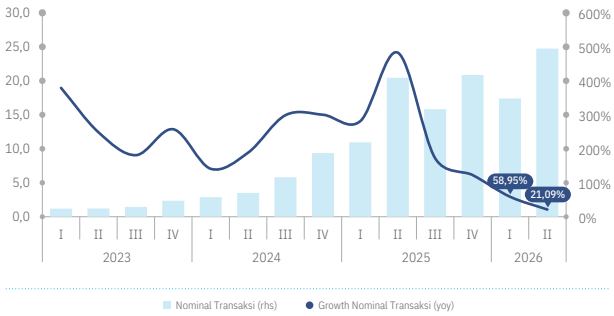
Penggunaan QRIS di DIY terus tumbuh positif dari sisi *merchant* dan pengguna. Hingga triwulan II 2026 terdapat 1,11 juta *merchant* QRIS dan 1,13 juta pengguna QRIS di wilayah DIY (Grafik 4.11), meningkat masing-masing 18,92% (yoy) dan

Grafik 4.11. Perkembangan *Merchant* dan *User* QRIS



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.12. Perkembangan Transaksi QRIS



Sumber : Bank Indonesia

17,51% (yoy). Sejalan dengan upaya perluasan akseptasi pembayaran digital, jumlah *merchant* QRIS mengalami ekspansi sebesar 2,37% (qtq), sementara jumlah pengguna tumbuh sebesar 7,5% (qtq) dibandingkan dengan triwulan I 2026. Segmentasi *merchant* QRIS masih didominasi oleh merchant jenis usaha mikro sebanyak 66,93%, diikuti usaha kecil sebanyak 25,09%, usaha menengah 5,09%, usaha besar 1,43%, usaha reguler 1,45%, *Public Service Obligation* (PSO) 0,01% dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 0,00143%.

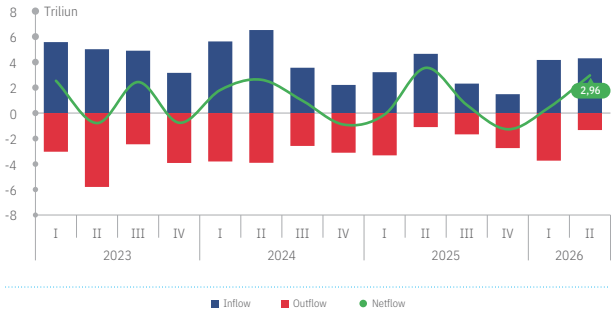
Volume transaksi QRIS pada di DIY terus melanjutkan tren pertumbuhan positif. Pada triwulan II 2026, DIY mencatatkan sebesar 284,28 juta volume transaksi dengan total nominal transaksi sebesar Rp 24,74 triliun (Grafik 4.12), atau tumbuh masing-masing 68,74% (yoy) dan 21,09% (yoy) .

4.2 Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan II 2026 DIY mengalami *net inflow* seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang ditunjang oleh pertumbuhan pariwisata DIY. Jumlah arus uang tunai yang keluar dan masuk di KPwBI DIY masing-masing tercatat sebesar Rp1,33 triliun dan Rp4,29 triliun sehingga mengalami *net inflow* sebesar Rp2,95 triliun (Grafik 4.13) . Pada triwulan II 2026 arus *outflow* uang kartal sebesar Rp1,33 triliun, meningkat 21,39% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,1 triliun, namun mengalami penurunan arus *outflow* jika dibandingkan dengan triwulan I 2026 sebesar 64,28% (qtq).

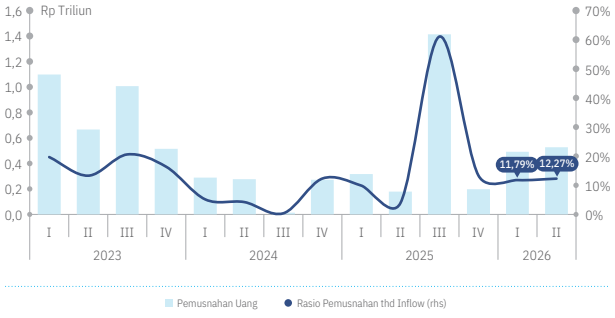
Dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai layak edar, KPwBI DIY sepanjang triwulan II 2026 telah melakukan layanan kas keliling dan penukaran uang layak edar. KPwBI DIY telah melakukan layanan penukaran uang melalui kas keliling sebanyak 30 kali untuk dalam kota dan 5 kali di luar kota Lokasi kas keliling berada pada pusat keramaian seperti mall, stasiun, pasar, alun-alun kota, dan kantor pemerintahan. Selain itu, layanan penukaran uang tidak layak edar juga dilaksanakan pada KPwBI DIY untuk masyarakat setiap hari Selasa dan Kamis,

Grafik 4.13. Perkembangan *Inflow* dan *Outflow* Uang Kartal di DIY



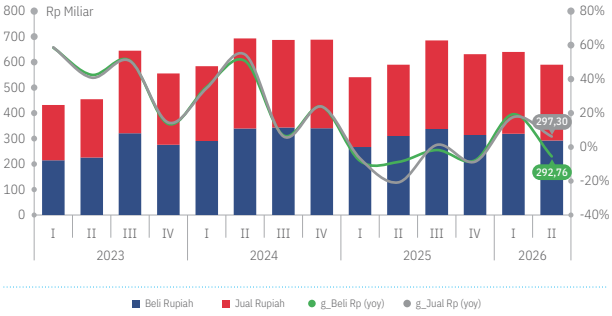
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.14. Perkembangan Pemusnahan Uang di DIY



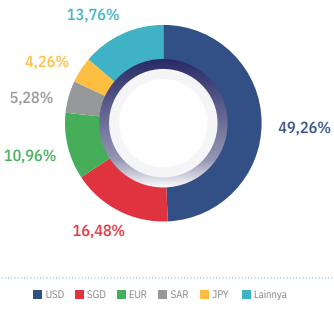
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.15. Perkembangan Transaksi Valuta Asing di DIY



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.16. Pangsa Valuta Asing yang Ditukarkan di DIY



Sumber : Bank Indonesia

Bank Indonesia juga melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga kualitas uang layak edar dengan kebijakan *clean money policy*, salah satunya dengan memberikan edukasi Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah secara berkelanjutan kepada masyarakat.

Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) secara rutin sebagai komitmen menjaga kualitas uang layak edar (ULE) di masyarakat. Pada triwulan II 2026 KPwBI DIY melaksanakan pemusnahan UTLE senilai Rp526,90 miliar, meningkat sebesar 193,37% (yoy) dari triwulan yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp179,60 miliar (Grafik 4.14) .Pemusnahan UTLE mencatatkan peningkatan sebesar 7,15% (qtq) dibandingkan triwulan I 2026.

4.3 Perkembangan Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank di DIY

Jumlah transaksi penukaran valas DIY melalui KUPVA Bukan Bank pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan turis mancanegara di DIY. Total transaksi jual dan beli valas di DIY pada triwulan II 2026 sebesar Rp590 miliar, meningkat sebesar 0,04% (yoy), (Grafik 4.15).

Transaksi dari Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (Bukan Bank) berizin yang bertransaksi di DIY didominasi oleh mata uang USD. Porsi transaksi penjualan dan pembelian mata uang USD mencapai 49,26%, disebabkan posisi USD sebagai mata uang yang berlaku secara internasional, sehingga mendominasi mata uang asing yang digunakan wisatawan mancanegara dalam bertransaksi, termasuk di DIY. Mata uang terbesar diperdagangkan lainnya diikuti mata uang Dolar Singapura (16,48%), Euro (10,96%), Real Saudi Arabia (5,28%), serta Yen Jepang (4,26%) (Grafik 4.16).



BOKS 3

High Level Meeting (HLM)
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-DIY 2026 "Penguatan Ekosistem Digital Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah"

Dalam rangka peningkatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KPw BI DIY) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DIY dan para pemangku kepentingan terkait menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID DIY pada 16 Juli 2026, bertempat di Ayodhya Grand Ballroom Grand Hotel De Djokja, mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Digital Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah."

Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Hermanto, Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti serta Kepala BPKA DIY Wiyos Santoso. Selain itu, HLM ini juga menghadirkan narasumber Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kementerian Perekonomian RI, DR. Ferry Irawan, SE., M.S.E. dan dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah se-DIY.

Membuka jalannya forum, Sekretaris Daerah DIY menyampaikan capaian kinerja TP2DD DIY sekaligus menegaskan komitmen berkelanjutan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dalam mengakselerasi digitalisasi pemerintah daerah. Dalam pemaparannya, Sekda DIY menyoroti lonjakan signifikan implementasi instrumen nontunai di jajaran birokrasi, khususnya melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Berawal dari dua instansi percontohan *(pilot project)* pada akhir 2023, adopsi KKPD mencatatkan akselerasi luar biasa hingga meluas ke 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemda DIY pada tahun 2026. Keberhasilan ekspansi tersebut tecermin dari realisasi transaksi belanja daerah via KKPD yang telah menembus Rp7,9 miliar hingga semester I 2026.



Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BOKS 3

Dalam paparannya, Deputi Kepala Perwakilan BI DIY, turut memaparkan hasil kinerja TP2DD se-DIY dari sisi pendapatan dan belanja daerah. Guna mengakselerasi digitalisasi tata kelola keuangan ke depan, BI DIY merumuskan empat langkah strategis utama yang mencakup penguatan peran BPD DIY sebagai *aggregator* sistem pembayaran untuk mendongkrak pendapatan daerah, pemanfaatan KKPD secara masif pada belanja daerah, peningkatan program *peer learning* antar-TP2DD, serta penyelarasan *roadmap* dan *diagnostic tools* guna memastikan integrasi digital yang terukur dan berkelanjutan.

Adapun Deputi Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi nasional perlu didukung penguatan ekonomi daerah dengan memperkuat 4 pilar kebijakan digitalisasi daerah yaitu, pendapatan, belanja, ekosistem digital dan tata Kelola serta kelembagaan. Selain itu penekanan juga diperlukan pada aspek sinergi dan kolaborasi yang menjadi kunci keberhasilan P2DD antar seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Selaras dengan itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak semestinya dinilai dari kuantitas aplikasi yang dibangun pemerintah, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Beliau menggarisbawahi bahwa teknologi sejatinya hanyalah sarana, sementara esensi utamanya terletak pada kemanfaatannya, sehingga digitalisasi tidak boleh berujung pada ego sektoral dengan sistem yang berjalan terfragmentasi. Oleh sebab itu, integrasi digital di lingkungan Pemda DIY harus diarahkan secara substansial untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, mengefisiensikan tata kelola belanja, mengakselerasi layanan publik, memperkokoh akuntabilitas birokrasi, serta menghadirkan kemudahan nyata bagi kehidupan masyarakat.

Sri Sultan juga menekankan pentingnya integrasi data, keseragaman standar, keamanan informasi, serta kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, Bank BPD DIY, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi. Selain itu, digitalisasi harus tetap bersifat inklusif dengan memperhatikan kelompok rentan serta wilayah yang memiliki keterbatasan konektivitas.

Dalam kesempatan ini, Gubernur DIY turut menyerahkan secara simbolis KKPD fisik kepada 4 OPD di Wilayah DIY serta meresmikan peluncuran KKPD Fisik BPD DIY dan menyaksikan *live test* pembayaran transaksi belanja OPD menggunakan KKPD dan EDC BPD DIY. Selain itu, dalam HLM ini turut dilakukan penandatanganan komitmen seluruh kepala daerah di DIY untuk memanfaatkan KKPD secara masif dalam mendorong belanja daerah yang lebih optimal dan akuntabel.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan evaluasi pelaksanaan program TP2DD semester I 2026 serta rencana aksi semester II 2026 oleh masing-masing perwakilan Pemerintah Daerah se-DIY. Menilik dinamika tantangan yang dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), forum menyimpulkan bahwa keberhasilan pembayaran digital sebagai fondasi ekonomi digital sangat bertumpu pada kesiapan infrastruktur dan kapabilitas SDM dalam membentuk ekosistem masyarakat nontunai *(cashless society)*. Di samping itu, laporan para Kepala Daerah menunjukkan keberhasilan digitalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dari tahun ke tahun.



Diskusi dan Arahan Gubernur DIY dalam HLM TP2DD DIY 2026





05

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di DIY yang salah satunya tercermin oleh peningkatan penduduk bekerja dibandingkan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi kesejahteraan masyarakat DIY menunjukkan perbaikan yang ditandai oleh tren penurunan persentase penduduk miskin.

Persentase Penduduk Miskin (%)	Penduduk Usia Kerja (Juta Orang)
9,70 (Maret 2026)	3,07 (Mei 2026)

Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Nilai Tukar Petani
74,04 (Mei 2026)	3,11 (Mei 2026)	108,01 (Triwulan II 2026)

5.1. Gambaran Umum

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY pada Mei 2026 mengalami penurunan terbatas menjadi 74,04%. Secara sektoral, penyerapan tenaga kerja di DIY masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Di tengah moderasi tersebut, kualitas penyerapan tenaga kerja menunjukkan perbaikan yang tecermin dari meningkatnya pangsa pekerja formal menjadi 47,59% lebih tinggi dibandingkan periode Februari 2026.

Persentase tingkat kemiskinan di DIY pada Maret 2026 melanjutkan tren penurunan dengan terkontraksi 3,98% (yoy). Jumlah penduduk miskin di DIY tercatat sebesar 408,87 ribu orang atau 9,70% dari seluruh penduduk DIY, sekaligus menjadikan tingkat kemiskinan DIY terendah dibandingkan 5 tahun terakhir. Penurunan jumlah penduduk miskin DIY ini sejalan dengan penurunan rasio penduduk miskin sebesar 0,53 poin dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 10,23%. Ketimpangan pengeluaran penduduk DIY pada Maret 2026 turut terpantau menurun dengan Indeks Gini Rasio tercatat sebesar 0,411, turun 0,015 poin dibandingkan Maret 2025. Walaupun mengalami penurunan indeks, tingkat ketimpangan DIY ini masih lebih tinggi dibandingkan indeks nasional.

5.2.Ketenagakerjaan

5.2.1.Partisipasi Kerja

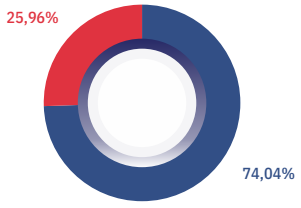
Kondisi ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Mei 2026 menunjukkan moderasi dibandingkan periode sebelumnya. Pada periode laporan, tercatat jumlah penduduk usia kerja sebesar 3,07 juta orang atau 3.068,88 ribu orang, lebih tinggi 6,63 ribu orang dibandingkan Februari 2026 yang sebanyak 3.062,25 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,27 juta orang atau 74,04% tergolong sebagai angkatan kerja, sementara 25,96% atau sebanyak 796,78 ribu orang merupakan bukan angkatan kerja (Grafik 5.1).

Angkatan kerja pada Mei 2026 tercatat sebesar 2.272,10 ribu orang, lebih rendah 10,02 ribu orang dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 2.282,12 ribu orang. Perkembangan angkatan kerja secara komposisi dipengaruhi oleh jumlah penduduk bekerja yang tercatat sebesar 2.201,54 ribu orang, berkurang 11,04 ribu orang dari sebelumnya 2.212,58 ribu orang. Pada komponen pengangguran, terjadi peningkatan sebesar 1,02 ribu orang menjadi 70,56 ribu orang dari sebelumnya 69,54 ribu orang. Kondisi tersebut sejalan dengan bertambahnya penduduk bukan angkatan kerja dibandingkan Februari 2026 sebanyak 16,65 ribu orang menjadi 796,78 ribu orang pada periode laporan, yang mengindikasikan adanya sebagian penduduk usia kerja yang keluar dari pasar kerja pada periode laporan (Tabel 5.1).

Seiring dengan perkembangan tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY pada Mei 2026 tercatat sebesar 74,04%, turun 0,48% dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 74,52%. Penurunan tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh TPAK laki-laki dan perempuan yang masing-masing tercatat sebesar 82,67% dan 65,73%, keduanya lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang masing-masing sebesar 83,64% dan 65,75%. Meski demikian, kesenjangan partisipasi antargender menyempit menjadi 16,94% dari sebelumnya 17,89% , yang mengindikasikan penurunan partisipasi pada periode laporan lebih banyak bersumber dari kelompok laki-laki (Grafik 5.2).

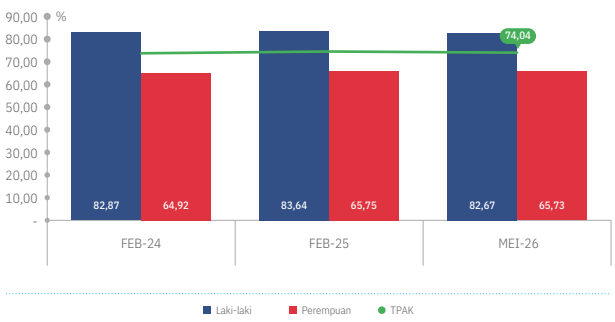
Berdasarkan kategori lapangan usaha (LU) utama, struktur penduduk bekerja pada Mei 2026 masih didominasi oleh sektor utama pembentuk perekonomian DIY. Sektor penyerap tenaga kerja terbesar adalah pertanian sebesar 21,75%, diikuti LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,97%, dan LU Industri Pengolahan sebesar 15,73%. Ketiga lapangan usaha tersebut secara akumulatif menyerap 53,45% dari total penduduk bekerja di DIY. Selain ketiga sektor tersebut, lapangan usaha lain yang turut berkontribusi signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di DIY antara lain Penyediaan Akomodasi dan Makan

Grafik 5.1. Persentase penduduk usia kerja di DIY



Sumber: BPS DIY

Grafik 5.2. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DIY



Sumber: BPS DIY

Tabel 5.1. Status Keadaan Ketenagakerjaan di DIY

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Feb-25	Pertumbuhan % (yoy)	Feb-26	Pertumbuhan % (yoy)	May-26 (ribu orang)
Penduduk Usia Kerja	3.037,96	0,83	3.062,25	0,80	3.068,88
Angkatan Kerja	2.239,76	1,58	2.282,12	1,89	2.272,10
Bekerja	2.168,56	1,64	2.218,58	2,31	2.201,54
Pengangguran	71,19	-0,20	69,54	-2,32	70,56
Bukan Angkatan Kerja	798,20	-1,22	780,13	-2,26	796,78

Sumber: BPS DIY

Minum (10,44%), Konstruksi (6,82%), Aktivitas Jasa Lainnya (6,43%), serta Pendidikan (6,31%). Dominasi sektor tersebut mencerminkan karakteristik struktur ekonomi DIY yang ditopang oleh aktivitas pertanian, industri, dan pariwisata.

Dibandingkan Februari 2026, terdapat pergeseran komposisi penyerapan tenaga kerja, Pangsa LU Pertanian menurun 2,84 poin dari 24,59% menjadi 21,75%, sementara peningkatan pangsa terbesar terjadi pada LU Konstruksi dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang masing-masing naik 0,82 poin dan 0,71 poin menjadi 6,82% dan 10,44%. Peningkatan juga tercatat pada LU Industri Pengolahan menjadi 15,73% serta LU Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial menjadi 2,68%.Pergeseran ini sejalan dengan pola musiman pascapanen serta berlanjutnya penguatan aktivitas pariwisata dan konstruksi pada periode laporan (Tabel 5.2).

Tabel 5.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di DIY

Lapangan Pekerjaan	Feb-26	Mei-26
Pertanian	24,59	21,75
Perdagangan Besar dan Eceran	16,08	15,97
Industri	15,17	15,73
Akomodasi dan Makan Minum	9,73	10,44
Aktivitas Jasa Lainnya	6,39	6,43
Pendidikan	6,14	6,31
Konstruksi	6,00	6,82
Trnasportasi dan Penyimpanan	3,76	3,79
Aktivitas Profesional dan Administratif	3,17	3,18
Administrasi Pemerintahan	2,97	3,04
Aktivitas Kesehatan dan Keg. Sosial	2,21	2,68
Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi	1,48	1,6
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1,43	1,01
Penyediaan Listrik dan Gas; Penyediaan Air dan Pengelolaan Limbah	0,43	1,25
Pertambangan	0,23	
Real Estat	0,23	

Sumber: BPS DIY

Secara umum, kualitas penyerapan tenaga kerja di DIY pada Mei 2026 menunjukkan perbaikan yang tecermin dari penguatan pangsa sektor formal. Hingga periode laporan, penyerapan tenaga kerja di DIY adalah sebanyak 2,20 juta orang. Secara komposisi, tenaga kerja informal masih mendominasi dengan pangsa sebesar 52,41% atau 1,153,88 ribu orang, dibandingkan dengan formal sebesar 47,59% atau 1,047,68 ribu orang. Pangsa tenaga kerja formal tersebut meningkat 1,57 poin dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 46,02%, dengan penambahan pekerja formal mencapai 29,43 ribu orang.

Peningkatan pangsa sektor formal terutama ditopang oleh status pekerjaan Buruh/Karyawan/Pegawai dengan pangsa sebesar 42,54% atau 936,55 ribu orang, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 41,22%. Peningkatan juga terjadi pada status Berusaha dibantu Buruh Tetap yang tercatat sebesar 5,05%. Adapun pada sektor informal, penurunan pangsa terutama bersumber dari status Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar dan Pekerja Keluarga/tak Dibayar yang masing-masing tercatat sebesar 15,45% dan 11,32%, lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang masing-masing sebesar 17,36% dan 12,91%. Sektor informal merupakan sektor yang umumnya menampung tenaga kerja dengan tingkat keterampilan dan pendidikan rendah, serta seringkali menjadi tumpuan bagi penduduk yang berpendapatan rendah. Beralihnya sebagian pekerja dari status tidak dibayar menuju status berupah mengindikasikan perbaikan kualitas hubungan kerja di DIY pada periode laporan (Tabel 5.3).

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, serapan tenaga kerja di DIY pada Mei 2026 didominasi oleh tenaga kerja lulusan SMK dengan total pangsa 26,31%, diikuti oleh SD ke bawah sebesar 22,59%, dan lulusan SMP sebesar 16,33%. Dibandingkan Februari 2026, peningkatan pangsa penyerapan tenaga kerja terjadi pada lulusan SMK, DI/II/III, dan Universitas yang masing-masing tercatat sebesar 26,31%, 4,80%, dan 15,01%. Sebaliknya, pangsa tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah melanjutkan tren penurunan menjadi 22,59%, sejalan dengan berkurangnya penyerapan pada lapangan usaha pertanian. Pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kompetensi dan

Tabel 5.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	Feb-25		Feb-26		Mei-26
	Pangsa (%)	%yoy	Pangsa (%)	%yoy	Pangsa (%)
Formal	47,12	7,90	46,02	-2,33	47,59
Berusaha dibantu Buruh Tetap	4,91	17,58	4,80	-2,24	5,05
Buruh/Karyawan/Pegawai	42,21	6,88	41,22	-2,35	42,54
Informal	52,88	-6,13	53,98	2,08	52,41
Berusaha Sendiri	18,37	-5,14	18,22	-0,82	19,60
Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	16,42	-18,43	17,36	5,72	15,45
Pekerja Bebas	5,75	21,12	5,48	-4,70	6,04
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	12,34	2,06	12,91	4,62	11,32

Sumber: BPS DIY

Tabel 5.4. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY

Status Pendidikan	Feb-24		Feb-25		Feb-26		Mei-26
	Pangsa (%)	%yoy	Pangsa (%)	%yoy	Pangsa (%)	%yoy	Pangsa (%)
SD ke bawah	26,86	-4,99	25,92	-3,50	23,13	-10,76	22,59%
SMP	17,84	6,70	16,24	-8,97	16,95	4,37	16,33%
SMA	14,81	-29,88	14,35	-3,11	17,44	21,53	15,14%
SMK	24,08	32,45	24,35	1,12	24,15	-0,82	26,31%
DI/II/III	2,77	-27,68	3,51	26,71	4,12	17,38	4,80%
Universitas	13,64	14,81	15,63	14,59	14,21	-9,09	15,01%

Sumber: BPS DIY

produktivitas yang lebih baik, sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja, terutama di tengah akselerasi digitalisasi yang terus berkembang saat ini. Tingginya pangsa lulusan SMK juga mencerminkan relevansi pendidikan vokasi terhadap kebutuhan industri di DIY (Tabel 5.4).

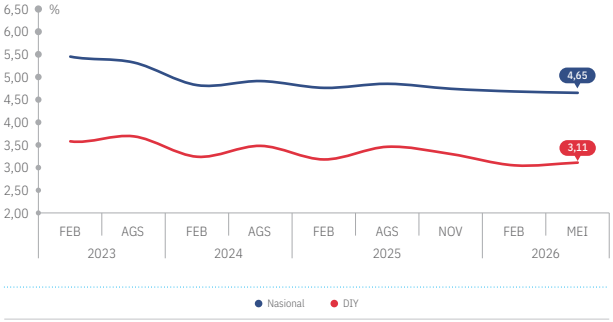
5.2.2. Pengangguran

Dalam kurun tiga tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY secara konsisten berada di bawah angka TPT nasional. Pada Mei 2026, TPT DIY tercatat sebesar 3,11%, meningkat 0,06% dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 3,05% (Grafik 5.3), namun tetap jauh lebih rendah dibandingkan angka nasional yang sebesar 4,65%. Ditinjau berdasarkan wilayah, TPT perkotaan dan perdesaan masing-masing tercatat sebesar 3,32% dan 2,44%, lebih tinggi dibandingkan Februari 2026 yang masing-masing sebesar 3,25% dan 2,41% (Grafik 5.4).

Apabila dilihat dari pergerakan historis TPT di pedesaan dan perkotaan, pengangguran di perkotaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Tingginya TPT perkotaan terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan pemberi kerja, serta tekanan urbanisasi yang terus berlangsung. Sementara itu, rendahnya TPT di pedesaan didukung oleh karakteristik pasar kerja yang tidak menuntut kualifikasi kompetensi yang terlalu kompleks, sehingga penduduk pedesaan dapat terserap dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti pekerja keluarga, pekerja bebas di sektor pertanian, maupun sebagai pekerja komuter yang menjangkau kawasan perkotaan dengan memanfaatkan kemudahan kepemilikan kendaraan bermotor dan kondisi infrastruktur jalan yang semakin memadai.

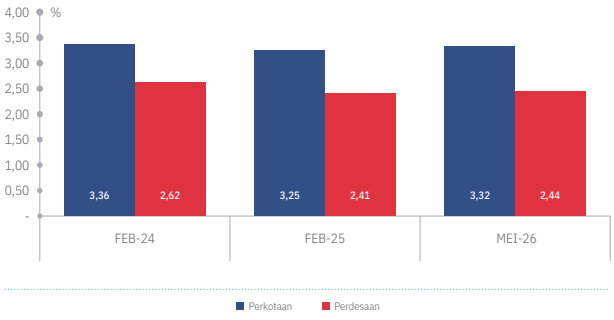
Berdasarkan tingkat pendidikan, penurunan TPT terjadi pada hampir seluruh jenjang pendidikan. TPT lulusan Universitas, SMP, dan SMA masing-masing tercatat sebesar 3,94%, 2,16%, dan 1,53%, menurun dibandingkan Februari 2026 yang masing-masing sebesar 5,32%, 4,18%, dan 4,02%. Penurunan juga terjadi pada jenjang DI/II/III dan SD ke bawah yang masing-masing tercatat sebesar 2,59% dan 1,18%. Penurunan TPT secara agregat tertahan oleh meningkatnya pengangguran

Grafik 5.3. Perkembangan TPT di DIY dan Nasional



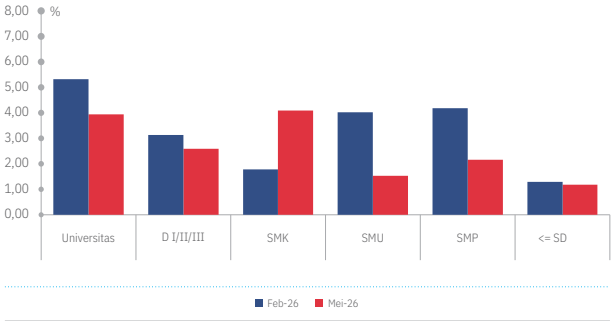
Sumber: BPS DIY

Grafik 5.4. Perkembangan TPT di DIY Berdasarkan Wilayah



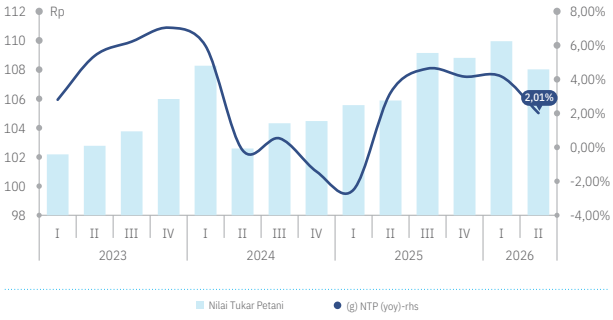
Sumber: BPS DIY

Grafik 5.5. Perkembangan TPT Menurut Pendidikan di DIY



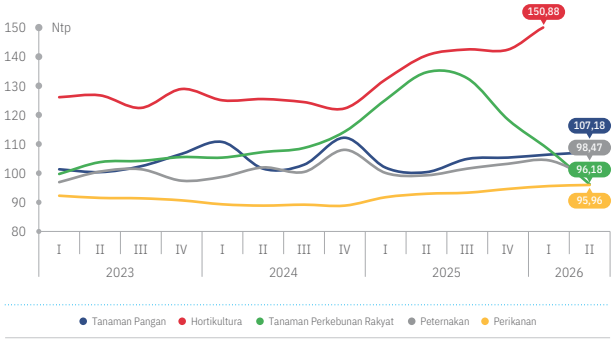
Sumber: BPS DIY

Grafik 5.6. Perkembangan NTP DIY



Sumber: BPS DIY

Grafik 5.7. Perkembangan NTP Berdasarkan Subsektor



Sumber : BPS DIY

terbuka pada lulusan SMK yang tercatat sebesar 4,09%, sekaligus menjadi jenjang dengan TPT tertinggi pada periode laporan. Kondisi ini perlu dicermati mengingat lulusan SMK sekaligus merupakan kelompok dengan pangsa penyerapan tenaga kerja terbesar di DIY, sehingga penguatan link and match antara kurikulum vokasi dan kebutuhan industri tetap diperlukan (Grafik 5.5).

5.3. Kesejahteraan Masyarakat

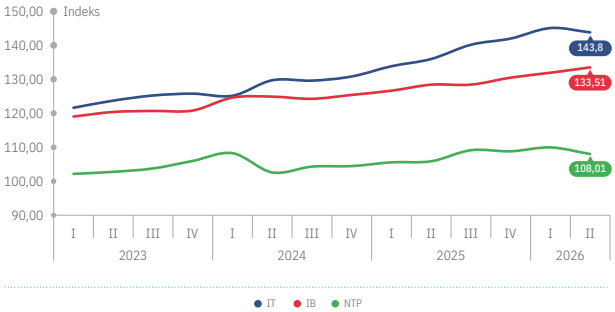
5.3.1. Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) di DIY pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 108,01 atau tumbuh sebesar 2,01% (yoy). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 4,16% (yoy) dengan indeks sebesar 109,95. Penguatan NTP secara tahunan terutama didorong oleh subsektor hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan, dengan nilai NTP masing-masing sebesar 150,88; 107,18; dan 95,96, seluruhnya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Namun demikian, penguatan NTP secara keseluruhan tertahan oleh penurunan pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang tercatat sebesar 96,18, terkontraksi signifikan dibandingkan triwulan II 2025 yang sebesar 134,63, serta subsektor peternakan yang tercatat sebesar 98,47 (Grafik 5.7).

Meskipun NTP DIY secara agregat masih berada di atas angka 100 yang mengindikasikan kemampuan tukar petani yang terjaga, terdapat tiga subsektor yang berada di bawah level tersebut, yaitu tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kenaikan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga pada ketiga subsektor tersebut belum sepenuhnya terkompensasi oleh kenaikan harga jual hasil produksinya.

Perkembangan NTP tersebut mengindikasikan kesejahteraan petani yang tetap terjaga, tecermin dari pertumbuhan indeks harga yang diterima petani (It) yang lebih tinggi dibandingkan

Grafik 5.8. Perkembangan NTP dan Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Petani



Sumber: BPS

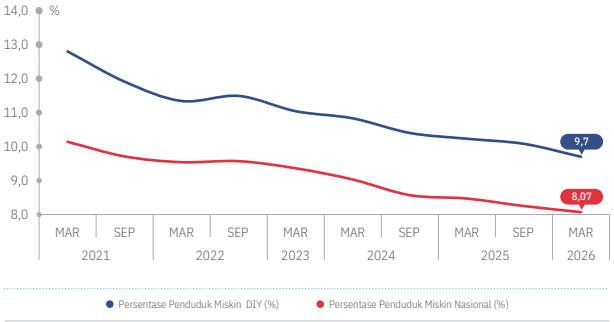
indeks harga yang dibayar petani (Ib). Pada triwulan II 2026, It di DIY tercatat sebesar 143,80, meningkat 5,75% (yoy) dibandingkan triwulan II 2025 yang sebesar 135,98. Sementara itu, Ib pada periode laporan tercatat sebesar 133,51, turut meningkat 3,96% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 128,42.

5.4. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di DIY pada Maret 2026 melanjutkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di DIY tercatat sebesar 408,87 ribu orang atau 9,70% dari total penduduk DIY, mencerminkan penurunan sebesar 3,98% (yoy). Capaian tersebut menjadikan tingkat kemiskinan DIY berada di bawah level 10% untuk pertama kalinya dalam periode pengamatan. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya rasio penduduk miskin sebesar 0,53% dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 10,23%, serta berkurangnya 3,29% dibandingkan September 2025 yang sebesar 422,79 ribu orang, Meski demikian, persentase penduduk miskin di DIY hingga Maret 2026 masih berada di atas angka nasional yang juga mencatat penurunan menjadi sebesar 8,07% (Grafik 5.9).

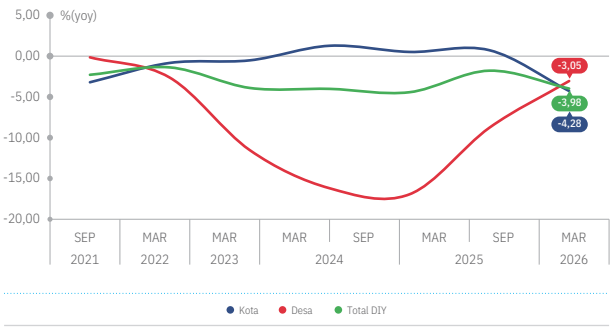
Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan di DIY terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan (Grafik 5.10). Di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 307,30 ribu orang atau 9,55%, mencerminkan penurunan sebesar 4,28% (yoy). Penurunan secara keseluruhan juga didorong oleh berkurangnya kemiskinan di wilayah pedesaan yang tercatat sebesar 101,57 ribu orang atau 10,18% dari penduduk pedesaan, turun sebesar 3,05% (yoy). Meski demikian, penduduk miskin di wilayah perkotaan masih menjadi kontributor terbesar terhadap tingkat kemiskinan di DIY dengan pangsa mencapai 75,16% dari total penduduk miskin. Pada periode laporan, persentase penduduk miskin perkotaan telah berada di bawah level 10%, sementara di wilayah pedesaan masih berada di atas level tersebut (Grafik 5.11) .

Grafik 5.9. Perkembangan Penduduk Miskin



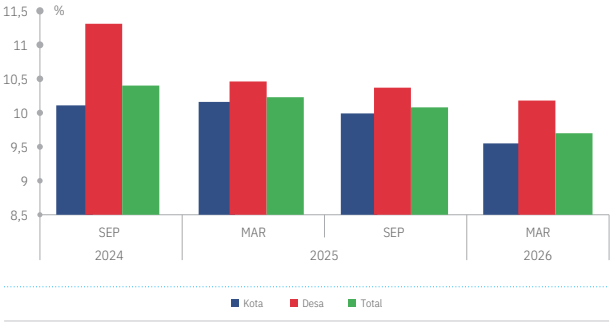
Sumber: BPS DIY

Grafik 5.10. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin



Sumber: BPS DIY

Grafik 5.11. Perkembangan Persentasi Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan Spasial



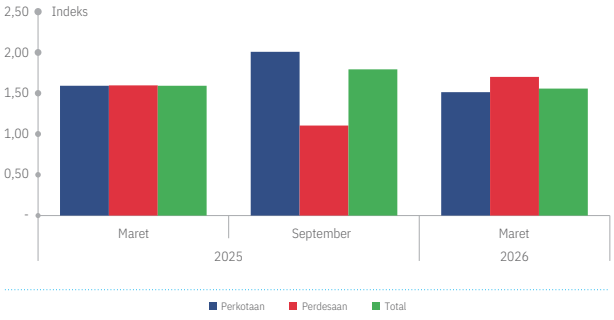
Sumber: BPS DIY

Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan (P1) turut mencatat penurunan menjadi sebesar 1,558, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,592. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) tercatat sebesar 0,370, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,345. Penurunan indeks P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sementara peningkatan indeks P2 mencerminkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang masih perlu dicermati.

Apabila dirinci berdasarkan wilayah, penurunan indeks P1 secara agregat terutama bersumber dari wilayah perkotaan yang tercatat sebesar 1,513 pada Maret 2026, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,591. Sebaliknya, indeks P1 di wilayah pedesaan justru meningkat menjadi 1,700 dari sebelumnya 1,596. Pola serupa terjadi pada indeks P2, dengan wilayah perkotaan tercatat sebesar 0,362 dan pedesaan sebesar 0,400, keduanya meningkat dibandingkan Maret 2025 yang masing-masing sebesar 0,350 dan 0,327. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin di pedesaan berkurang, kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang tersisa di wilayah tersebut cenderung semakin melebar (Grafik 5.12 dan Grafik 5.13).

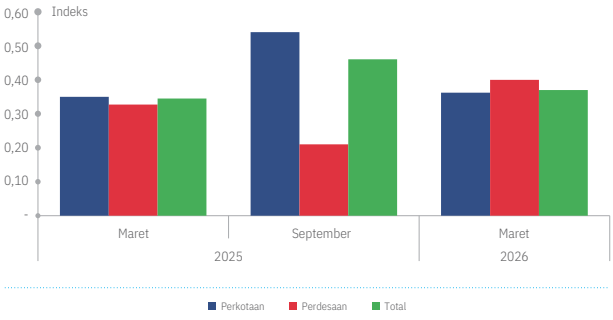
5. *Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai minimum yang dibutuhkan oleh seorang penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (basic needs). Penduduk yang memiliki pendapatan di bawah Garis Kemiskinan dianggap sebagai penduduk miskin.*

Grafik 5.12. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



Sumber: BPS DIY

Grafik 5.13. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)



Sumber: BPS DIY

Garis Kemiskinan (GK) di DIY pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp672.756,00 per kapita per bulan, lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp626.363,00 per kapita per bulan, atau tumbuh sebesar 7,41% (yoy). Secara lebih rinci, GK di wilayah perkotaan dan pedesaan pada Maret 2026 masing-masing tercatat sebesar Rp704.034,00 dan Rp580.455,00 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 7,75% (yoy) dan 6,47% (yoy). Sebagaimana terlihat pada Grafik 5.15, pertumbuhan GK dalam beberapa periode terakhir menunjukkan tren akselerasi. Peningkatan GK tersebut sejalan dengan kenaikan pada Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

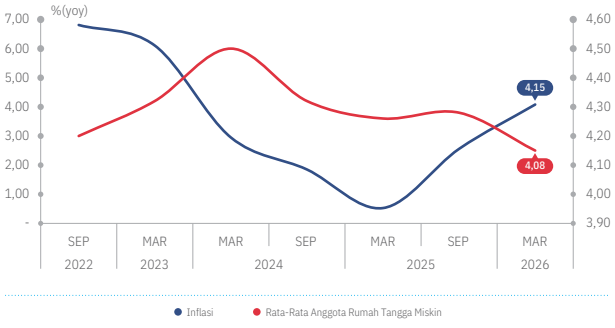
Garis Kemiskinan (GK) DIY menunjukkan volatilitas yang sejalan dengan tren laju inflasi. Peningkatan GK terjadi baik pada komoditas makanan maupun bukan makanan. Komoditas makanan masih memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pembentukan GK, yaitu sebesar 73,02%, sementara sisanya merupakan kontribusi dari komoditas bukan makanan. Pada Maret 2026, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) tercatat sebesar Rp491.237,00 per kapita, meningkat 7,44% (yoy), sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) tercatat sebesar Rp181.429,00 per kapita, meningkat 7,26% (yoy). Laju pertumbuhan kedua komponen tersebut berada di atas realisasi inflasi DIY pada Maret 2026 yang sebesar 4,08% (yoy), yang mencerminkan tekanan biaya hidup yang relatif lebih berat bagi kelompok penduduk berpendapatan rendah dengan pangsa konsumsi pangan yang dominan.

Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebesar 4,15 orang pada Maret 2026, Garis Kemiskinan per rumah tangga di DIY tercatat sebesar Rp2.791.937,00 per rumah tangga per bulan. Nilai tersebut berada di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2026 yang sebesar Rp2.417.495,00, yang mengindikasikan bahwa satu sumber pendapatan berbasis upah minimum belum mencukupi kebutuhan dasar satu rumah tangga miskin di DIY.

Tabel 5.5. Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di DIY

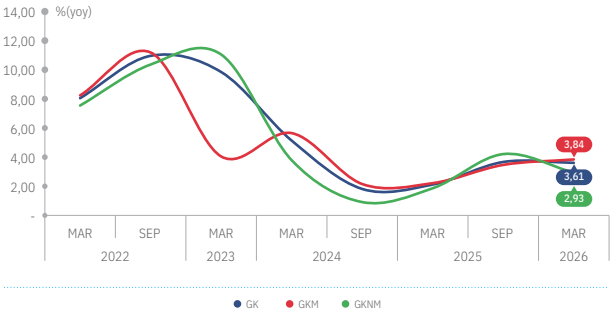
Daerah/ Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2021	366.206	140.801	507.007
Sept 2021	370.047	147.305	517.352
Maret 2022	392.290	151.531	543.821
Sept 2022	412.821	161.094	573.915
Maret 2023	431.962	166.963	598.925
Maret 2024	455.545	173.081	628.626
Sept 2024	466.983	175.116	642.099
Maret 2025	474.766	178.655	653.421
Sept 2025	493.979	187.115	681.094
Maret 2026	512.172	191.862	704.034
Pedesaan			
Maret 2021	304.443	109.797	414.240
Sept 2021	325.101	113.311	438.412
Maret 2022	338.551	117.032	455.583
Maret 2023	366.712	133.230	499.942
Maret 2023	366.712	133.230	499.942
Maret 2024	385.903	138.285	524.188
Sept 2024	393.777	137.739	531.516
Maret 2025	406.045	139.161	545.206
Sept 2025	414.726	141.141	555.867
Maret 2026	432.649	147.806	580.455
Kota+Desa			
Maret 2021	350.057	132.758	482.815
Sept 2021	358.285	138.620	496.905
Maret 2022	378.902	142.770	521.673
Sept 2022	398.363	152.979	551.342
Maret 2023	414.480	158.542	573.022
Maret 2024	437.891	164.546	602.437
Sept 2024	447.321	166.049	613.370
Maret 2025	457.221	169.142	626.363
Sept 2025	473.070	176.261	649.331
Maret 2026	491.237	181.429	672.756

Grafik 5.14. Perkembangan GK dan Inflasi



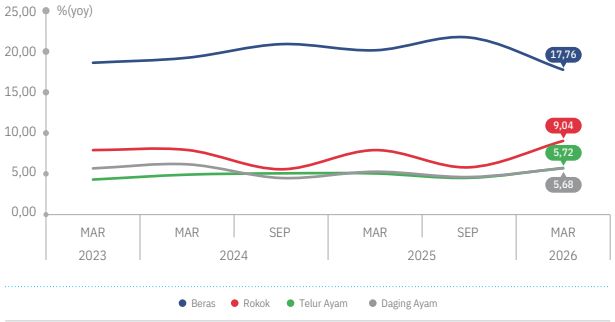
Sumber: BPS DIY

Grafik 5.15. Perkembangan Garis Kemiskinan



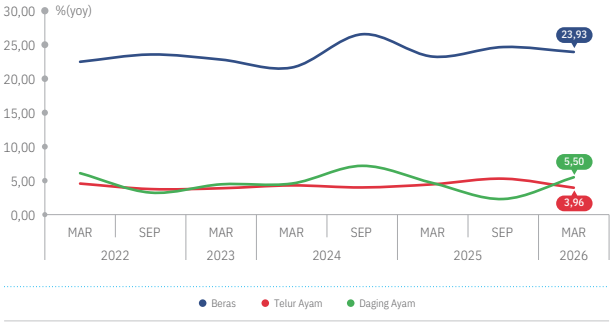
Sumber: BPS DIY

Grafik 5.16. Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKM Perkotaan



Sumber: BPS DIY

Grafik 5.17. Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKM Perdesaan



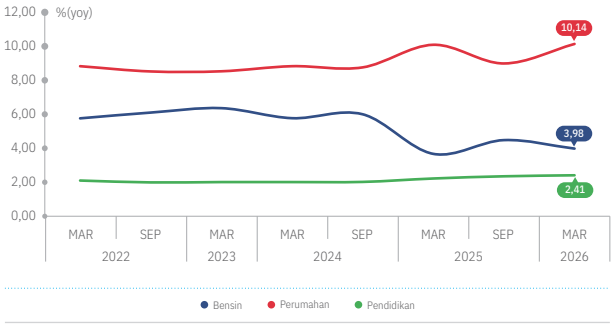
Sumber: BPS DIY

Secara spasial, pertumbuhan GKM di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan, Pada Maret 2026, GKM perkotaan tumbuh sebesar 7,88% (yoy) dengan nilai Rp512.172,00 per kapita, sementara GKM pedesaan tumbuh sebesar 6,55% (yoy) dengan nilai Rp432.649,00 per kapita, Terdapat empat komoditas yang paling berkontribusi terhadap pembentukan GKM, antara lain beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Adapun komoditas beras menjadi kontributor terbesar GKM baik di perkotaan maupun pedesaan, dengan kontribusi masing-masing sebesar 17,76% dan 23,93%. Pada periode laporan, kontribusi beras di wilayah perkotaan tercatat menurun dibandingkan September 2025 yang sebesar 21,72%, sementara kontribusi rokok kretek filter justru meningkat menjadi 9,04% dari sebelumnya 5,80%, sekaligus menjadikannya penyumbang terbesar kedua terhadap GKM perkotaan (Grafik 5.16 dan Grafik 5.17).

Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp181.429,00 per kapita, tumbuh sebesar 7,26% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Secara spasial, pertumbuhan GKBM di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan, dengan masing-masing mencatat pertumbuhan sebesar 7,39% (yoy) dan 6,21% (yoy). Untuk komoditas bukan makanan di perkotaan, perumahan, bensin, dan pendidikan menjadi komoditas dengan andil terbesar, dengan sumbangan masing-masing sebesar 10,14%, 3,98%, dan 2,41% (Grafik 5.18). Adapun di wilayah pedesaan, komoditas dengan sumbangan terbesar terhadap GKBM adalah perumahan, bensin, dan listrik, dengan kontribusi masing-masing sebesar 10,73%, 4,49%, dan 1,20% (Grafik 5.19). Komoditas perumahan mencatat peningkatan andil baik di perkotaan maupun pedesaan dibandingkan September 2025 yang masing-masing sebesar 8,99% dan 10,34%, sejalan dengan berlanjutnya tekanan harga sewa tempat tinggal di DIY.

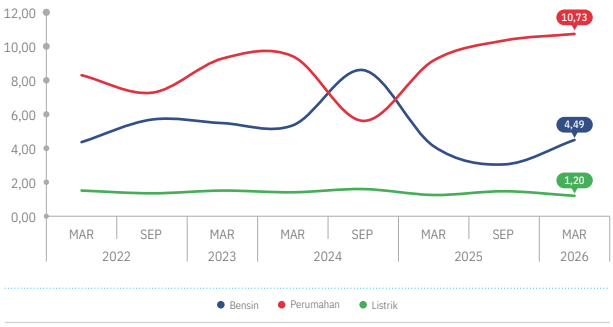
Ketimpangan pengeluaran penduduk DIY pada Maret 2026 terpantau mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Indeks *Gini Rasio* tercatat sebesar 0,411, turun 0,015 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,426, atau turun 0,003 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,414. Penurunan tersebut sejalan dengan menurunnya *Gini Rasio* di wilayah perkotaan yang tercatat sebesar 0,412 pada Maret 2026, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,434. Penurunan turut didukung oleh menurunnya *Gini Rasio* di wilayah pedesaan yang tercatat sebesar 0,329, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,334 (Grafik 5.20).

Grafik 5.18. Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKBM Perkotaan



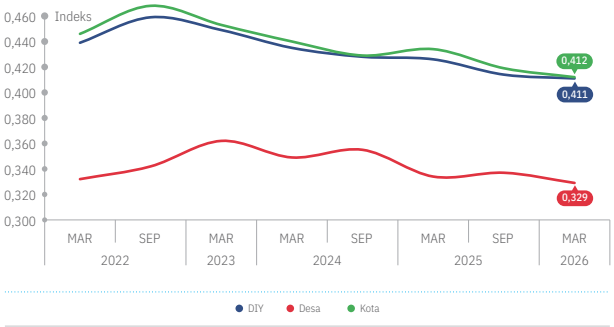
Sumber: BPS DIY

Grafik 5.19. Perkembangan Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap GKBM Perdesaan



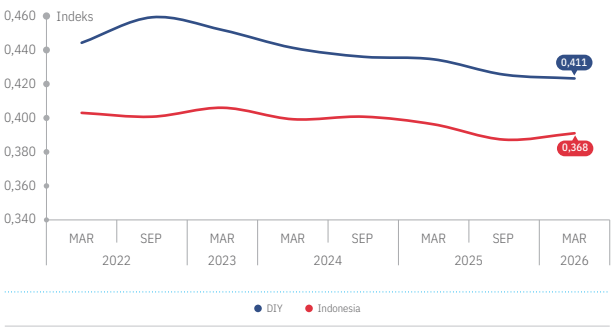
Sumber: BPS DIY

Grafik 5.20. Perkembangan Gini Ratio DIY



Sumber: BPS DIY

Grafik 5.21. Perkembangan Gini Ratio DIY Secara Spasial



Sumber: BPS DIY

Meskipun mencatat penurunan, tingkat ketimpangan di DIY masih lebih tinggi dibandingkan indeks nasional yang sebesar 0,368 (Grafik 6.21). Selisih tersebut bahkan melebar dibandingkan September 2025 seiring meningkatnya *Gini Rasio* nasional dari 0,363. Tingginya *Gini Rasio* DIY ditengarai disebabkan oleh kesenjangan pengeluaran yang signifikan antara penduduk lokal dan penduduk pendatang, yang pola konsumsinya cenderung didominasi oleh produk tersier. Penduduk pendatang umumnya melakukan pengeluaran yang jauh lebih besar, terutama untuk makanan jadi, sewa tempat tinggal, serta produk gaya hidup seperti perawatan kecantikan dan kesehatan. Kondisi ini juga perlu dilihat dalam konteks tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp2.417.495,00 atau meningkat 6,78% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan keterbatasan daya beli sebagian besar penduduk lokal.





06

Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian DIY tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025, didukung oleh perkembangan inflasi DIY yang diproyeksikan terjaga pada rentang sasaran 2,5±1% pada tahun 2026. Di tengah ketidakpastian global, perekonomian DIY diperkirakan tetap kuat sejalan dengan kebijakan kenaikan UMP dan UMK 2026 yang berpotensi mendorong daya beli masyarakat. Kinerja investasi juga berpotensi mengalami pertumbuhan seiring dengan membaiknya kepercayaan investor dan berlanjutnya pembangunan di daerah.

Proyeksi Ekonomi DIY 2026 (yoy)	Proyeksi Inflasi 2026 (yoy)
5,7-6,5%	2,5±1%

6.1 Prospek Perekonomian 2026

Prospek perekonomian global diperkirakan berada dalam tren yang melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global terutama dipengaruhi oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya tensi geopolitik dunia. Perlambatan ekonomi juga diprakirakan terjadi di Eropa, Jepang, dan Tiongkok akibat permintaan domestik yang belum kuat. Lebih lanjut, ekonomi India juga diprakirakan melambat sejalan dengan menurunnya permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diprakirakan berada pada level 3,2%.

Meskipun demikian, **pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu terus ditingkatkan agar sesuai dengan kapasitas perekonomian, Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diprakirakan berada dalam kisaran 4,9-5,7%.** Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas.

Sejalan dengan perekonomian nasional yang tetap baik, perekonomian DIY diperkirakan melanjutkan pertumbuhan positif dibandingkan 2025. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran 5,7 – 6,5% (yoy). Di tengah ketidakpastian global, perekonomian domestik diperkirakan tetap kuat sejalan dengan kebijakan kenaikan UMP dan UMK 2026 yang berpotensi mendorong daya beli masyarakat. Kinerja investasi juga berpotensi mengalami pertumbuhan seiring dengan membaiknya kepercayaan investor dan berlanjutnya pembangunan di daerah. Namun di sisi lain, ketidakpastian ekonomi global diwaspadai dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan impor DIY.

6.1.1 Proyeksi Ekonomi Sisi Permintaan

Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat sejalan kebijakan kenaikan UMP dan UMK tahun 2026 didukung oleh inflasi yang terkendali dalam kisaran target nasional. Selain itu, adanya penyaluran THR, tetap berlanjutnya penyaluran bansos dan stimulus 8+4+5, serta pelaksanaan prioritas Pemerintah yang semakin meluas diperkirakan dapat turut mendorong kinerja pengeluaran pemerintah dan konsumsi RT. Permintaan masyarakat yang tetap kuat seiring dengan momentum libur sekolah, dan long weekend juga dapat mendorong kinerja LU industri pengolahan dan Akmamin dalam rangka pemenuhan permintaan tersebut.

Dari sisi investasi, berlanjutnya penyelesaian pembangunan beberapa infrastruktur eks Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti jalan tol Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, serta berbagai pembangunan infrastruktur DIY berupa jalan, jembatan, rest area, dan revitalisasi jalan diperkirakan akan mendorong kinerja sektor investasi khususnya investasi bangunan.

Dari sisi ekspor, perkembangan kondisi global berpotensi mempengaruhi kinerja ekspor DIY. Adanya ketegangan geopolitik dunia diperkirakan berdampak pada risiko kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi dan disrupsi rantai pasok global sehingga mempengaruhi permintaan (demand) dari negara mitra dagang utama.

Tabel 6.1. Faktor Pendorong dan Penahan Pertumbuhan Ekonomi DIY Sisi Permintaan Tahun 2026

Permintaan	*Upside*	*Downside*
Konsumsi RT	• Kenaikan UMP dan UMK tahun 2026 sebesar 6,78%. • Kebijakan stimulus 8+4+5 dari pemerintah juga berpotensi mendorong peningkatan daya beli serta *spending* Masyarakat • Berlanjutnya penyaluran bansos untuk meningkatkan konsumsi Masyarakat • Penyelenggaraan berbagai *event* yang berskala nasional maupun lokal sebanyak 211 event yang terdiri dari karnaval, festival, maupun olahraga. • Frekuensi cuti bersama dan hari libur nasional di 2026 (25 hari) dapat mendorong peningkatan konsumsi dengan bertambahnya jumlah wisatawan. • Berlanjutnya kebijakan *Rasio Loan to Value* (LTV)/*Financing to Value* (FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan kebijakan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah 0%	• Potensi kenaikan inflasi akibat tekanan global maupun domestik yang mempengaruhi ekspektasi konsumen. Kenaikan inflasi dapat menekan kemampuan konsumsi masyarakat. • Kecenderungan masyarakat untuk menahan konsumsi dikarenakan ketidakpastian kondisi ekonomi

Permintaan	*Upside*	*Downside*
Konsumsi Pemerintah	• Penyaluran gaji ke-13 dan 14 ASN serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin meluas diperkirakan dapat turut mendorong kinerja pengeluaran pemerintah. • Pemerintah melanjutkan sejumlah bansos di 2026 a.l Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), serta adanya pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU).	• Penetapan RAPBD DIY 2026 dengan alokasi pendapatan dan belanja yang lebih rendah dibandingkan tahun 2025 diprakirakan menahan kinerja konsumsi pemerintah yang lebih tinggi
Investasi	• Investasi bangunan dari eks-Proyek Strategis Nasional (eks-PSN) di DIY antara lain jalan tol Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, serta Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) *section* Jalan Baru Kretek-Girijati atau kelok 23 yang sedang berjalan dan ditargetkan dapat beroperasi di 2026. • Pembangunan infrastruktur pemerintah daerah, diantaranya pembangunan jalan, jembatan, *rest area*, dan revitalisasi jalan. • Terdapat Proyek Nasional baru berupa Program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di DIY yang memulai pembangunan di tahun 2026 dengan lahan seluas 5,7 Ha.	• Promosi investasi yang masih terbatas sehingga mengakibatkan belum optimalnya daya saing investasi di DIY
Ekspor-Impor	• Ditandatanganinya perjanjian IEU-CEPA yang berpotensi mendorong peningkatan ekspor DIY ke Eropa, utamanya bagi produk tekstil • Penambahan maskapai rute *direct flight* untuk penerbangan internasional. • Pemberian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk mendukung ekspor bagi para pelaku UMKM	• Kurangnya infrastruktur penunjang ekspor, antara lain tidak adanya pelabuhan. Saat ini ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Mas di Jawa Tengah, atau melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. • Revisi PP No. 8/2025 mengharuskan eksportir SDA menempatkan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam SKI (bank nasional) selama 12 bulan, berlaku efektif 1 Januari 2026, untuk memperkuat devisa negara. Hal ini berpotensi menahan biaya untuk pembelian bahan baku. Meski demikian, pemerintah akan memberikan insentif seperti penggunaan DHE sebagai agunan, sehingga eksportir akan memiliki akses lebih mudah ke kredit dalam rupiah untuk pembiayaan operasional.

6.1.2 Proyeksi Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha (LU), meningkatnya pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2026 utamanya dipengaruhi oleh kinerja beberapa LU Utama. LU Industri Pengolahan yang merupakan kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi DIY diperkirakan bertumbuh positif seiring dengan tetap kuatnya permintaan domestik. Di samping itu, kinerja LU yang berkaitan dengan pariwisata diperkirakan terus berlanjut seiring dengan peningkatan **arus wisatawan baik domestik maupun internasional** sehingga dapat berdampak positif pada tumbuhnya LU Penyediaan akomodasi dan makan minum, Sub LU Industri Pengolahan Makanan dan Minuman, LU Perdagangan, dan LU Transportasi dan Pergudangan.

Optimisme pada sektor lainnya tercermin pada tetap berlanjutnya penyelesaian beberapa infrastruktur seperti jalan tol Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) kelok 18, pembangunan wilayah DIY bagian selatan, serta berbagai pembangunan infrastruktur pemerintah daerah seperti jalan, jembatan, dan rest area yang diperkirakan akan mendorong kinerja sektor konstruksi lebih tinggi dibanding capaian sebelumnya.

Tabel 6.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pertumbuhan Ekonomi DIY Sisi Penawaran Tahun 2026

Lapangan Usaha	*Upside*	*Downside*
Pertanian	• Implementasi digitalisasi dan teknologi pertanian diharapkan dapat mendorong produksi komoditas pertanian. • Replikasi *website* dipanen.id di seluruh kabupaten/kota di DIY untuk mempermudah monitoring distribusi pasokan dan pengendalian harga. • Optimalisasi KAD intra provinsi dan antar provinsi untuk menjaga pasokan dan harga komoditas pangan penting. • Implementasi Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk mengatur rekayasa pola tanam komoditas hortikultura (cabai dan bawang merah) untuk meningkatkan produksi • Rencana program MBG diperkirakan akan mendorong kinerja pertanian karena berpotensi meningkatkan permintaan akan kebutuhan bahan baku • Penguatan optimalisasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dalam rangka menjaga wilayah budidaya cadangan pertanian pangan. • Penambahan kelompok tani baru untuk peningkatan ketahanan pangan	• Alih fungsi lahan pertanian di DIY karena pembangunan proyek infrastruktur.
Industri Pengelolaan	• Digulirkannya insentif fiscal 8+4+5, seperti PPh 21 DTP untuk 1,7 juta pekerja padat karya • Keberlanjutan pertumbuhan industri pengolahan makanan sejalan dengan tetap kuatnya kinerja pariwisata. • Pelaksanaan pameran berskala internasional seperti Jogja International Furniture & Craft Fair Indonesia (JIFFINA) dengan komoditas : mebel kayu, home deco, kerajinan rotan. • Kolaborasi dan koordinasi antara BI dan dinas terkait dalam mendorong UMKM naik kelas • Berlanjutnya stimulus Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) di sepanjang tahun 2026	• Peningkatan biaya tenaga kerja seiring dengan kenaikan UMP 2026. • Potensi kenaikan biaya bahan baku yang berasal dari domestik maupun impor akibat dinamika berbagai kebijakan.
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	• Frekuensi cuti bersama dan hari libur nasional di 2026 sebanyak 25 hari. Hal ini mendorong peningkatan konsumsi dengan bertambahnya jumlah wisatawan ke DIY. • Pembukaan rute baru dari Bandara YIA – BDO diprakirakan dapat meningkatkan kinerja Akmamin • Kunjungan wisatawan dan pelajar (*study tour*) berpotensi turut mendorong permintaan akomodasi dan belanja • Pemberian stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dengan total anggaran adalah Rp911,16 miliar yang berasal dari APBN maupun non-APBN pada periode HBKN Idul Fitri.	• Belum optimalnya akses konektivitas dari bandara menuju destinasi wisata di DIY.
Konstruksi	• Investasi bangunan dari eks-PSN di DIY antara lain jalan tol Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, serta Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) *section* Jalan Baru Kretek-Girijati atau kelok 23 yang sedang berjalan dan ditargetkan dapat beroperasi di 2026. • Pelaksanaan beberapa proyek pemerintah daerah, terutama pembangunan jalan dan jembatan. • Terdapat Proyek Nasional baru berupa Program PSEL di DIY yang memulai pembangunan di tahun 2026 dengan lahan seluas 5,7 Ha.	• Kendala pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional berpotensi menghambat/menunda penyelesaian proyek infrastruktur. • Kenaikan bahan baku konstruksi.

6.2 Prospek Inflasi 2026

Inflasi DIY pada tahun 2026 diprakirakan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2025 namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Beberapa faktor seperti peningkatan permintaan dan dinamika geopolitik menjadi pemicu tekanan inflasi sepanjang 2026 (Tabel 6.3). Inflasi secara umum diproyeksikan tetap terjaga didukung oleh upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY untuk menjaga kestabilan inflasi melalui koridor 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif). Hingga periode laporan, telah dilaksanakan berbagai upaya dan rencana jangka pendek ke depan, antara lain kondisi tersebut didukung oleh upaya TPID DIY dalam kerangka 4K, melalui perluasan kios Segoro Amarto sebagai *price reference store* melalui Warung MRANTASI, pelaksanaan edukasi MRANTASI Pasar, MRANTASI PKK, MRANTASI *Goes to School,* dan MRANTASI *Goes to Campus* serta rencana pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, dan Pasar Murah berdasarkan 3Tepat (Tepat Waktu, Tepat Lokasi, dan Tepat Sasaran) oleh TPID se-DIY untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan pasokan.

Selain itu, pengkinian data, sinergi dan koordinasi TPID DIY dengan berbagai instansi juga terus diperkuat, untuk memastikan kelancaran dan kesinambungan pasokan bahan pangan berdasarkan data yang lebih akurat. Ke depan, beberapa risiko dan faktor yang perlu diwaspadai dalam menjaga pencapaian target inflasi diantaranya risiko dinamika cuaca, tekanan permintaan dari berbagai rencana program, permintaan musiman oleh wisatawan, dan ketidakpastian global yang berdampak pada harga komoditas global.

Tabel 6.3. Faktor Pemicu dan Penahan Inflasi 2026

	Upside	*Downside*
Kelompok Makanan dan Minuman	• Meningkatnya interkonektivitas antar wilayah sehingga mendorong peningkatan konsumsi dengan bertambahnya jumlah wisatawan. • Peningkatan permintaan luar daerah untuk komoditas surplus DIY. • Peningkatan harga pupuk sebagai dampak kenaikan harga urea global. • Peningkatan harga pangan sebagai dampak *imported inflation* dari kenaikan komoditas global. • Pasokan sayur DIY yang berfluktuatif dan adanya indikasi aliran pasokan ke luar daerah. • Prakiraan penurunan produktivitas tanaman pangan, antara lain padi dan jagung di tengah berlangsungnya El-Nino.	• Intensnya upaya pengendalian inflasi pangan oleh TPID melalui penguatan program GPIPS (Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera) • Realisasi KAD intraprovinsi: Sleman – Bantul, Bantul – Kulon Progo – Gunungkidul, Yogyakarta – Bantul – Sleman, Yogyakarta – Kulon Progo, dan dorongan KAD intraprovinsi lainnya sebagai arahan dari *High Level Meeting* TPID se-DIY.
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	• Tarif sewa rumah dan kontrak rumah yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. • Kenaikan tarif tukang dan harga komoditas konstruksi seiring percepatan penyelesaian PSN. • Kenaikan harga komoditas global yang berimplikasi pada kenaikan harga bahan bangunan.	• Bertambahnya APBN untuk subsidi Listrik dan energi yang berpotensi menurunkan tarif Listrik, BBM, serta LPG.
Kelompok Transportasi	• Prediksi pemberian diskon pada tarif pesawat dan Listrik pada momen HBKN atau libur Panjang. • Volatilitas harga minyak dunia yang berdampak pada potensi penyesuaian harga BBM non subsidi.	• Diversifikasi alternatif moda transportasi seiring telah beroperasinya Jalan Tol Jogja – Bawen, Jogja - Solo - YIA secara penuh sehingga menahan tekanan permintaan angkutan udara lebih tinggi.
Kelompok Pendidikan	• Kenaikan tarif Pendidikan di DIY rata-rata 10% setiap tahun. • Potensi kenaikan permintaan seiring dengan rencana penambahan jumlah mahasiswa baru di beberapa PTN/PTS besar di DIY.	

	Upside	*Downside*
Kelompok Lainnya	• Kenaikan UMP sebesar 6,78% dibandingkan tahun sebelumnya. • Berlanjutnya kenaikan harga emas global akibat ketidakpastian. • Tren di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya andil inflasi pada *lifestyle*, dibandingkan tren di Kab. Gunungkidul yang menunjukkan andil inflasi yang lebih tinggi dari kelompok pangan.	• Bauran kebijakan moneter dan fiskal dengan didukung sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



Tim Penyusun



Pengarah
Sri Darmadi Sudibyo

Penanggung Jawab
Hermanto

Koordinator Penyusun
Arya Jodilistyo

Tim Penulis
Alya Nabila Putri
Fitrianda Ayu Utami
Jeanet Kaori Anggasta Gunawan
Prastyastuti Ari Ratnasari
Rachmad Irvan Syahputra
Sigit Arfian Triswanto

Kontributor Foto
Anthony Angger Pamungkas
Bagas Auallya
Surya Pramana
Dadang Restu Fitriyanto
Iwan Iswanto
Muhammad Izhar

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah
Jl. P. Senopati No.4-6, Yogyakarta
Telp.0274-377755 Fax.0274-371707
https://www.bi.go.id/

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah
Jl. P. Senopati No.4-6, Yogyakarta
Telp.0274-377755 Fax.0274-371707
https://www.bi.go.id/

e-Book LPP dapat diakses melalui QR.

